



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Salah satu misi pemerintahan Indonesia yang juga sejalan dengan tujuan MDGs saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan upaya konkrit adalah mendorong dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi setiap pengelola keuangan daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan misi tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga telah mengatur proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan.

Dalam Kerangka Manajemen Pemerintahan, proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan berujung pada tahapan evaluasi dan pelaporan yang dalam konteks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Laporan tersebut SETIDAK-TIDAKNYA meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah yang penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.*

Beberapa aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah memberikan penjelasan secara teknis normative atas Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya menyatakan bahwa “PPKD Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan Keuangan sebagaimanadimaksudterdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Lebih lanjut pada tahun 2010 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Secara teknis normatif Standar Akuntansi Berbasis Akrual telah di-breakdown melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Penyajian laporan keuangan terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Merujuk pada uraian di atas maka Pemerintah Kabupaten Manggarai berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

laporan keuangan ini didasarkan pada berbagai ketentuan aturan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai) selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka akuntabilitas, manajemen, transparan dan kesinambungan antar generasi (*intergenerational equity*).

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, social maupun politik.

Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan terdiri dari:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer baik dari Pusat atau dari Provinsi maupun Pembiayaan, apakah mengalami kenaikan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

C. Dasar Hukum

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Nomor 14 Seri F Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2006 Nomor 14 Seri F Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7);



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

33. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021 s.d. 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 03);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14);
35. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2020 Nomor 50 tambahan Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 50);
36. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 53);
37. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai;
38. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 47 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

D. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- A. Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- B. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL
- C. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- D. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- E. Penjelasan Pos-pos Neraca
- F. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Bab V Penutup

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
APBD

A. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indicator social ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 sebesar 19,84%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,70%.
- c. Gini Ratio Tahun 2022 sebesar 0,291%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 65,83%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 0,92%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,68%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) Tahun Tahun 2022 sebesar Rp4.994.854,86

Gini Ratio dan Inflasi tidak dapat diuraikan sebagai bagian dari kinerja Ekonomi Makro Kabupaten Manggarai dengan pertimbangan:

- a. Kota-kota di dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi atau obyek survey Inflasi adalah Kota Kupang, Kota Maumere dan Kota Waingapu.
- b. Indikator Gini Ratio tidak tersedia dalam data BPS Kabupaten Manggarai, sedangkan data BPS Provinsi NTT dan BPS Nasional hanya menyediakan data terbatas untuk Indikator Gini Ratio Provinsi NTT dan Gini Ratio Nasional.

1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan—kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai periode tertentu.

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relative terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		Naik/turun (%)
		2021	2022	
1.	Kabupaten Manggarai (%)	20,48 %	19,84%	0,64
2.	Kabupaten Manggarai (Ribu Orang)	71,03	69,68	1,35
3.	Provinsi NTT (%)	20,90 %	20,05%	0,85
4.	Nasional (%)	9,78%	9,54%	0,24
5.	Peringkat Provinsi	6	6	0
6.	Peringkat Nasional	435	434	Naik 1 peringkat

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai

Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 sebesar 19,84% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin masih 20,48%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai masih di bawah provinsi dan di atas nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun		Naik/turun (%)
		2021	2022	
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai	4,83	3,34	1,49
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT	4,02	3,64	0,38
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,61	1,56	0,05
4.	Peringkat Provinsi	6	3	3
5.	Peringkat Nasional	436	436	0

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun		Naik/Turun (%)
		2021	2022	
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Manggarai	1,60	0,83	0,77
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi NTT	1,05	0,93	0,12
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,39	(0,01)
4.	Peringkat Provinsi	6	14	-8
5.	Peringkat Nasional	469	474	5

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Pengangguran Terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun		Naik/Turun (%)
		2021	2022	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Manggarai	3,70	3,77	-0,07
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,28	3,54	0,74
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	5,86	1,70
4.	Peringkat Provinsi	-	20	-1
5.	Peringkat Nasional	232	245	-13

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Manggarai Tahun 2021 mencapai 65,01 poin dengan kategori sedang, sementara di tahun 2022 naik mencapai 65,83 sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun		Naik/turun (%)
		2021	2022	
1.	Kabupaten/Kota	65,01	65,83	-0,82
2.	Provinsi	65,28	65,90	0,62
3.	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,62
4.	Peringkat Provinsi	12	11	1
5.	Peringkat Nasional	494	494	tetap

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin dari keadaan tahun 2021. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

IPM Kabupaten Manggarai pada saat ini berada pada urutan 16 dari 22 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada pada urutan 494 di tingkat nasional dari 548 Kab/Kota yang ada di Indonesia pada tahun 2022.

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi Tingkat Nasional
		Tahun			Tahun 2022
		2020	2021	2022	
1.	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	2.267,50	2.296,77	2.391,36	72.695,28
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(0,89)	1,30	2,21	2,51
3.	Peringkat Provinsi	4	16	13	26

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai

5. Struktur Perekonomian Kabupaten Manggarai

Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam miliaran rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	A-Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.002,09	1.029,85	1.102,09
2.	B-Pertambangan dan Penggalian	117,20	119,49	127,67
3.	C-Industri Pengolahan	17,68	17,24	18,56
4.	D-Pengadaan Listrik dan Gas	5,22	5,34	6,12
5.	E-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,96	5,61	5,65
6.	F-Konstruksi	645,85	680,41	698,72
7.	G-Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	418,27	436,29	478,87
8.	H-Transportasi dan Pergudangan	158,52	160,75	171,02
9.	I-Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,52	15,98	19,82
10.	J-Informasi dan Komunikasi	476,12	485,25	501,95
11.	K-Jasa Keuangan dan Asuransi	320,27	347,31	381,90
12.	L-Real Estate	99,22	99,25	105,53
13.	M, N-Jasa Perusahaan	7,21	6,27	6,76
14.	O-Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	742,05	723,62	728,25
15.	P-Jasa Pendidikan	360,93	367,76	374,38
16.	Q-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,92	99,53	103,00
17.	R, S, T, U-Jasa lainnya	161,17	162,44	164,55
18.	Produk Domestik Regional Bruto	4.646,21	4.762,40	4.994,85
19.	Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	4.646,21	4.762,40	4.994,85
20.	PDRB Provinsi	68.809.610,00	70.540.660,00	72.695.280,00
21.	PDRB Nasional	10.722.999.300,00	11.120.077.900,00	11.710.397.800,00
22.	Peringkat Provinsi	4	16	13

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai

B. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada beberapa prinsip antara lain partisipatif atau melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan,



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin anggaran dan keadilan anggaran, serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran. Disamping itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga memperhatikan berbagai temuan aparat pemeriksa baik internal maupun eksternal sebagai referensi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Penetapan Pendapatan Daerah dilakukan melalui perkiraan pendapatan yang dapat dicapai, terukur dan rasional dengan mempertimbangkan potensi Kabupaten Manggarai dan realisasi penerimaan tahun 2022. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan PAD tahun 2022, serta ketentuan peraturanperundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Manggarai.
- 3) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 4) Penerimaan atas jasa layanan Kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Bank telah memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.
- 6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 7) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atauJasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang penganggaran dana Perimbangan sebagai berikut:

- 1) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022
- 2) Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 3) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022
- 4) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non fisik Tahun Anggaran 2022
- 5) Rincian Alokasi Dana Alokasi Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022
- 6) Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019.

Uraian penganggaran atas Lain-Lain pendapatan Daerah Yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran penerimaan hibah Kabupaten Manggarai tahun 2022 bersumber dari Hibah IPDM-IP, Hibah PHJD dan Hibah Air Minum Pedesaan yang bersumber dari APBN yang telah didasari pada Perjanjian.
- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya terdistribusi pada beberapa SKPD. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitassosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

a. Belanja Operasi

Penganggaran belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
 - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutase pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan Kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 - d) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
 - e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- f) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru dianggarkan setelah dipastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi dana Tunjangan profesi dan Tambahan Penghasilan Guru dan tunjangan khusus guru dari APBN.
- b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Belanja Modal

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Manggarai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Alokasi Belanja Modal dalam APBD Kabupaten Manggarai digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah terdistribusi pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
- e. Belanja Tak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- f. Belanja Transfer
Penganggaran Belanja Transfer berpedoman pada Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Bagi Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Manggarai menganggarkan belanja bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta beberapa Peraturan Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Merujuk pada beberapa ketentuan tersebut diatas, pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan anggaran untuk dana Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari dana Transfer setelah dikurangi dana DAK, serta mengalokasikan dana transfer Desa dari APBN sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) Tahun 2022 sebesar Rp40.620.129.382,80

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk: 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, 2) penyertaan modal daerah, 3) pembentukan Dana Cadangan, 4) Pemberian Pinjaman Daerah, 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Realisasi Pendapatan

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk pendapatan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 8 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Manggarai (dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	1.148.633.546.856,00	1.090.365.130.064,85	94,93
PENDAPATAN ASLI DAERAH	121.176.876.649,00	110.722.937.745,85	91,37
Pendapatan Pajak Daerah	23.859.795.327,00	17.591.100.545,84	73,73
Pendapatan Retribusi Daerah	14.616.143.756,00	6.636.049.044,00	45,40
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.580.221.250,00	3.371.631.127,65	51,24
Lain-lain PAD yang sah	76.120.716.316,00	83.124.157.028,36	109,20
PENDAPATAN TRANSFER	941.000.860.207,00	919.332.114.485,00	97,70
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	900.812.876.993,00	895.317.288.086,00	99,39
Dana Perimbangan	777.627.295.993,00	772.131.707.086,00	99,29
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	123.185.581.000,00	123.185.581.000,00	100,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	40.187.983.214,00	24.014.826.399,00	59,76
Pendapatan Bagi Hasil	40.187.983.214,00	24.014.826.399,00	59,76
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	86.455.810.000,00	60.310.077.834,00	69,76
Pendapatan Hibah	10.000.000.000,00	9.297.000.000,00	92,97
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	76.455.810.000,00	51.013.077.834,00	66,72

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp1.148.633.546.856,00** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp121.176.876.649,00**, Pendapatan Transfer sebesar **Rp941.000.860.207,00** dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp86.455.810.000,00**.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp1.090.365.130.064,85** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp110.722.937.745,85**, Pendapatan Transfer sebesar **Rp919.332.114.485,00** dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp60.310.077.834,00**.

2. Realisasi Belanja

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk belanja daerah.

Tabel 9 Ikhtisar Realisasi Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Manggarai (dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA	1.203.443.264.459,00	1.133.331.022.443,94	94,17
BELANJA OPERASI	832.537.175.122,00	747.599.452.368,96	89,80
Belanja Pegawai	443.203.536.777,00	416.863.482.286,24	94,06
Belanja Barang dan Jasa	291.767.608.712,00	267.835.774.738,00	91,80
Belanja Bunga	1.000.000.000,00	727.530.923,72	72,75
Belanja Subsidi	1.045.090.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah	93.399.088.641,00	60.060.498.551,00	64,31
Belanja Bantuan Sosial	2.121.850.992,00	2.112.165.870,00	99,54
BELANJA MODAL	180.784.326.029,00	169.206.541.293,98	93,60
Belanja Modal Tanah	3.798.889.291,00	1.962.083.000,00	51,65
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.259.435.891,00	33.377.856.959,98	94,66
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.043.179.369,00	71.649.025.218,00	96,77
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	67.682.821.478,00	62.217.576.116,00	91,93
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00	5.329.997.314,00	76,14
Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	5.329.997.314,00	76,14
BELANJA TRANSFER	183.121.763.308,00	183.121.727.308,00	100,00
Belanja Bagi Hasil	3.847.593.908,00	3.847.557.908,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	179.274.169.400,00	179.274.169.400,00	100,00
PEMBIAYAAN (PENERIMAAN-PENGELUARAN)	54.809.717.603,00	55.512.717.603,00	101,28
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.809.717.603,00	74.809.717.603,00	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.559.000.049,00	68.559.000.049,09	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	6.250.717.554,00	6.250.717.554,00	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	19.297.000.000,00	96,49
Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	19.297.000.000,00	96,49

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp1.203.443.264.459,00** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp832.537.175.122,00**, Belanja Modal sebesar **Rp180.784.326.029,00**, Belanja Tak Terduga sebesar **Rp7.000.000.000,00**, Belanja Transfer sebesar **Rp183.121.763.308,00** dan Anggaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 sebesar **Rp54.809.717.603** yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp74.809.717.603,00** dikurangi Pengeluaran Pembiayaan **Rp20.000.000.000,00**.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 sebesar **Rp1.105.257.718.284,94** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp747.599.452.368,96**, Belanja Modal sebesar **Rp169.206.541.293,98**, Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp5.329.997.314,00**, Belanja Transfer **Rp183.121.727.308,00** dan Realisasi Pembiayaan sebesar **Rp55.512.717.603,09** yang terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp74.809.717.603,09** dikurangi Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp19.297.000.000,00**

3. Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh Undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Data kinerja *mandatory spending* dalam tata Kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai meliputi hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

a. Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran Kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD Daerah dan Puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD Daerah dan Puskesmas.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional 1 RSUD Daerah, 22 Puskesmas termasuk Puskesmas pembantu, Poliklinik Desa, Kesehatan Des yang juga berdampak kepada tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan dan petugas kesehatan lainnya.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Induk TA 2022 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp266.698.230.136,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp978.789.058.893,00 atau sebesar **27%**.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp301.948.959.921,00 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp760.239.727.682,00 atau sebesar **40%**.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
a. Belanja pada Dinas Kesehatan		
1) BELANJA OPERASI	114.503.950.803,00	105.175.254.433,00
a) Belanja Pegawai	52.491.045.278,00	54.179.320.796,00
b) Belanja Barang dan Jasa	61.762.905.525,00	50.745.933.637,00
c) Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00
2) BELANJA MODAL	78.769.867.260,00	73.039.446.514,00
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.669.275.085,00	24.104.556.578,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.100.000.000,00	48.934.889.936,00
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	592.175,00	0,00
b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain:	55.351.377.073,00	55.499.830.370,00
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	1.810.000,00	1.810.000,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	26.972.956.564,00	27.614.323.636,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	488.559.860,00	477.278.029,00
4) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	96.240.000,00	96.240.000,00
5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	259.664.648,00	264.464.648,00
6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	109.560.000,00	109.560.000,00
7) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	17.630.000,00	17.630.000,00
8) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	0,00	0,00
9) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	4.008.316.705,00	3.901.714.270,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
10) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	2.135.877.928,00	1.887.181.466,00
11) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	118.800.000,00	58.800.000,00
12) Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	109.007.324,00	149.687.324,00
13) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	918.547.044,00	891.446.997,00
14) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Perangkat Daerah BLUD RSUD dr Ben Mboy	163.430.000,00	152.810.000,00
15) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Ponggeok	803.620.000,00	803.620.000,00
16) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Wae Mbeleng	796.440.000,00	796.320.000,00
17) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Lao	1.200.560.000,00	1.200.560.000,00
18) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Kota	1.249.200.000,00	1.249.200.000,00
19) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Langke Majok	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
20) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Watu Alo	624.260.000,00	624.260.000,00
21) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Reo	1.185.020.000,00	1.185.020.000,00
22) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Iteng	955.750.000,00	955.750.000,00
23) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Nanu	925.000.000,00	922.970.000,00
24) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Ketang	1.027.710.000,00	1.027.710.000,00
25) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Wae Kajong	975.780.000,00	975.780.000,00
26) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Pagal	1.142.227.000,00	1.142.227.000,00
27) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Timung	891.220.000,00	855.220.000,00
28) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Cancar	1.347.200.000,00	1.337.700.000,00
29) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Loce	839.720.000,00	839.720.000,00
30) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Wangko	785.960.000,00	785.132.000,00
31) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Bangka Kenda	864.360.000,00	864.360.000,00
32) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Bea Mese	649.750.000,00	625.855.000,00
33) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Wae Codi	793.760.000,00	793.640.000,00
34) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Narang	910.160.000,00	910.160.000,00
35) Sub Kegiatan Operasional pelayanan Puskesmas Dintor	883.280.000,00	881.680.000,00
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	248.625.195.136,00	233.714.531.317,00
Total Belanja Daerah	1.431.829.690.133,00	1.203.443.264.459,00
Gaji ASN	75.216.289.675,00	80.814.412.880,00
Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	173.408.905.461,00	152.900.118.437,00
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	12%	13%

b. *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD Induk TA 2022 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp41.8046.670.894,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.431.829.690.133,00 atau sebesar **29%**.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp363.940.903.420,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.203.443.264.459,00 atau sebesar **30%**. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
a. Belanja pada Dinas Pendidikan	418.046.670.894,00	365.087.807.443,00
1) BELANJA OPERASI	359.808.140.894,00	350.941.897.976,00
a) Belanja Pegawai	238.515.514.992,00	236.012.662.814,00
b) Belanja Barang dan Jasa	26.351.542.902,00	24.054.776.621,00
c) Belanja Hibah	94.186.083.000,00	90.299.458.541,00
d) Belanja Bantuan Sosial	755.000.000,00	575.000.000,00
2) BELANJA MODAL	58.238.530.000,00	14.145.909.467,00
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	676.983.950,00	1.384.315.840,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.561.546.050,00	12.761.593.627,00
b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:		
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	111.333.600,00	202.375.600,00
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	35.037.500,00	35.037.500,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	49.537.500,00	70.129.200,00
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	15.515.200,00	145.450.000,00
5) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	25.382.500,00	39.432.500,00
6) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	238.215.514.992,00	235.794.962.814,00
7) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	148.137.000,00	98.700.000,00
8) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5.640.000,00	13.730.000,00
9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	7.096.800,00	62.970.000,00
10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	26.823.000,00	30.220.900,00
11) Sub Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	6.440.000,00	33.270.000,00
12) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	19.978.000,00	27.376.500,00
13) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	136.172.700,00	110.723.700,00
14) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	16.200.000,00	77.670.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
15) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	36.199.500,00	36.199.500,00
16) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1.680.000,00	5.040.000,00
17) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	8.312.500,00	8.312.500,00
18) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	79.160.000,00	196.125.000,00
19) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00
20) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1.920.000,00	1.920.000,00
21) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	130.500.000,00	109.350.000,00
22) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	84.000.000,00	49.000.000,00
23) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00
24) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	12.225.260.000,00	1.118.165.367,00
25) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	7.233.175.000,00	245.700.000,00
26) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	163.520.000,00	247.185.800,00
27) Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	400.000.000,00	459.327.015,00
28) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	834.624.800,00	1.673.900.901,00
29) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	6.275.275.000,00	1.343.214.959,00
30) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	19.634.000,00	41.183.900,00
31) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	34.500.000,00	186.631.700,00
32) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	23.272.000,00	79.910.000,00
33) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1.646.740.000,00	1.656.440.000,00
34) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	72.445.000,00	61.540.000,00
35) Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	484.103.000,00	291.213.900,00
36) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	45.991.215.000,00	46.306.328.951,00
37) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	15.409.043.200,00	0,00
38) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	17.976.500.050,00	3.867.287.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
39) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.371.645.000,00	611.525.812,00
40) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	543.791.400,00	356.330.446,00
41) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.750.000.000,00	3.877.973.974,00
42) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	300.000.000,00	1.421.002.062,00
43) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	634.813.000,00	1.051.661.687,00
44) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	100.000.000,00	211.469.400,00
45) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	183.522.100,00	1.057.696.740,00
46) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	254.388.750,00	243.623.800,00
47) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	217.020.000,00	280.950.000,00
48) Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	305.957.000,00	117.027.000,00
49) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	30.464.595.000,00	30.650.463.309,00
50) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	25.255.000,00	25.255.000,00
51) Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	0,00	371.319.214,00
52) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	0,00	54.657.000,00
53) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.267.492.000,00	367.447.800,00
54) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5.925.616.100,00	5.946.316.100,00
55) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.377.036.400,00	1.126.369.254,00
56) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	909.212.100,00	1.237.854.727,00
57) Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	70.120.100,00	72.718.100,00
58) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	22.104.793.772,00	19.890.136.431,00
59) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	289.551.000,00	237.440.000,00
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	417.044.696.564	363.935.263.213,00
Total Belanja Daerah	1.431.829.690.133	1.203.443.264.459,00
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	29,13%	0,30



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

c. *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Manggarai adalah adanya pembangunan jalan ruas kabupaten yang bersumber dari Dana DAK, pembangunan jaringan irigasi kabupaten dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Induk TA 2022 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp**675.560.701.554,00** dari nilai belanja daerah senilai Rp**1.431.829.690.133,00** atau sebesar **32%**.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp**455.579.435.062,00** dari nilai belanja daerah senilai Rp**1.203.443.264.459,00** atau sebesar **18%**.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Kabupaten Manggarai

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	Total Belanja Daerah	1.431.829.690.133,00	1.203.443.264.459,00
2	Belanja Bagi Hasil Dan/Atau Transfer kepada daerah dan/atau Desa (Jumlah a+b)	183.468.482.600,00	183.121.763.308,00
	a. Belanja Bagi Hasil	3.859.437.200,00	3.847.593.908,00
	b. Bantuan Keuangan	179.609.045.400,00	179.274.169.400,00
3	Selisih (1-2)	1.248.361.207.533,00	1.020.321.501.151,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	499.344.483.013,20	408.128.600.460,40
5	a) Belanja Modal:	396.308.192.962,00	190.784.362.029,00
	1) Tanah;	3.000.000.000,00	3.798.889.291,00
	2) Peralatan Dan Mesin;	31.805.421.932,00	35.369.435.891,00
	3) Bangunan Dan Gedung;	148.120.209.255,00	74.043.179.369,00
	4) Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;	213.382.561.775,00	67.572.821.478,00
	b) Belanja Pemeliharaan	279.252.508.592,00	274.795.109.033,00
	1) Belanja Hibah	97.315.713.000,00	93.399.088.641,00
	2) Belanja Bantuan Sosial	2.327.750.192,00	2.121.850.992,00
	3) Belanja Bantuan Keuangan	179.609.045.400,00	179.274.169.400,00
6	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	675.560.701.554,00	455.579.435.062,00
	Presentase Belanja Infrastruktur Daerah	32%	18%

d. *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah Inspektorat Kabupaten Manggrai memiliki kegiatan berupa Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel 13 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD-P
TA 2022 Kabupaten Manggarai**

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.181.351.394,00	2.853.711.969,00
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.820.500,00	6.760.500,00
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.887.058.694,00	2.534.708.369,00
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.300.000,00	55.520.000,00
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.811.400,00	175.732.300,00
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.270.800,00	10.120.800,00
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.500.000,00	14.260.000,00
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.590.000,00	56.610.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	663.048.000,00	644.173.000,00
	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	531.354.500,00	435.689.500,00
	b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	131.693.500,00	208.483.500,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	11.737.000,00	9.410.000,00
	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	11.737.000,00	9.410.000,00
4.	Total Alokasi Pengawasan	5.380.648.159,00	5.800.814.051,00
5.	Total Belanja Daerah	1.628.491.535.318,00	1.581.873.367.077,00
6.	Persentase Alokasi Pengawasan	0,33%	0,37%



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Manggarai serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Manggarai mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Manggarai berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai menyediakan informasi mengenai Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih (SAL), Pendapatan-LO, Beban dan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Manggarai;

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan ini adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Manggarai atas kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran mulai Januari s.d. Desember. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi merupakan penyelenggaraan system akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi; akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap barang milik daerah dan akuntansi selain kas. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan Menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Keuangan.

Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan) yang ditujukan kepada entitas pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari :Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Penyusunan Laporan Arus Kas TA 2022 atas Belanja Daerah berdasarkan SP2D.

Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenManggarai disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerahdan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah KabupatenManggarai mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- 1) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 2) Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- 4) Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- 5) Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelolapemerintah untukmencapai kinerja yang direncanakan.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam Neraca, Pengakuan Pendapatan-LO dan Beban Dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan demikian
- b. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
- c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

- d. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- 3) Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- 4) Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.
- 5) Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan, Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 3) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB IV
PENJELASAN POS-POS KEUANGAN

A. Laporan Realisasi Anggaran / LRA

Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Perangkat Daerah/PPKD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran Perangkat Daerah/PPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.
- 4) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 5) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

Komponen-komponen Laporan Realisasasi Anggaran antara lain:

1. Pendapatan	2022	2021
	Rp1.090.365.130.064,65	Rp1.142.553.988.621,43

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.090.365.130.064,65 atau 94,93%, dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp1.148.633.546.856,00, Rincian Realisasi Pendapatan perkomponen sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Pendapatan

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	121.176.876.649,00	110.722.937.745,65	91,37	97.878.120.398,43
2.	Pendapatan Transfer	941.000.860.207,00	919.332.114.485,00	97,70	986.712.538.223,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	86.455.810.000,00	60.310.077.834,00	69,76	57.963.330.000,00
JUMLAH		1.148.633.546.856,00	1.090.365.130.064,65	94,93	1.142.553.988.621,43

Jumlah sebesar Rp1.090.365.130.064,65 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Pendapatan yang diterima melalui BUD dengan realisasi sebesar Rp837.601.418.486,34 atau 95,07% yang dianggarkan sebesar Rp881.039.691.757,00.
- Pendapatan Hibah Untuk Dana BOS dengan realisasi sebesar Rp51.013.077.834,00 atau 66,72% yang dianggarkan sebesar Rp76.455.810.000,00.
- Pendapatan JKN untuk 21 (dua puluh satu) Puskesmas dengan realisasi sebesar Rp10.596.304.870,00 atau 86,81% yang dianggarkan sebesar Rp12.206.231.107,00
- Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp67.968.747.874,31 atau 121,93% yang dianggarkan sebesar Rp55.746.232.992,00
- Pendapatan Desa yang diterima melalui KPPN sebesar Rp123.185.581.000,00 atau 100,00% yang dianggarkan sebesar Rp Rp123.185.581.000,00.

1) **Pendapatan Asli Daerah – LRA**

2022	2021
Rp110.722.937.745,65	Rp97.878.120.398,43

Jumlah sebesar Rp110.722.937.745,65 atau 94,93%, merupakan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp121.176.876.649,00 sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp97.878.120.398,43.

Rincian realisasi pendapatan asli daerah per komponen sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	23.859.795.327,00	17.591.100.545,64	73,73	14.249.331.177,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	14.616.143.756,00	6.636.049.044,00	45,40	6.008.336.669,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.580.221.250,00	3.371.631.127,65	51,24	6.344.367.457,00
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	76.120.716.316,00	83.124.157.028,36	109,20	71.276.085.095,43
JUMLAH		121.176.876.649,00	110.722.937.745,65	91,37	97.878.120.398,43

a) **Pendapatan Pajak Daerah – LRA**

2022	2021
Rp17.591.100.545,64	Rp14.249.331.177,00

Jumlah sebesar Rp17.591.100.545,64 atau 73,73%, merupakan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp23.859.795.327,00 sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp17.591.100.545,64. Semua Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan pada Badan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Pendapatan Pajak Daerah

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Pajak Hotel	572.902.000,00	486.462.611,00	84,91	257.047.513,00
2.	Pajak Restoran	2.700.081.317,00	2.468.403.606,00	91,42	1.721.265.475,00
3.	Pajak Hiburan	50.142.763,00	1.530.000,00	3,05	21.870.000,00
4.	Pajak Reklame	168.642.335,00	165.316.500,00	98,03	91.942.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.	Pajak Penerangan Jalan	4.688.000.000,00	5.306.738.449,00	113,20	4.708.798.829,00
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	10.000.000.000,00	3.826.485.102,00	38,26	3.525.877.164,00
7.	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	105.518.265,00	105,52	88.971.800,00
8.	PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.617.870.962,00	4.000.985.501,64	86,64	2.864.272.734,00
9.	Pajak Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	962.155.950,00	1.229.660.511,00	127,80	969.285.662,00
JUMLAH		23.859.795.327,00	17.591.100.545,64	73,73	14.249.331.177,00

b) Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2022	2021
	<u>Rp6.636.049.044,00</u>	<u>Rp6.008.336.669,00</u>

Jumlah sebesar Rp6.636.049.044,00 atau 45,40% merupakan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp14.616.143.756,00 sedangkan Realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp6.008.336.669,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Pendapatan Retribusi Daerah

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	DINAS KESEHATAN				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	886.055.000,00	630.004.200,00	71,10	281.310.000,00
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	365.649.064,00
2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	302.393.000,00	18.603.894,00	6,15	19.548.207,00
3.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	2.062.000,00	300.000,00	14,55	450.000,00
4.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	303.370.000,00	434.514.000,00	143,23	328.973.000,00
5.	DINAS PERHUBUNGAN				
1	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	375.593.300,00	222.999.000,00	59,37	162.692.400,00
2	retribusi pengujian kendaraan bermotor	535.913.800,00	-	-	-
3	retribusi terminal	424.128.656,00	93.011.000,00	21,93	113.401.000,00
4	retribusi pelayanan ke pelabuhan	14.150.475,00	9.026.545,00	63,79	8.698.145,00
5	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	93.613.769,00	4.310.000,00	4,60	1.535.000,00
6.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	470.000.000,00	279.776.600,00	59,53	217.395.788,00
7.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	25.675.000,00
8.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Retribusi Tempat Pelelangan	23.511.950,00	25.680.000,00	109,22	24.600.000,00
2	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga	321.200.000,00	113.279.000,00	35,27	30.000.000,00
3	Retribusi Produksi Usaha Daerah	2.070.850.000,00	564.700.000,00	27,27	150.350.000,00
9.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
1	Retribusi Produksi Usaha Daerah	606.228.000,00	135.500.000,00	22,35	411.228.730,00
10.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	52.675.000,00
2	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.465.000,00	5.236.000,00	20,56	0,00
11.	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
1	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	1.345.209.375,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.861.060.298,00	790.817.380,00	16,27	388.190.500,00
3	Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan	3.145.648.508,00	2.647.456.625,00	84,16	1.083.581.960,00
12.	DINAS PETERNAKAN				
1	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	498.304.800,00	0,00	516.703.500,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Rumah Potong Hewan	154.900.000,00	162.530.000,00	104,93	162.145.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Untuk Tujuan Komersial	0,00	0,00	0,00	318.325.000,00
JUMLAH		14.616.143.756,00	6.636.049.044,00	45,40	6.008.336.669,00

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	2022	2021
	Rp3.371.631.127,65	Rp6.344.367.457,00

Jumlah sebesar Rp3.371.631.127,65 atau 51,24%, merupakan Realisasi Pendapatan Hasil engelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp6.580.221.250,00 sedangkan Realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp6.344.367.457,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
1.	PT. MMI	0,00	163.020.502,65	0,00	117.653.600,00
2.	DEVIDEN PT. BANK NTT	0,00	3.208.610.625,00	0,00	5.726.713.857,00
3.	PDAM	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
JUMLAH		6.580.221.250,00	3.371.631.127,65	51,24	6.344.367.457,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

d) Lain-Lain PAD yang Sah - LRA

	2022	2021
	Rp83.124.157.028,36	Rp71.276.085.095,43
Jumlah sebesar		
Rp83.124.157.028,36 atau 109,20% merupakan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp76.120.716.316,00, sedangkan realisasi TA.2021 sebesar Rp71.276.085.095,43, dengan rincian sebagai berikut:		

Tabel 19 Lain-Lain PAD Yang Sah

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Pendapatan Jasa BLUD	55.746.232.992,00	67.968.747.874,31	121,93	52.157.019.849,09
2.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	551.550.000,00	1.650.000,00	0,30	-
3.	Jasa Giro Kas Daerah	1.951.949.217,00	1.404.200.337,08	71,94	1.285.193.938,66
4.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	10.319.434,08	0,00	0,00
5.	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Telekomunikasi Menara	50.500.000,00	19.105.000,00	37,83	0,00
6.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.206.231.107,00	10.596.304.870,00	86,81	10.002.420.875,00
7.	Bunga Deposito	1.984.000.000,00	376.090.663,66	18,96	975.876.908,44
8.	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TPTGR)	1.874.753.000,00	1.906.769.091,83	101,71	1.553.685.316,38
9.	Pendapatan Dari Pengembalian Perjalanan Dinas	1.002.500.000,00	816.860.422,40	81,48	2.804.251.351,00
10.	Keterlambatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	753.000.000,00	24.109.335,00	3,20	289.276.556,86
11.	Pendapatan Denda Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	271.475.000,00
12.	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	3.410.000,00
13.	Penerimaan Dana Non Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	1.933.475.300,00
JUMLAH		76.120.716.316,00	83.124.157.028,36	109,20	71.276.085.095,43

	2022	2021
2) Pendapatan Transfer Pemerintah – LRA	Rp919.332.114.485,00	Rp986.712.538.223,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2022 dan TA. 2021 yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat - lainnya, dan transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Pendapatan Transfer

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	777.627.295.993,00	767.706.164.638,00	98,72	794.750.719.052,00
	1. Bagi Hasil Pajak	10.618.698.445,00	11.023.832.886,00	103,82	13.288.255.536,00
	2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.911.181.040,00	3.255.003.100,00	111,81	3.371.184.256,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN		ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
			(Rp)	(Rp)		(Rp)
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)		549.185.477.000,00	548.841.188.585,00	99,94	552.025.297.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)		214.911.939.508,00	204.586.140.067,00	95,20	226.065.982.260,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		123.185.581.000,00	123.185.581.000,00	100,00	162.702.419.000,00
1.	Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	15.136.480.000,00
2.	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dana Desa		123.185.581.000,00	123.185.581.000,00	100,00	147.565.939.000,00
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		40.187.983.214,00	28.440.368.847,00	70,77	29.259.400.171,00
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		40.187.983.214,00	28.440.368.847,00	70,77	22.259.400.171,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi		0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
JUMLAH			941.000.860.207,00	919.332.114.485,00	97,70	986.712.538.223,00

Untuk Pendapatan Dana BOS Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu pada komponen Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pada Pendapatan Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Komponen Pendapatan Hibah.

a) Transfer Pemerintah Pusat-LRA	2022	2021
	<u>Rp919.332.114.485,00</u>	<u>Rp794.750.719.052,00</u>

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat TA 2022 dan TA. 2021 yang terdiri dari:

(1) Dana Bagi Hasil Pajak-LRA	2022	2021
	<u>Rp11.023.832.886,00</u>	<u>Rp13.288.255.536,00</u>

Jumlah sebesar Rp11.023.832.886,00 atau 103,82%, merupakan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp10.618.698.445,00, sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp13.288.255.536,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Dana Bagi Hasil Pajak

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan	6.454.585.734,00	7.157.027.169,00	110,88	0,00
2.	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.035.245.304,00	3.026.935.000,00	99,73	3.857.673.179,00
3.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29	567.720.426,00	479.782.491,00	84,51	349.238.821,00
4.	Bagi Hasil Cukai Tembakau (CHT)	561.146.981,00	360.088.226,00	64,17	186.543.568,00
5.	Bagi Hasil Pajak PBB Sektor Pertambangan	0,00	0,00	0,00	8.894.799.968,00
JUMLAH		10.618.698.445,00	11.023.832.886,00	103,82	13.288.255.536,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA	2022	2021
	Rp3.255.003.100,00	Rp3.371.184.256,00

Jumlah sebesar Rp3.255.003.100,00 atau 111,81%, merupakan realisasi penerimaan dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp2.911.181.040,00 sedangkan Realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp3.371.184.256,00.

Tabel 22 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Panas Bumi	1.057.193.745,00	1.105.594.769,00	104,58	1.567.877.858,00
2.	Bagi Hasil Darai Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara	69.149.219,00	191.041.331,00	276,27	124.398.623,00
3.	Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	109,72	1.674.500.150,00
4.	Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	56.000,00	0,00	4.407.625,00
JUMLAH		2.911.181.040,00	3.255.003.100,00	111,81	3.371.184.256,00

(3) Dana Alokasi Umum-LRA	2022	2021
	Rp548.841.188.585,00	Rp552.025.297.000,00

Jumlah sebesar Rp548.841.188.585,00 atau 99,94% merupakan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp549.185.477.000,00, sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp552.025.297.000,00.

(4) Dana Alokasi Khusus-LRA	2022	2021
	Rp204.586.140.067,00	Rp226.065.982.260,00

Jumlah sebesar Rp204.586.140.067,00 atau 95,020% merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp214.911.939.508,00, sedangkan Realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp226.065.982.260,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23 Dana Alokasi Khusus

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
A.	DAK FISIK					
	1.	DAK Reguler	23.963.480.730,00	54.667.591.392,00	228,13	79.352.747.545,00
	2.	DAK Penugasan	87.841.465.289,00	57.823.465.856,00	65,83	43.984.125.917,00
	3.	DAK Afirmasi	7.037.316.569,00	6.161.332.069,00	87,55	1.564.582.000,00
JUMLAH DAK FISIK		118.842.262.588,00	118.652.389.317,00	99,84	124.901.455.462,00	
B.	DAK NON FISIK					
	1.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	58.165.379.000,00	56.781.042.830,00	97,62	60.343.396.000,00
	2.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.735.000.000,00	2.161.349.500,00	57,87	825.000.000,00
	3.	Tunjangan Khusus Guru PNSD	6.051.177.000,00	4.778.533.900,00	78,97	3.796.347.210,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
4.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	5.923.650.000,00	279.490.000,00	4,72	4.032.300.000,00
5.	Bantuan Operasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	906.910.000,00	54.000.000,00	5,95	1.525.450.000,00
6.	Bantuan Operasional Khusus Keluarga Berencana - BOK	12.731.810.220,00	14.282.912.820,00	112,18	3.204.325.500,00
7.	BOKKB - Pengawasan Obat Dan Makanan	459.094.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	BOKKB - Jaminan Persalinan	500.235.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	BOKKB - Bantuan Operasional KB	4.218.254.000,00	4.218.254.000,00	100,00	23.177.351.705,00
10.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan UKM	2.116.819.100,00	1.067.359.600,00	50,42	377.883.450,00
11.	Dana Pelayanan Kepariwisata	936.148.600,00	936.148.600,00	100,00	856.746.000,00
12.	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	325.200.000,00	325.200.000,00	100,00	683.000.000,00
13.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.950.503.933,00
14.	Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	345.238.500,00	0,00	392.223.000,00
15.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM		704.221.000,00	0,00	0,00
JUMLAH DAK NON FISIK		96.069.676.920,00	85.933.750.750,00	89,45	101.164.526.798,00
TOTAL DAK		214.911.939.508,00	204.586.140.067,00	95,20	226.065.982.260,00

b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	2022	2021
	Rp123.185.581.000,00	Rp162.702.419.000,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 dan TA. 2021 yang terdiri dari:

1) Dana Insentif Daerah-LRA	2022	2021
	Rp0,00	Rp15.136.480.000

Jumlah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dikarenakan pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak menerima Dana Insentif Daerah (DID) seperti pada TA. 2021 dengan Realisasinya sebesar Rp15.136.480.000.

2) Dana Desa-LRA	2022	2021
	Rp123.185.581.000,00	Rp147.565.939.000,00

Jumlah sebesar Rp123.185.581.000,00 atau 100% merupakan realisasi penerimaan Dana Desa TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp123.185.581.000,00, sedangkan Realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp147.565.939.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA

	2022	2021
	Rp28.440.368.847,00	Rp29.259.400.171,00

Jumlah tersebut merupakan

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2022 dan TA. 2021 yang terdiri dari:

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LRA

	2022	2021
	Rp28.440.368.847,00	Rp22.259.400.171,00

Jumlah sebesar Rp28.440.368.847,00 atau 70,77% merupakan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp40.187.983.214,00 sedangkan Realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp22.259.400.171,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24 Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.097.118.596,00	3.778.452.819,00	41,53	2.658.705.799,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.187.580.793,00	1.322.523.228,00	31,58	1.232.142.951,00
3.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.865.511.201,00	6.757.369.823,00	52,52	3.331.919.930,00
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	142.311.041,00	84.524.278,00	59,39	5.612.476,00
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	13.895.461.583,00	16.497.498.699,00	118,73	15.031.019.015,00
JUMLAH		40.187.983.214,00	28.440.368.847,00	70,77	22.259.400.171,00

(2) Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi-LRA

	2022	2021
	Rp0,00	Rp7.000.000.000,00

Jumlah sebesar Rp0,00 atau 0,00% merupakan realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp0,00 sedangkan Realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp7.000.000.000,00.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

	2022	2021
	Rp60.310.077.834,00	Rp57.963.330.000,00

Tabel 25 Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Hibah Untuk Air Minum	10.000.000.000,00	9.297.000.000,00	92,97	5.241.000.000,00
2.	Hibah Untuk Dana BOS	76.455.810.000,00	51.013.077.834,00	66,72	52.722.330.000,00
JUMLAH		86.455.810.000,00	60.310.077.834,00	69,76	57.963.330.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

a) Pendapatan Hibah-LRA	2022	2021
	Rp9.297.000.000,00	Rp5.241.000.000,00

Jumlah sebesar Rp9.297.000.000,00 merupakan hibah untuk air minum dengan realisasi sebesar 9.297.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 pada Tahun 2022.

b) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA	2022	2021
	Rp51.013.077.834,00	Rp52.722.330.000,00

Jumlah sebesar Rp51.013.077.834,00 merupakan Hibah Untuk Dana BOS dengan realisasi sebesar Rp51.013.077.834,00 dari anggaran sebesar Rp76.455.810.000,00 pada Tahun 2022.

2. Belanja	2022	2021
	Rp1.105.257.718.284,94	Rp1.127.162.534.561,92

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.105.257.718.284,94 atau 91,84%, dari Anggaran yang ditetapkan perubahan APBD sebesar Rp1.203.443.264.459,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Realisasi Belanja Per Komponen

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Operasi	832.537.175.122,00	747.599.452.368,96	89,80	721.098.288.730,92
2.	Belanja Modal	180.784.326.029,00	169.206.541.293,98	93,60	174.222.039.501,00
3.	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	5.329.997.314,00	76,14	24.271.887.055,00
4.	Belanja Transfer	183.121.763.308,00	183.121.727.308,00	100,00	207.570.319.275,00
JUMLAH		1.203.443.264.459,00	1.105.257.718.284,94	91,84	1.127.162.534.561,92

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp747.599.452.368,96 atau 89,80%, dari Anggaran yang ditetapkan Perubahan APBD sebesar Rp832.537.175.122,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Realisasi Belanja Operasi Per Komponen

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Pegawai	443.203.536.777,00	416.863.482.286,24	94,06	406.236.865.405,92
2.	Belanja Barang dan Jasa	291.767.608.712,00	267.835.774.738,00	91,80	237.908.984.373,00
3.	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	727.530.923,72	72,75	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
4.	Belanja Subsidi	1.045.090.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Hibah	93.399.088.641,00	60.060.498.551,00	64,31	64.021.641.772,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	2.121.850.992,00	2.112.165.870,00	99,54	12.930.797.180,00
JUMLAH		832.537.175.122,00	747.599.452.368,96	89,80	721.098.288.730,92

a) Belanja Pegawai

2022

2021

Rp416.863.482.286,24

Rp406.236.865.405,92

Jumlah sebesar Rp416.863.482.286,24 atau 94,06% merupakan realisasi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) pada Belanja Operasi TA 2022 dari Anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp443.203.536.777,00, sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp406.236.865.405,92

Tabel 28 Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	303.873.591.119,00	291.145.257.217,00
A.	Belanja Gaji Pokok ASN	226.992.386.559,00	220.219.764.260,00
B.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.927.042.925,00	21.075.938.896,00
C.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.491.145.313,00	5.210.359.000,00
D.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.013.881.499,00	17.378.958.000,00
E.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.085.639.603,00	3.002.233.436,00
F.	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.319.728.273,00	13.304.455.740,00
G.	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN	764.438.488,00	15.958.693,00
H.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.667.215,00	3.140.306,00
I.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.960.039.598,00	9.138.030.169,00
J.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	839.051.239,00	450.080.504,00
K.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.462.570.407,00	1.346.338.213,00
L.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.000.000,00	0,00
2.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN PPPK	25.234.106.224,00	20.597.864.583,24
A.	Belanja Gaji Pokok PPPK	17.522.796.291,00	16.290.934.300,00
B.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.127.679.634,00	1.476.547.144,24
C.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.534.076.625,00	798.920.000,00
D.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.409.903.698,00	1.158.140.640,00
E.	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PPPK	20.596.590,00	0,00
F.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50.950.297,00	254.606,00
G.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.427.747.369,00	753.700.676,00
H.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	160.092.428,00	29.842.543,00
I.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	980.263.292,00	89.524.674,00
3.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	19.764.330.000,00	18.582.798.501,00
A.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	15.838.030.000,00	14.737.928.501,00
B.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.246.300.000,00	2.204.870.000,00
C.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.680.000.000,00	1.640.000.000,00
4.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PPPK	4.200.000,00	4.200.000,00
A.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.200.000,00	4.200.000,00
5.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN	76.090.135.055,00	69.366.935.602,00
A.	Belanja Insentif Bagi Asn Atas Pemungutan Pajak Daerah	840.162.814,00	512.074.392,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN		ANGGARAN	REALISASI
	B.	Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	626.714.621,00	362.289.775,00
	C.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (Tpg) PNSD	60.163.774.670,00	58.197.569.500,00
	D.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (Tkg) PNSD	6.205.990.000,00	4.972.355.200,00
	E.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.744.400.500,00	1.784.500.000,00
	F.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	1.313.387.450,00	822.581.735,00
	G.	Belanja Honorarium	3.080.505.000,00	2.600.365.000,00
	H.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	115.200.000,00	115.200.000,00
6.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN DPRD		17.414.128.297,00	16.372.540.627,00
	A.	Belanja Uang Representasi DPRD	802.760.000,00	782.040.000,00
	B.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	106.501.000,00	75.340.800,00
	C.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.040.000,00	92.987.280,00
	D.	Belanja Uang Paket DPRD	80.411.100,00	67.032.000,00
	E.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.162.307.062,00	1.133.958.000,00
	F.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.815.447,00	101.094.000,00
	G.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	585.598.000,00	15.842.075,00
	H.	Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00
	I.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00
	J.	Belanja Pembebanan Pph Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD	23.675.697,00	423.775,00
	K.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.751.413,00	63.961,00
	L.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD	4.936.558.578,00	4.676.258.736,00
	M.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.120.000.000,00	6.120.000.000,00
	N.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	45.210.000,00	0,00
7.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH		196.655.817,00	172.045.756,00
	A.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.100.000,00	54.600.000,00
	B.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.540.000,00	7.140.000,00
	C.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.700.000,00	98.280.000,00
	D.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.112.431,00	6.083.280,00
	E.	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.275.026,00	4.876,00
	F.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00	1.920,00
	G.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH	6.414.800,00	5.486.400,00
	H.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	3.904.908,00	112.320,00
	I.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	11.606.412,00	336.960,00
8.	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH		560.290.265,00	560.290.000,00
	A.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00
	B.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	449.410.265,00	449.410.000,00
9.	BELANJA PEGAWAI BLUD		66.100.000,00	61.550.000,00
	A.	Belanja Pegawai BLUD	66.100.000,00	61.550.000,00
TOTAL			443.203.536.777,00	416.863.482.286,24

Tabel 29 Realisasi Belanja Pegawai Per OPD

NO.	URAIAN	REALISASI
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	217.211.900.369,24
2.	Dinas Kesehatan	53.305.668.670,00
3.	BLUD RSUD Dr. Ben Mboy	27.287.143.280,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.247.832.351,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.021.401.832,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.496.186.211,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.680.333.507,00
8.	Dinas Sosial	2.248.672.540,00
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	1.460.680.472,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.179.095.847,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	REALISASI
11.	Dinas Lingkungan Hidup	3.087.277.150,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.914.040.140,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.918.524.166,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.700.713.033,00
15.	Dinas Perhubungan	2.824.866.288,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.904.834.708,00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.082.080.558,00
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.466.003.154,00
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.313.114.853,00
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.444.953.769,00
21.	Dinas Peternakan	2.748.519.692,00
22.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.295.651.795,00
23.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.713.623.803,00
24.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.400.000,00
25.	Bagian Organisasi	15.600.000,00
26.	Bagian Pemerintahan	8.400.000,00
27.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13.700.000,00
28.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	15.600.000,00
29.	Bagian Administrasi Pembangunan	13.350.000,00
30.	Bagian Umum	8.234.357.733,00
31.	Bagian Hukum	12.600.000,00
32.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	245.975.000,00
33.	Bagian Kerja Sama	9.100.000,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.838.268.631,00
35.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.343.439.109,00
36.	Badan Pendapatan Daerah	2.822.708.141,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.341.302.899,00
38.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	1.544.587.809,00
39.	Inspektorat Daerah	2.495.956.707,00
40.	Sekretariat DPRD	18.412.988.855,00
41.	Kecamatan Langke Rembong	7.521.840.564,00
42.	Kecamatan Ruteng	1.494.078.903,00
43.	Kecamatan Rahong Utara	863.652.628,00
44.	Kecamatan Lelak	880.502.596,00
45.	Kecamatan Satar Mese	1.708.173.212,00
46.	Kecamatan Satar Mese Barat	1.027.306.112,00
47.	Kecamatan Satar Mese Utara	1.175.362.957,00
48.	Kecamatan Reok	2.404.719.267,00
49.	Kecamatan Reok Barat	1.096.096.280,00
50.	Kecamatan Cibal	1.923.691.738,00
51.	Kecamatan Cibal Barat	1.147.942.223,00
52.	Kecamatan Wae Rii	1.687.662.734,00
TOTAL		416.863.482.286,24

	2022	2021
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp267.835.774.738,00	Rp237.908.984.373,00

Jumlah sebesar Rp267.835.774.738,00 atau 91,80% merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dari anggaran sebesar Rp291.767.608.712,00, sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp237.908.984.373,00.

Tabel 30 Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Belanja Barang	56.585.283.646,00	51.362.793.394,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	A. Belanja Barang Pakai Habis	56.579.183.646,00	51.356.693.394,00
	B. Belanja Barang Tak Habis Pakai	6.100.000,00	6.100.000,00
2.	Belanja Jasa	96.545.009.334,00	88.264.884.980,00
	A. Belanja Jasa Kantor	79.681.029.939,00	71.936.572.147,00
	B. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.424.932.013,00	11.176.872.951,00
	C. Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00
	D. Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	510.399.382,00	452.127.382,00
	E. Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	619.000.000,00	562.828.000,00
	F. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	77.500.000,00	56.500.000,00
	G. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	1.000.000.000,00	986.656.000,00
	H. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	130.000.000,00	130.000.000,00
	I. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	30.000.000,00	7.681.000,00
	J. Belanja Beasiswa Pendidikan Pns	420.000.000,00	380.000.000,00
	K. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	2.652.148.000,00	2.575.647.500,00
3.	Belanja Pemeliharaan	1.946.684.168,00	1.751.629.613,00
	A. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	804.101.984,00	640.774.588,00
	B. Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1.142.582.184,00	1.110.855.025,00
	C. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	0,00	0,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	63.551.113.253,00	54.300.796.099,00
	A. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.551.113.253,00	54.300.796.099,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.868.913.394,00	2.115.504.610,00
	A. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	200.200.464,00	199.500.000,00
	B. Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.668.712.930,00	1.916.004.610,00
6.	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	70.270.604.917,00	70.040.166.042,00
	A. Belanja Barang Dan Jasa Blud	70.270.604.917,00	70.040.166.042,00
	T O T A L	291.767.608.712,00	267.835.774.738,00

Tabel 31 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per Perangkat Daerah TA 2022

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	REALISASI
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	22.157.232.640,00
2.	Dinas Kesehatan	53.787.368.849,00
3.	BLUD RSUD Dr. Ben Mboy	71.980.347.220,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.939.218.033,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.842.935.450,00
6.	Dinas Sosial	426.019.494,00
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.969.012.378,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup	3.931.452.272,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.686.427.672,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.579.837.856,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.734.605.462,00
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	414.322.988,00
13.	Dinas Perhubungan	2.131.210.409,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.819.801.240,00
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	801.996.531,00
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	707.840.365,00
17.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.604.156.576,00
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.526.866.353,00
19.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.325.230.222,00
20.	Dinas Peternakan	3.150.670.269,00
21.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.067.347.106,00
22.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.682.635.929,00
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	679.835.725,00
24.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.253.522.005,00
25.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.567.392.987,00
26.	Badan Pendapatan Daerah	2.146.331.059,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	REALISASI
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.232.505.521,00
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	1.401.927.300,00
29.	Inspektorat Daerah	978.032.691,00
30.	Sekretariat DPRD	13.333.743.035,00
31.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.074.191.109,00
32.	Bagian Organisasi	515.678.939,00
33.	Bagian Pemerintahan	540.112.445,00
34.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	554.051.167,00
35.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	299.252.270,00
36.	Bagian Administrasi Pembangunan	406.696.632,00
37.	Bagian Umum	8.388.815.574,00
38.	Bagian Hukum	1.087.567.806,00
39.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	759.634.000,00
40.	Bagian Kerja Sama	205.204.500,00
41.	Kecamatan Langke Rembong	2.967.454.916,00
42.	Kecamatan Ruteng	400.995.900,00
43.	Kecamatan Rahong Utara	194.177.350,00
44.	Kecamatan Lelak	191.308.300,00
45.	Kecamatan Satar Mese	171.008.000,00
46.	Kecamatan Satar Mese Barat	172.232.340,00
47.	Kecamatan Satar Mese Utara	257.302.000,00
48.	Kecamatan Reok	796.834.273,00
49.	Kecamatan Reok Barat	239.810.740,00
50.	Kecamatan Cibal	333.551.015,00
51.	Kecamatan Cibal Barat	219.131.000,00
52.	Kecamatan Wae Rii	200.938.825,00
T O T A L		267.835.774.738,00

c) Belanja Bunga	2022	2021
	<u>Rp727.530.923,72</u>	<u>Rp0,00</u>

Jumlah sebesar Rp727.530.923,72 atau 72,75% merupakan realisasi Belanja Bunga Tahun anggaran 2022 atas utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 sedangkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00.

d) Belanja Subsidi	2022	2021
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Jumlah Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dari Anggaran Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.045.090.000,00.

e) Belanja Hibah	2022	2021
	<u>Rp60.060.498.551,00</u>	<u>Rp64.021.641.772,00</u>

Jumlah sebesar Rp60.060.498.551,00 atau 64,31% merupakan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dari Anggaran sebesar Rp93.399.088.641,00 sedangkan Realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp64.021.641.772,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Untuk Tahun Anggaran 2022 Belanja Bantuan Partai Politik dianggarkan pada Komponen Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.404.630.00 dengan Realisasi sebesar Rp564.279.320,00, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Belanja Hibah

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (<i>Lampiran 1</i>)	7.037.763.754,00	6.893.704.259,00	97,95	3.486.783.264,00
2.	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (<i>Lampiran 2</i>)	7.404.902.627,00	558.490.000,00	7,54	5.626.800.000,00
3.	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (<i>Lampiran 3</i>)	595.000.000,00	595.000.000,00	100,00	1.102.830.987,00
4.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri (<i>Lampiran 4, 4b</i>)	76.956.792.260,00	51.449.024.972,00	66,85	53.240.948.201,00
5.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (<i>Lampiran 5</i>)	1.404.630.000,00	564.279.320,00	40,17	564.279.320,00
TOTAL		93.399.088.641,00	60.060.498.551,00	64,31	64.021.641.772,00

f) Belanja Bantuan Sosial	2022	2021
	Rp2.112.165.870,00	Rp12.930.797.180,00

Jumlah sebesar Rp2.112.165.870,00 atau 99,54% merupakan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA 2022 (*Lampiran 6*) dari Anggaran sebesar Rp2.121.850.992,00 sedangkan Realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp12.930.797.180,00

2) Belanja Modal	2022	2021
	Rp169.206.541.293,98	Rp174.222.039.501,00

Realisasi TA 2022 adalah Rp169.206.541.293,98 dan Realisasi TA. 2021 adalah Rp174.222.039.501,00 atau 93,60% dari Anggaran Rp180.784.326.029,00 yang merupakan akumulasi dari Realisasi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Belanja Modal

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
		(Rp)			
1.	Tanah	3.798.889.291,00	1.962.083.000,00	51,65	5.947.920,00
2.	Peralatan dan Mesin	35.259.435.891,00	33.377.856.959,98	94,66	15.696.481.723,00
3.	Gedung dan Bangunan	74.043.179.369,00	71.649.025.218,00	96,77	53.847.392.337,00
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	67.682.821.478,00	62.217.576.116,00	91,93	104.672.217.521,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		180.784.326.029,00	169.206.541.293,98	93,60	174.222.039.501,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Belanja Modal per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 34 Realisasi Belanja Modal Per Perangkat Daerah TA 2022

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	(Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.515.847.873,00
2.	Dinas Kesehatan	70.808.006.926,00
3.	BLUD RSUD Dr. Ben Mboy	8.226.100.736,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.601.174.916,00
5.	Dinas Sosial	53.130.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup	2.687.078.800,00
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	359.780.008,00
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.250.000,00
9.	Dinas Perhubungan	1.544.610.526,98
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	325.041.748,00
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.297.000,00
12.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	481.278.407,00
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	191.908.097,00
14.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.880.000,00
15.	Dinas Peternakan	56.613.574,00
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.806.922.187,00
17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	90.009.900,00
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	111.450.520,00
19.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	97.768.000,00
20.	Bagian Protokol	24.603.000,00
21.	Bagian Umum	3.032.222.900,00
22.	Bagian Barang Jasa	16.150.000,00
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.000.000,00
24.	Badan Pendapatan Daerah	58.159.570,00
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.520.000,00
26.	Inspektorat Daerah	8.810.800,00
27.	Sekretariat DPRD	17.925.820,00
28.	Kecamatan Satar Mese Barat	14.999.985,00
TOTAL		169.206.541.293,98

	2022	2021
a) Belanja Modal Tanah	<u>Rp1.962.083.000,00</u>	<u>Rp5.947.920,00</u>

Jumlah sebesar Rp1.962.083.000,00 atau 51,65% merupakan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp3.798.889.291,00 sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp5.947.920,00,

	2022	2021
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>Rp33.377.856.959,98</u>	<u>Rp15.696.481.723,00</u>

Jumlah sebesar Rp33.377.856.959,98 atau 94,66% merupakan akumulasi dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dari anggaran sebesar Rp35.259.435.891,00 sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp15.696.481.723,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 35 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Modal Alat Besar Darat	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.529.890.000,00	1.529.080.000,00	99,95
3.	Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.048.558.465,00	1.048.558.465,00	100,00
4.	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	5.058.913.518,00	4.512.031.014,00	89,19
5.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	274.226.500,00	269.373.600,00	98,23
6.	Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan	24.387.696.083,00	23.855.516.296,00	97,82
7.	Belanja Modal Alat Laboratorium	205.088.000,00	196.431.000,00	95,78
8.	Belanja Modal Komputer	1.991.877.825,00	1.409.547.357,00	70,76
9.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian	390.693.000,00	187.200.000,00	47,91
10.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	93.352.500,00	92.679.900,00	99,28
11.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	104.140.000,00	102.560.000,00	98,48
12.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	130.000.000,00	129.879.327,98	99,91
JUMLAH		35.259.435.891,00	33.377.856.959,98	94,66

	2022	2021
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp71.649.025.218,00	Rp53.847.392.337,00

Jumlah sebesar Rp71.649.025.218,00 atau 96,77% merupakan akumulasi dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dari anggaran sebesar Rp74.043.179.369,00 sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp53.847.392.337,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 36 Rincian Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	74.003.179.369,00	71.609.113.218,00	96,76
	A. Bangunan Gedung Tempat Kerja	72.503.629.369,00	70.112.530.218,00	96,70
	B. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.499.550.000,00	1.496.583.000,00	99,80
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti (Tugu/Tanda Batas)	40.000.000,00	39.912.000,00	99,78
JUMLAH		74.043.179.369,00	71.649.025.218,00	96,77

	2022	2021
d) Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	Rp62.217.576.116,00	Rp104.672.217.521,00.

Jumlah sebesar Rp62.217.576.116,00 atau 91,93% merupakan akumulasi dari realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2022 dari anggaran sebesar Rp67.682.821.478,00 sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp104.672.217.521,00. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Belanja Modal, Jaringan Dan Irigasi

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
		(Rp)	(Rp)	
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	48.342.762.246,00	43.623.204.865,00	90,24
	A. Jalan	44.470.450.115,00	39.856.187.072,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN		ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
			(Rp)	(Rp)	
	B.	Jembatan	3.872.312.131,00	3.767.017.793,00	
2.	Belanja Modal Bangunan Air		11.234.421.383,00	10.618.966.549,00	94,52
	A.	Bangunan Air Irigasi	3.868.240.000,00	3.565.341.856,00	
	B.	Bangunan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	2.110.474.477,00	2.090.943.971,00	
	C.	Bangunan Air Kotor	5.255.706.906,00	4.962.680.722,00	
3.	Belanja Instalasi		7.485.637.849,00	7.387.174.047,00	98,68
	A.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	7.375.637.849,00	7.278.024.047,00	
	B.	Instalasi Gas	110.000.000,00	109.150.000,00	
4.	Belanja Modal Jaringan		620.000.000,00	588.230.655,00	94,88
	A.	Jaringan Air Minum	620.000.000,00	588.230.655,00	
	JUMLAH		67.682.821.478,00	62.217.576.116,00	91,93

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2022	2021
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak dianggarkan.

3) Belanja Tidak Terduga	2022	2021
	<u>Rp5.329.997.314,00</u>	<u>Rp24.271.887.055,00</u>

Jumlah sebesar Rp5.329.997.314,00 atau 76,14% merupakan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 dari anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00, sedangkan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 adalah sebesar Rp24.271.887.055,00.

4) Belanja Transfer	2022	2021
	<u>Rp183.121.727.308,00</u>	<u>Rp207.570.319.275,00</u>

Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Manggarai TA 2022 sebesar Rp183.121.727.308,00 atau 100,00%, dari anggaran yang ditetapkan perubahan APBD sebesar Rp183.121.763.308,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Transfer

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI	%	REALISASI
		(Rp)	2022 (Rp)		2021 (Rp)
1.	Transfer bagi Hasil Pendapatan	3.847.593.908,00	3.847.557.908,00	100,00	3.557.946.475,00
2.	Transfer Bantuan Keuangan	179.274.169.400,00	179.274.169.400,00	100,00	204.012.372.800,00
	JUMLAH	183.121.763.308,00	183.121.727.308,00	100,00	207.570.319.275,00

a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2022	2021
	<u>Rp3.847.557.908,00</u>	<u>Rp3.557.946.475,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp3.847.557.908,00 atau 100,00%, dari Anggaran yang ditetapkan perubahan APBD sebesar Rp3.847.593.908,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2022 (Rp)	2022 (Rp)		2021 (Rp)
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.847.593.908,00	3.847.557.908,00	100,00	3.557.946.475,00
2.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		3.847.593.908,00	3.847.557.908,00	100,00	3.557.946.475,00

	2022	2021
(1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp3.847.557.908,00	Rp3.557.946.475,00

Jumlah sebesar Rp3.847.557.908,00 atau 100,00% merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dari Anggaran sebesar Rp3.847.593.908,00, sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp3.557.946.475,00.

	2022	2021
(2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp0,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 untuk Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah tidak dianggarkan.

	2022	2021
b) Transfer Bantuan Keuangan	Rp179.274.169.400,00	Rp204.012.372.800,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 sebesar Rp179.274.169.400,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan Perubahan APBD sebesar Rp179.274.169.400,00, dengan uraian sebagai berikut:

	2022	2021
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp179.274.169.400,00	Rp204.012.372.800,00

Jumlah sebesar Rp179.274.169.400,00 merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 dari Anggaran sebesar Rp179.274.169.400,00, sedangkan Realisasi TA 2022 adalah sebesar Rp179.274.169.400,00 atau 100%. Sumber Dana Desa TA. 2021 Sebesar Rp204.012.372.800,00, terdiri dari:

Tabel 40 Sumber Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2022 (Rp)	2022 (Rp)		2021 (Rp)
1.	Bersumber dari Dana Perimbangan	179.274.169.400,00	179.274.169.400,00	100,00	56.446.433.800,00
2.	Bersumber dari APBN	0,00	0,00	0,00	147.565.939.000,00
TOTAL		179.274.169.400,00	179.274.169.400,00	100,00	204.012.372.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Untuk Belanja Partai Politik dianggarkan pada Belanja Operasi yaitu komponen Belanja Hibah.

3. Surplus/Defisit	2022	2021
	(Rp14.892.588.220,29)	Rp15.391.454.059,51

Jumlah sebesar (Rp14.892.588.220,29) merupakan selisih antara Total Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah sebesar Rp1.090.365.130.064,65 dengan Total Realisasi Belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp1.105.257.718.284,94 pada TA 2022 dan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp15.391.454.059,51.

4. Penerimaan Pembiayaan	2022	2021
	Rp74.809.717.603,09	Rp63.408.545.989,58

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari:

Tabel 41 Rincian Penerimaan Pembiayaan

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
		2022 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	68.559.000.049,00	68.559.000.049,09
2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	6.250.717.554,00	6.250.717.554,00
JUMLAH		74.809.717.603,00	74.809.717.603,09

1) Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya	2022	2021
	Rp68.559.000.049,09	Rp63.408.545.989,58

Jumlah sebesar Rp68.559.000.049,09 atau 100,00% merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2022 yang terdiri dari sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja sebesar Rp45.994.014.556,43, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp17.549.199.725,66, Sisa dana BOS sebesar Rp850.324.887,00, Sisa Dana Kapitasi Rp4.165460.880. Sedangkan realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp63.408.545.989,58.

2) Penerimaan Pinjaman Daerah	2022	2021
	Rp6.250.717.554,00	Rp0,00

Jumlah sebesar Rp6.250.717.554,00 atau 100,00% merupakan Realisasi Anggaran TA 2022, sedangkan Realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5. Pengeluaran Pembiayaan	2022	2021
	Rp19.297.000.000,00	Rp10.241.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pengeluaran Pembiayaan atas penyertaan modal. Penyertaan Modal pada TA. 2002 sebesar Rp19.297.000.000,00 atau Jumlah sebesar Rp6.250.717.554,00 atau 100,00% merupakan 96,49% merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai dari



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 sedangkan Realisasi Anggaran TA. 2021 adalah sebesar Rp10.241.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 42 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
1.	PDAM	0,00	9.297.000.000,00		5.241.000.000,00
2.	BANK NTT	0,00	10.000.000.000,00		5.000.000.000,00
3.	PT MANGGARAI MULTI INVESTASI	0,00	0,00		0,00
JUMLAH		20.000.000.000,00	19.297.000.000,00		10.241.000.000,00

**6. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran**

2022

2021

Rp40.620.129.382,80

Rp68.559.000.049,09

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 adalah sebesar Rp40.620.129.382,80 dan TA. 2021 adalah sebesar Rp68.559.000.049,09, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 43 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2021 (Rp)
		2022 (Rp)	2022 (Rp)		
1.	Surplus (Defisit)	(54.809.717.603,00)	(14.892.588.220,29)	-	15.391.454.059,51
2.	Penerimaan Pembiayaan	74.809.717.603,00	74.809.717.603,09	100,00	63.408.545.989,58
3.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	19.297.000.000,00	96,49	10.241.000.000,00
SILPA		-	40.620.129.382,80	-	68.559.000.049,09

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih / LPSAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pos-pos berikut :

**1. Saldo Anggaran Lebih
Awal**

2022

2021

Rp68.559.000.049,09

Rp63.183.975.854,58

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2022 sebesar Rp68.559.000.049,09 dan TA. 2021 sebesar Rp63.183.975.854,58

**2. Penggunaan Saldo
Anggaran Lebih / SAL
Sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun
Berjalan**

2022

2021

Rp68.559.000.049,09

Rp63.408.545.989,58



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah tersebut merupakan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih / SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp68.559.000.049,09 dan TA. 2021 sebesar Rp63.408.545.989,58

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2022	2021
	Rp40.620.129.382,80	Rp68.559.000.049,09

Jumlah tersebut merupakan Selisih Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2022 sebesar Rp40.620.129.382,80 dan TA. 2021 sebesar Rp68.559.000.049,09

Tabel 44 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2021 (Rp)
		2022 (Rp)	2022 (Rp)		
1.	Surplus (Defisit)	(54.809.717.603,00)	(14.892.588.220,29)	-	15.391.454.059,51
2.	Penerimaan Pembiayaan	74.809.717.603,00	74.809.717.603,09	100,00	63.408.545.989,58
3.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	19.297.000.000,00	96,49	10.241.000.000,00
SiLPA		-	40.620.129.382,80	-	68.559.000.049,09

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	2022	2021
	Rp0,00	Rp224.588.135,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 sebesar Rp0,00 dan TA. 2021 sebesar Rp224.588.135,00

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	2022	2021
	Rp40.620.129.382,80	Rp68.559.000.049,09

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 sebesar Rp40.620.129.382,80 dan TA. 2021 sebesar Rp68.559.000.049,09

C. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas, masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah. serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Komponen-komponen neraca antara lain:

1. Aset	2022	2021
	Rp2.296.765.944.510,39	Rp2.263.092.502.361,11

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.296.765.944.510,39 dan Rp2.263.092.502.361,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Aset

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2022	2021
1.	Aset Lancar	83.517.869.412,03	117.578.014.535,54
2.	Investasi Jangka Panjang	150.244.258.428,57	129.356.568.884,66
3.	Aset Tetap	2.049.123.136.543,76	2.010.297.172.507,93
4.	Dana Cadangan	0,00	0,00
5.	Aset Lainnya	13.880.680.126,03	5.860.746.432,98
JUMLAH		2.296.765.944.510,39	2.263.092.502.361,11

1) Aset Lancar	2022	2021
	Rp83.517.869.412,03	Rp117.578.014.535,54

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp83.517.869.412,03 dan Rp117.578.014.535,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Aset Lancar

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2022	2021
1	Kas di Kas Daerah	25.925.927.971,75	46.071.808.206,43
2	Kas di Bendahara Penerimaan	8.784.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	116.332.162,00	16.610.150,00
4	Kas di BLUD	12.960.776.557,97	17.549.199.725,66
5	Kas di Bos	384.904.092,00	850.324.887,00
6	Kas Dana FKTP	1.214.202.935,00	4.165.460.880,00
7	Kas Lainnya	150.319.296,08	0,00
8	Piutang Pendapatan	40.818.512.810,06	43.337.302.767,62
9	Penyisihan Piutang	(15.674.676.869,83)	(15.551.785.069,83)
10	Piutang Lainnya	1.495.446.104,00	187.370.700,00
11	Persediaan	16.117.340.353,00	20.951.722.288,66
JUMLAH		83.517.869.412,03	117.578.014.535,54

a) Kas di Kas Daerah	2022	2021
	Rp25.925.927.971,75	Rp46.071.808.206,43

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.925.927.971,75 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.071.808.206,43.

Hasil Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1. Menurut Bank:

- a. Sisa Bank (Rek.006.01.04.00000-0) sebesar Rp25.097.635.903,27
- b. Sisa Bank (Rek.006.01.04.000135.0) sebesar Rp828.245.991,37
- c. Sisa Bunga Deposito Bank BNI sebesar Rp40.967,00
- d. Sisa Bunga Deposito Bank BRI sebesar Rp0
- e. Sisa Bunga Deposito Bank Mandiri sebesar Rp5.110,11

2. Menurut Buku Kas Umum:

- a. Buku Pembantu Kas Daerah (Rek.006.01.04.00000-0) sebesar Rp25.097.635.903,27
- b. Buku Pembantu Kas Daerah (Rek.006.01.04.000135.0) sebesar Rp828.245.991,37
- c. Buku Pembantu Kas Bank BNI sebesar Rp40.967,00
- d. Buku Pembantu Kas Bank BRI sebesar Rp0
- e. Buku Pembantu Kas Bank Mandiri sebesar Rp5.110,11

Tabel 47 Rekapitulasi Rekening dan Saldo Kas di Kas Daerah

NO.	NAMA	KODE REKENING	TUJUAN PEMBUKAAN REKENING	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
Kas di Kasda					
1.	Bank NTT	006.01.04.000001-0	Transfer Pusat / SP2D	25.097.635.903,27	32.058.807.905,57
		006.01.04.000135-0	Pendapatan Asli Daerah	828.245.991,37	14.012.978.450,63
2.	Bank BNI	0054730749	Giro dan Deposito	40.967,00	15.243,00
3.	Bank BRI	0273-01-004050-40-0	Giro dan Deposito	0,00	0,00
4.	Bank Mandiri	161-00-0011080-4	Giro dan Deposito	5.110,11	6.607,23
JUMLAH				25.925.927.971,75	46.071.808.206,43

	2022	2021
b) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp8.784.000,00	Rp0,00

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.784.000,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00

Tabel 48 Rekapitulasi Kas di Bendahara Penerimaan

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	200.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	300.000,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.202.000,00
4	Dinas Perhubungan	82.000,00
Total		8.784.000,00

	2022	2021
c) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp116.332.162,00	Rp16.610.150,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp116.332.162,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.610.150,00 yang merupakan sisa Kas dari Perhitungan Anggaran pada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 49 Rekapitulasi Kas Di Bendahara Pengeluaran

NO.	URAIAN	31/12/2022	31/12/2021
		(Rp)	(Rp)
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		16.610.150,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	35.483.800,00	0,00
3	Bappelitbangda	37000	0,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.780.000,00	0,00
5	Bagian Umum	19.656.592,00	0,00
6	Kecamatan Reok Barat	17.837.000,00	0,00
7	Kecamatan Reok	117.400,00	0,00
8	Kecamatan Satar Mese Utara	17.457.000,00	0,00
Total		116.332.162,00	16.610.150,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp116.332.162,00 dan disetor ke Kas Daerah pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Kas Di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022

NO.	NAMA PERANGKAT	SISA KAS 2022					SISA KAS
	DAERAH	Rp.	TGL SETOR	STS	Rp.	SISA	2021
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.610.150,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	35.483.800,00	27 Jan 2023		35.483.800,00	0,00	0,00
3	Bappelitbangda	370,00	21-Feb-23		370,00	0,00	0,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.780.000,00	11 Jan 2023	9333	25.780.000,00	0,00	0,00
5	Bagian Umum	19.656.592,00	06 Feb 2023		19.656.592,00	0,00	0,00
6	Kecamatan Reok Barat	17.837.000,00	15-Feb-23	004834	17.837.000,00	0,00	0,00
7	Kecamatan Reok	117.400,00				117.400,00	0,00
8	Kecamatan Satar Mese Utara	17.457.000,00	09-Jan-23	9311	17.457.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		116.332.162,00			116.214.762,00	117.400,00	16.610.150,00

	2022	2021
d) Kas di BLUD	<u>Rp12.960.776.557,97</u>	<u>Rp17.549.199.725,66</u>

Jumlah Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.960.776.557,97 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.549.199.725,97.

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.960.776.557,97 merupakan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp17.549.199.725,66 ditambah dengan nilai Pendapatan BLUD sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rp67.968.747.874,31 dikurangi belanja BLUD sebesar Rp72.557.171.042,00 sehingga terdapat saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.960.776.557,97.

Tabel 5148 Rincian Kas di BLUD

NO.	URAIAN	Rp.
1.	Saldo Awal	17.549.199.725,66
2.	Pendapatan BLUD	
	Pendapatan BLUD	67.986.747.874,31
3.	Belanja	
	Belanja Pegawai	61.550.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	70.040.166.042,00
	Belanja Modal	2.455.455.000,00
4.	Koreksi SILPA karena setor ke Kas Daerah	0,00
SALDO AKHIR		12.960.776.557,97

	2022	2021
e) Kas di BOS	Rp384.904.092,00	Rp850.324.887,00

Jumlah Kas BOS per 31 Desember 2022 Rp384.904.092,00 dan per 31 Desember 2021 Rp850.324.887,00. Saldo tersebut terdapat pada Sekolah Dasar dan SMP (*Lampiran 7a*). Pada Tahun 2022, utang PFK BOS yang belum disetor dicatat pada Kas Lainnya.

Tabel 52 Rincian Kas Dana BOS

NO.	URAIAN	BOS SD (Rp)	BOS SMP (Rp)	Total (Rp)
1	Saldo Awal	618.807.951,00	231.516.936,00	850.324.887,00
	Silpa	570.950.778,00	185.970.309,00	756.921.087,00
	Utang PFK	47.857.173,00	45.546.627,00	93.403.800,00
2	Pelunasan Utang PFK	(44.500.520,00)	(45.280.027,00)	(89.780.547,00)
3	Koreksi Saldo Awal (Utang PFK pindah ke Kas Lainnya)	(3.356.653,00)	(266.600,00)	(3.623.253,00)
4	Pendapatan	26.471.512.287,00	24.605.495.690,00	51.077.007.977,00
	Pendapatan BOS	26.407.582.144,00	24.605.495.690,00	51.013.077.834,00
	Penerimaan TPTGR	63.930.143,00		63.930.143,00
5	Belanja	26.783.692.858,00	24.665.332.114,00	51.449.024.972,00
	Belanja Pegawai	9.678.532.737,00	8.342.003.407,00	18.020.536.144,00
	Belanja Barang dan Jasa	14.259.746.822,00	13.368.237.888,00	27.627.984.710,00
	Belanja Modal	2.845.413.299,00	2.955.090.819,00	5.800.504.118,00
SALDO AKHIR DANA BOS		258.770.207,00	126.133.885,00	384.904.092,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	2022	2021
f) Kas Dana FKTP	Rp1.214.202.935,00	Rp4.165.460.880,00

Jumlah Kas di FKTP per 31 Desember 2022 Rp1.214.202.935,00 dan per 31 Desember 2021 Rp4.165.460.880,00. Saldo tersebut terdapat pada 21 Puskesmas (*Lampiran 8*)

Saldo Kas di FKTP merupakan saldo Dana Kapitasi pada Bendahara Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.214.202.935,00. Jumlah tersebut merupakan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp4.165.460.880,00 ditambah dengan Pendapatan Dana Kapitasi sebesar Rp8.823.377.970,00 dikurangi Belanja Kapitasi sebesar Rp11.774.635.915,00 sehingga terdapat saldo sebesar Rp1.214.202.935,00.

	2022	2021
g) Kas Lainnya	Rp150.319.296,08	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya sebesar Rp150.319.296,08 yang terdiri dari Jasa Giro BOS yang belum disetor sebesar Rp10.114.363,00, Jasa Giro pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp87.301,08 serta utang PFK BOS yang belum disetor sebesar Rp140.117.632,00

Tabel 53 Rincian Kas Lainnya

No	Uraian	Debet
A	Jasa Giro BOS yang belum disetor	10.114.363,00
1	Jasa Giro BOS SD	4.218.036,00
2	Jasa Giro BOS SMP	5.896.327,00
B	Jasa Giro pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	87.301,08
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84.134,74
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.041,60
3	Bagian Kerjasama	124,74
C	Utang PFK BOS yang belum disetor	140.117.632,00
1	Utang PFK BOS 2021	484.207,00
2	BOS SD	21.489.282,00
3	BOS SMP	118.144.143,00
Total		150.319.296,08

	2022	2021
h) Piutang Pendapatan	Rp40.818.512.810,06	Rp43.337.302.767,62



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.818.512.810,06 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp43.337.302.767,62 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 54 Rincian Piutang Pendapatan

No.	URAIAN	PIUTANG 2021	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	PIUTANG 2022
1.	Piutang Pajak	17.346.246.027,62	1.797.702.210,00	891.791.040,98	18.252.157.196,64
2.	Piutang Retribusi	1.880.371.733,00	467.096.280,00	263.759.345,00	2.083.708.668,00
3.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	24.110.685.007,00	5.446.348.190,42	19.657.947.509,00	9.899.085.688,42
4.	Piutang Transfer Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	0,00	10.583.561.257,00	0,00	10.583.561.257,00
TOTAL		43.337.302.767,62	18.294.707.937,42	20.813.497.894,98	40.818.512.810,06

(1) Piutang Pajak	2022	2021
	<u>Rp18.252.157.196,64</u>	<u>Rp17.346.246.027,62</u>

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.252.157.196,64 dan Rp17.346.246.027,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Rekapitulasi Piutang Pajak

No.	Uraian	31-12-2021 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-12-2022 (Rp)
1.	Piutang PBB-P2	16.400.883.014,24	1.771.119.210,00	640.838.580,00	17.531.163.644,24
2.	Piutang Pajak Hiburan	820.500,00	510.000,00	0,00	1.330.500,00
3.	Piutang Pajak Hotel	104.065.157,00	10.285.000,00	78.214.758,00	36.135.399,00
4.	Piutang Pajak Restoran	69.268.000,00	4.950.000,00	44.677.500,00	29.540.500,00
5.	Piutang Pajak Reklame	142.380.250,00	8.573.000,00	29.035.000,00	121.918.250,00
6.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	628.829.106,38	2.265.000,00	99.025.202,98	532.068.903,40
JUMLAH		17.346.246.027,62	1.797.702.210,00	891.791.040,98	18.252.157.196,64

Dengan uraian:

1. Rincian Piutang PBB-P2 sebesar Rp17.531.163.644,24 (rincian pada **Lampiran 9**);
2. Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp1.330.500,00 (rincian pada **Lampiran 10**);
3. Piutang Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Rp36.135.399,00 (rincian pada **Lampiran 11**);
4. Piutang Pajak Restoran sebesar Rp29.540.500,00 (rincian pada **Lampiran 12**);
5. Piutang Pajak Reklame sebesar Rp121.918.250,00 (rincian pada **Lampiran 13**); dan
6. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp532.068.903,40 (rincian pada **Lampiran 14**).

(2) Piutang Retribusi	2022	2021
	<u>Rp2.083.708.668,00</u>	<u>Rp1.880.371.733,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.083.708.668,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.880.371.733,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Rekapitulasi Piutang Retribusi

NO.	URAIAN	31-12-2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	31-12-2022 (Rp)
1.	Piutang Retribusi Ruko pada Badan Pendapatan Daerah	96.333.000,00	38.730.000,00	27.492.000,00	107.571.000,00
2.	Piutang Retribusi Ruko (<i>Shopping Center</i>) pada Badan Pendapatan Daerah	20.673.125,00	7.275.000,00	12.381.875,00	15.566.250,00
3.	Piutang Retribusi Rumah pada Badan Pendapatan Daerah	263.819.450,00	46.818.300,00	33.855.300,00	276.782.450,00
4.	Piutang Retribusi Pasar pada Badan Pendapatan Daerah	1.499.546.158,00	374.272.980,00	190.030.170,00	1.683.788.968,00
JUMLAH		1.880.371.733,00	467.096.280,00	263.759.345,00	2.083.708.668,00

Dengan uraian:

1. Rincian Piutang Rumah Dinas sebesar Rp276.782.450,00 (rincian pada **Lampiran 15**);
2. Piutang Retribusi Pasar sebesar Rp1.683.788.968,00 (rincian pada **Lampiran 16**);
3. Piutang Retribusi Ruko (*Shopping Center*) pada Badan Pendapatan Daerah Rp15.566.250,00 (rincian pada **Lampiran 17**);
4. Piutang Ruko sebesar Rp107.571.000,00 (rincian pada **Lampiran 18**).

(3) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

	2022	2021
	Rp9.898.729.609,00	Rp24.110.685.007,00

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.898.729.609,00 dan Rp24.110.685.007,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

No.	Uraian	31/12/2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31/12/2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	298.565.913,00	0,00	0,00	298.565.913,00
2.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	155.403.920,00	0,00	0,00	155.403.920,00
3.	Dinas Pertanian	200.950.297,00	0,00	0,00	200.950.297,00
4.	Dinas Perikanan	14.883.552,00	0,00	0,00	14.883.552,00
5.	Bagian Umum	21.244.273,00	0,00	0,00	21.244.273,00
6.	Piutang Bunga Deposito TA. 2012 dan TA. 2013	5.515.068,00	0,00	0,00	5.515.068,00
7.	Piutang dari Penjualan Kendaraan Dinas	57.078.410,00	0,00	0,00	57.078.410,00
8.	Piutang Sisa Hasil Likuidasi PD Komodo Jaya	339.494.500,00	0,00	0,00	339.494.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31/12/2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31/12/2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
9.	Piutang BLUD	19.874.189.686,00	5.445.992.111,00	19.657.947.509,00	5.662.234.288,00
10.	Piutang atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas selisih perhitungan PTKP	3.143.359.388,00	0,00	0,00	3.143.359.388,00
11.	Remunerasi TDF yang belum diakui pada TA 2022	0,00	356.079,00	0,00	356.079,00
TOTAL		24.110.685.007,00	5.446.348.190,00	19.657.947.509,00	9.899.085.688,00

Piutang bunga dana bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Piutang Bunga Dana Bergulir Pada Dinas Penanaman Modal

NO.	URAIAN	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1.	Dana Bergulir UKM	181.096.913,00	181.096.913,00
2.	Dana Bergulir KSP-USP UBSP	94.844.000,00	94.844.000,00
3.	Dana Bergulir Binkop dan Penyangga Pangan	22.625.000,00	22.625.000,00
JUMLAH		298.565.913,00	298.565.913,00

Piutang bunga dana bergulir per 31 Desember 2022 pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah terdiri dari:

Tabel 59 Piutang Bunga Dana Bergulir Pada Bagian Perekonomian – Sekretariat Daerah

NO.	URAIAN	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1.	Dana Bergulir Penanggulangan Masalah Gaky	33.237.120,00	33.237.120,00
2.	Dana Bergulir Pembinaan Industri Kecil (Dana Segar)	68.890.000,00	68.890.000,00
3.	Dana Bergulir Pembinaan Industri Kecil (Guliran Uang)	53.276.800,00	53.276.800,00
JUMLAH		155.403.920,00	155.403.920,00

Piutang Bunga Penguatan Modal Kerja yang terdapat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp200.950.297,00 dan Rp200.950.297,00. Saldo piutang tersebut merupakan sisa bunga pinjaman modal agribisnis padi sawah yang disalurkan dari tahun 2001 s.d. tahun 2008.

Piutang Bunga Penguatan Modal Kerja yang terdapat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2022, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 60 Piutang Penguatan Modal Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tahun Penyaluran	31-12-2022			31-12-2021		
	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
2001	20.409.3740,00	11.898.5630,00	32.307.9370,00	20.409.3740,00	11.898.5630,00	32.307.9370,00
2002	146.249.0250,00	25.977.8400,00	172.226.8650,00	146.249.0250,00	25.977.8400,00	172.226.8650,00
2003	78.249.9550,00	25.953.2730,00	104.203.2280,00	78.249.9550,00	25.953.2730,00	104.203.2280,00
2004	57.016.5000,00	12.438.6250,00	69.455.1250,00	57.016.5000,00	12.438.6250,00	69.455.1250,00
2005	94.179.9100,00	21.397.9880,00	115.577.8980,00	94.179.9100,00	21.397.9880,00	115.577.8980,00
2006	32.001.5980,00	4.545.6480,00	36.547.2460,00	32.001.5980,00	4.545.6480,00	36.547.2460,00
2007	23.420.2500,00	5.336.5380,00	28.756.7880,00	23.420.2500,00	5.336.5380,00	28.756.7880,00
2008	362.090.5560,00	93.401.8220,00	455.492.3780,00	362.090.5560,00	93.401.8220,00	455.492.3780,00
JUMLAH	813.617.1680,00	200.950.2970,00	1.014.567.4650,00	813.617.1680,00	200.950.2970,00	1.014.567.4650,00

Piutang Bunga Penguatan Modal Kerja yang terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp14.883.552,00 tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Saldo tersebut merupakan sisa piutang bunga atas pinjaman modal kepada dua kelompok usaha budidaya rumput laut dan enam kelompok usaha budidaya ikan air tawar.

Tabel 61 Piutang Penguatan Modal Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Jenis Kegiatan	Kelompok penerima	Kecamatan	Sisa per 31 Des. 2022			Sisa per 31 Des. 2021		
				Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah
1.	Peng. Budidaya Rumput Laut	1. Sbr. Laut 2. Br Muncul	Satar Mese Satar Mese	59.000.0000,00	7.560.0000,00	66.560.0000,00	59.000.0000,00	7.560.0000,00	66.560.0000,00
				25.675.0000,00	3.600.0000,00	29.275.0000,00	25.675.0000,00	3.600.0000,00	29.275.0000,00
2	Peng. Budidaya Ikan Air Tawar	1. K. Mekar 2. K. Lao 3. Raci Koe 4. W. Sosor 5. Ibunda I 6. Ibunda II	L. Rembong	5.171.6000,00	620.5920,00	5.792.1920,00	5.171.6000,00	620.5920,00	5.792.1920,00
			L. Rembong	5.171.6000,00	620.5920,00	5.792.1920,00	5.171.6000,00	620.5920,00	5.792.1920,00
			L. Rembong	5.171.6000,00	620.5920,00	5.792.1920,00	5.171.6000,00	620.5920,00	5.792.1920,00
			L. Rembong	4.671.6000,00	620.5920,00	5.292.1920,00	4.671.6000,00	620.5920,00	5.292.1920,00
			L. Rembong	4.821.6000,00	620.5920,00	5.442.1920,00	4.821.6000,00	620.5920,00	5.442.1920,00
			L. Rembong	4.821.6000,00	620.5920,00	5.442.1920,00	4.821.6000,00	620.5920,00	5.442.1920,00
JUMLAH				114.504.6000,00	14.883.5520,00	129.388.1520,00	114.504.6000,00	14.883.5520,00	129.388.1520,00

Piutang yang terdapat pada Setda Bagian Umum merupakan piutang sewa kendaraan roda enam oleh pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.244.273,00. Piutang tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya karena pihak ketiga sudah tidak jelas keberadaannya.

Piutang Lainnya atas Bunga Deposito seluruhnya sebesar Rp55.721.819,63 terdiri dari piutang yang timbul karena pengenaan pajak penghasilan oleh Bank BRI dan Bank Mandiri masing masing sebesar 20% atas bunga deposito milik Pemerintah Kabupaten Manggarai sebesar Rp50.206.751,63 dan kekurangan penerimaan jasa giro karena selisih tarif bunga deposito dari perhitungan seharusnya yang belum diakui pada Tahun 2012 sebesar Rp5.515.068,00, piutang bunga deposito akibat pemotongan selisih tarif bunga tersebut adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 62 Piutang atas Bunga Deposito di BRI

NO.	NAMA BANK	NO. SERTIFIKAT	31-12-2021 (Rp)	31-12-2020 (Rp)
1	BANK RAKYAT INDONESIA	0273-01-001663-40-8	5.515.068,00	5.515.068,00
JUMLAH A			5.515.068,00	5.515.068,00

Piutang dari kendaraan dinas sebesar Rp57.074.410,00 (rincian pada *Lampiran 19*)

Piutang atas Sisa hasil Likuidasi PD Komodo Jaya yang telah diserahkan oleh Tim Likuidasi pada Bupati berdasarkan BA Nomor: Ek.019.1/428/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan total sebesar Rp339.494.500.00,00 terdiri dari Piutang pada Mantan Pegawai sebesar Rp181.366.925,00. Piutang pada Nasabah PD Komodo Jaya sebesar Rp54.570.000,00. Piutang Kredit Sewa Beli Sepeda Motor sebesar Rp71.929.300,00. Piutang Uang Muka Pembelian Kopi sebesar Rp24.971.275,00, dan Piutang Usaha Beras sebesar Rp6.657.000,00. Dasar penetapan piutang oleh Tim Likuidasi adalah surat pernyataan kesanggupan untuk melunasi piutang dari masing-masing debitur kepada Pemerintah Daerah.

Nilai Piutang RSUD terdiri dari Piutang BPJS sebesar Rp5.420.690.600,00 yang merupakan data klaim susulan 2022 yang diakui BPJS di Tahun 2023, Piutang Pasien sebesar Rp156.969.468,00 serta Piutang kepada Pihak Ketiga yang melakukan pemakaian Air dan Listrik saat melakukan pembangunan wilayah RSUD.

(4) Piutang Transfer Pusat	2022	2021
	_____	_____
	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00		

(5) Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	2022	2021
	_____	_____
	Rp10.583.561.257,00	Rp0,00

Jumlah Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.583.561.257,00 dan Rp0,00

Tabel 63 Rekapitulasi Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi

No	Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1.	Piutang DBH PKB	2.297.812.707,00	0,00
2.	Piutang DBH BBNKB	2.075.768.519,00	0,00
3.	Piutang DBH PBBKB	6.180.481.259,00	0,00
4.	Piutang DBH Pajak Air Permukaan	0,00	0,00
5.	Piutang DBH Pajak Air Bawah Tanah	29.498.772,00	0,00
JUMLAH		10.583.561.257,00	0,00

i) Piutang Lainnya	2022	2021
	_____	_____
	Rp1.495.446.104,00	Rp187.370.700,00

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.495.446.104,00, terdiri dari Piutang Uang Muka Pengadaan Barang Jasa Rp1.456.903.354,00 dan Piutang TPTGR atas Pengolaan Dana BOS sebesar Rp38.542.750,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 64 Rincian Piutang Lainnya

No.	Uraian	31-12-2021 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-12-2022 (Rp)
1	Piutang TPTGR	114.897.000,00	0,00	76.354.250,00	38.542.750,00
	SDI Til	9.905.100,00		9.905.000,00	100,00
	SDI Rakas	40.841.900,00		20.420.950,00	20.420.950,00
	SDI Rua	50.000.000,00		31.878.300,00	18.121.700,00
	SDI Bangka Keli	14.150.000,00		14.150.000,00	0,00
2	Piutang Uang Muka Pengadaan AT	72.473.700,00	1.384.429.654,00	0,00	1.456.903.354,00
	PUPR	0,00	1.384.429.654,00	0,00	1.384.429.654,00
	BKPSDM	72.473.700,00	0,00	0,00	72.473.700,00
	Total	187.370.700,00	1.384.429.654,00	76.354.250,00	1.495.446.104,00

j) Penyisihan Piutang

2022

2021

(Rp15.674.676.869,83)

(Rp15.551.785.069,93)

Jumlah Penyisihan

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp15.674.676.869,83) dan (Rp15.551.785.069,93) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 Penyisihan Piutang Pendapatan

NO.	URAIAN	PIUTANG 2022	%	PENYISIHAN
		(Rp)		(Rp)
A.	PIUTANG PAJAK			
1.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	532.068.903,40		508.641.056,65
	1. Kualitas lancar	2.265.000	0,5	11.325,00
	2. Kualitas Kurang Lancar	90.000,00	10	9.000,00
	3. Kualitas Ragu-ragu	42.186.343,50	50	21.093.171,75
	4. Kualitas Macet	487.527.559,90	100	487.527.559,90
2.	Piutang Pajak Hotel	36.135.399,00		5.286.464,90
	1. Kualitas lancar	10.285.000,00	0,5	51.425,00
	2. Kualitas Kurang Lancar	19.550.399,00	10	1.955.039,90
	3. Kualitas Ragu-ragu	6.300.000,00	50	3.280.000,00
3.	Piutang Pajak Restoran	29.540.500,00		7.351.500,00
	1. Kualitas lancar	4.950.000,00	0,5	24.750,00
	2. Kualitas Kurang Lancar	12.415.500,00	10	1.239.250,00
	3. Kualitas Ragu-ragu	12.175.000,00	50	6.087.500,00
4.	Piutang Pajak Reklame	121.918.250,00		35.511.490,00
	1. Kualitas lancar	8.573.000,00	0,5	42.865,00
	2. Kualitas Kurang Lancar	53.010.000,00	10	5.301.000,00
	3. Kualitas Ragu-ragu	60.335.250,00	50	30.167.625,00
5.	Piutang PBB	17.531.163.644,24		10.288.863.615,99
	1. Kualitas lancar	1.771.119.210,00	0,5	8.855.596,05
	2. Kualitas Kurang Lancar	3.742.744.832,00	10	374.274.483,20



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	PIUTANG 2022	%	PENYISIHAN
		(Rp)		(Rp)
3.	Kualitas Ragu-ragu	4.223.132.131,00	50	2.111.566.065,50
4.	Kualitas Macet	7.794.167.471,24	100	7.794.167.471,24
6.	Piutang Hiburan	1.330.500,00		412.800,00
1.	Kualitas lancar	510.000,00	0,5	2.550,00
2.	Diragukan	820.500,00	50	410.250,00
JUMLAH A		18.252.157.196,64		10.846.066.927,54
B.	PIUTANG RETRIBUSI			
1.	Piutang Retribusi Rumah Dinas	276.782.450,00		276.782.450,00
1.	Kualitas Macet	276.782.450,00	100	276.782.450,00
2.	Piutang Retribusi Shopping Center	15.566.250,00		15.566.250,00
1.	Kualitas Macet	15.566.250,00	100	15.566.250,00
3.	Piutang Retribusi Rumah Dinas	1.683.788.968,00		1.683.788.968,00
1.	Kualitas Macet	1.683.788.968,00	100	1.683.788.968,00
4.	Piutang Retribusi Ruko	107.571.000,00		107.571.000,00
1.	Kualitas Macet	107.571.000,00	100	107.571.000,00
JUMLAH B		2.083.708.668,00		2.083.708.668,00
C.	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH			
1.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	298.565.913,00		298.565.913,00
1.	Kualitas Macet	298.565.913,00	100	298.565.913,00
2.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	155.403.920,00		155.403.920,00
1.	Kualitas Macet	155.403.920,00	100	155.403.920,00
3.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	200.950.297,00		200.950.297,00
1.	Kualitas Macet	200.950.297,00	100	200.950.297,00
4.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.883.552,00		14.883.552,00
1.	Kualitas Macet	14.883.552,00	100	14.883.552,00
5.	BAGIAN UMUM	21.244.273,00		21.244.273,00
1.	Kualitas Macet	21.244.273,00	100	21.244.273,00
6.	PIUTANG BUNGA DEPOSITO TA. 2012 DAN TA. 2023 BADAN PENDAPATAN	5.515.068,00		5.515.068,00
1.	Kualitas Macet	5.515.068,00	100	5.515.068,00
7.	PIUTANG DARI PENJUALAN KENDARAAN BADAN PENDAPATAN	57.078.410,00		57.078.410,00
1.	Kualitas Macet	57.078.410,00	100	57.078.410,00
8.	PIUTANG SISA HASIL LIKUIDASI PD KOMODO JAYA	339.494.500,00		339.494.500,00
1.	Kualitas Macet	339.494.500,00	100	339.494.500,00
9.	PIUTANG BLUD	5.662.234.288,00		80.083.866,26
1.	Kualitas Lancar	5.445.992.111,00	0,5	27.229.960,56
2.	Kualitas Kurang Lancar	138.167.957,00	10	13.816.795,70
3.	Kualitas Ragu-ragu	78.074.220,00	50	39.037.110,00
10.	PIUTANG ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PPh 21 AKIBAT SELISIH PERHITUNGAN PTKP	3.143.359.388,00		1.571.679.694,00
1.	Kualitas Ragu-ragu	3.143.359.388,00	50	1.571.679.694,00
11.	PPKD	356.079,00		1.780,40
1.	Kualitas Lancar	356.079,00	0,5	1.780,40



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	PIUTANG 2022	%	PENYISIHAN
		(Rp)		(Rp)
Jumlah C		9.898.729.609,00		2.744.901.273,65
TOTAL		30.234.595.473,64		15.674.676.869,19

k) Persediaan	2022	2021
	Rp16.117.340.353,00	Rp20.951.722.288,66

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.117.340.353,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.951.722.288,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66 Persediaan Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai

NO.	URAIAN	31/12/2022	31/12/2021
		(Rp)	(Rp)
1	Dinas Peternakan:		
	Obat-obatan dan alat kesehatan	83.790.000,00	83.376.825,00
	Anak babi /Bibit Ternak	25.200.000,00	47.700.000,00
	Bahan lainnya (pakan ternak)	212.959.076,00	209.606.250,00
	Persediaan Telur	0	756.000,00
	Jumlah	321.949.076,00	341.439.075,00
2	Dinas Kelautan Dan Perikanan:		
	Bahan lainnya (pakan ikan)	16.368.750	
	Induk ikan	31.050.000	
	Calon induk	5.100.000	
	Persediaan Bibit Ternak		35.300.000,00
	Pakan		14.850.000,00
	Jumlah	52.518.750,00	50.150.000,00
3	BLUD RSUD Ruteng:		
	Obat E-Kat	557.225.631,00	
	Obat Non E-Kat	191.331.650,00	
	Obat JKN E-Kat	19.012.320,00	
	Obat JKN Non E-Kat	8.063.546,00	
	Obat OPK E-Kat	408.500,00	
	Obat OPK Non E-Kat		
	Obat Generic dan Non Generic		1.206.132.604,21
	Alkes E-Kat 2022	794.743.530,00	
	Alkes Non E-Kat 2023	512.906.136,00	
	Alkes E-Kat JKN	7.055.763,00	
	Alkes Non E-Kat JKN	6.908.154,00	
	Alkes OPK E-Kat	1.364.000,00	
	Alkes OPK Non E-Kat	49.357.396,00	
	Barang Habis Pakai	3.787.771.457,00	
	Obat Covid 19	355.743.484,00	
	Persediaan ATK		3.883.750,00
	Kertas dan Cover		3.825.000,00
	Cetak dan Penggandaan		24.045.000,00
	Persediaan Peralatan Kebersihan		158.568.100,00
	Reagen Rutin		940.406.329,00
	Persediaan Oksigen		106.350.000,00
	Persediaan Makanan untuk Pasien		44.806.577,00
	Persediaan CSSD		174.191.796,00
	Persediaan Alat Kesehatan		1.598.158.540,00
	Persediaan Cairan Cuci Darah (CAPD)		24.891.360,00
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya		7.728.500,00	
	Jumlah	6.291.891.567,00	4.292.987.556,21
4.	Badan Keuangan		
	Persediaan barang Cetak dan Penggandaan		45.560.000,00
	Persediaan ATK	17.880.500,00	
	Kertas dan Cover	7.615.000,00	
	Barang Cetakan	48.679.500,00	
	Jumlah	74.175.000,00	45.560.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	31/12/2022	31/12/2021
		(Rp)	(Rp)
5.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	Persediaan barang Cetak dan Penggandaan	540.971.643,00	309.612.000,00
	Persediaan Alat Kesehatan		7.700.000,00
	Alat Pelindung Diri dan Bahan lainnya pencegahan Penyebaran Covid 19	6.160.000,00	
	Jumlah	547.131.643,00	317.312.000,00
6.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
	Persediaan obat-obatan		78.252.200,00
	Pestisida	119.797.850,00	
	Jumlah	119.797.850,00	78.252.200,00
7.	BP4D		
	Persediaan ATK	2.382.000,00	3.325.400,00
	Persediaan barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
	Jumlah	2.472.000,00	3.325.400,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	ATK	26.275.500,00	423.000,00
	Alat Pembersih	1.270.000,00	
	Alat Listrik	1.175.000,00	
	Barang Pakai Habis	2.500.000,00	
	Barang Cetak	4.324.000,00	
	Jumlah	35.544.500,00	423.000,00
9.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
	Persediaan ATK	150.000,00	280.000,00
	Kertas dan Cover	300.000,00	
	Jumlah	450.000,00	280.000,00
10.	Dinas Perhubungan		
	Persediaan ATK	436.000,00	333.000,00
	Jumlah	436.000,00	333.000,00
11.	Dinas Pekerjaan Umum		
	Persediaan Barang Serah ke Masyarakat (Sanitasi)	0,00	10.108.000.000,00
	Jumlah	0,00	10.108.000.000,00
12.	Badan Pendapatan		
	Persediaan ATK		5.500.000,00
	Barang Cetak	111.850.000,00	
	Jumlah	111.850.000,00	5.500.000,00
13.	Dinas Kesehatan		
	Obat	4.506.097.547,00	0,00
	Bahan Medis Habis Pakai	3.853.032.695,00	0,00
	Jumlah	8.359.130.242,00	0,00
14.	Dinas PPO		
	Persediaan Barang Bansos SKB Randong	199.993.725,00	0,00
	Jumlah	199.993.725,00	0,00
TOTAL		16.117.340.353,00	15.243.562.231,21

- 2) Investasi Jangka Panjang
- | | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | Rp150.244.258.428,57 | Rp129.356.568.884,66 |
- Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.244.258.428,57 dan Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp129.356.568.884,66, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Investasi Jangka Panjang

NO.	URAIAN	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
1.	Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	3.320.516.449,00	3.320.516.449,00
2.	Penyisihan Investasi	(3.320.516.449,00)	(3.320.516.449,00)
3.	Investasi Permanen	150.244.258.428,57	129.356.568.884,66
JUMLAH		150.244.258.428,57	129.356.568.884,66



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

a) Investasi Non Permanen

	2022	2021
Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.320.516.449,00 dan Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.320.516.449,00, dengan rincian sebagai berikut:	Rp3.320.516.449,00	Rp3.320.516.449,00

Tabel 68 Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang

NO.	URAIAN	TOTAL INVESTASI 2021	PENGEMBALIAN POKOK TA 2022	TOTAL INVESTASI 2022	KUALITAS MACET (100%)
1.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1.797.835.956,00	0,00	1.797.835.956,00	1.797.835.956,00
2.	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	594.558.725,00	0,00	594.558.725,00	594.558.725,00
3.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	813.617.168,00	0,00	813.617.168,00	813.617.168,00
4.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	114.504.600,00	0,00	114.504.600,00	114.504.600,00
JUMLAH		3.320.516.449,00	0,00	0,00	3.320.516.449,00

Penyisihan Investasi Non Permanen dari total Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.320.516.449,00 dan nilai sisa investasi sebesar Rp0,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

Nilai sisa/residu Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 per 31 Desember 2020 merupakan Investasi Non Permanen berupa pinjaman modal dana bergulir dan penguatan modal kerja yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai pada empat Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Investasi Non Permanen pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.797.835.956,00 dan Rp1.797.835.956,00. Dinas Penanaman Modal dan Koperasi mengelola dana bergulir dengan mekanisme menggulirkan pengembalian pokok dana bergulir dan menyetorkan ke Kas Daerah atas pengembalian bunga dana bergulir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69 Dana Bergulir pada Dinas Penanaman Modal dan Koperasi

No.	Uraian	31-12-2022 (Rp)	Pengembalian	31-12-2021 (Rp)
1.	Dana bergulir pada Bidang UKM	1.009.316.343,00	0,00	1.009.316.343,00
2.	Dana bergulir KSP-USP-UBSP	522.694.613,00	0,00	522.694.613,00
3.	Dana bergulir Binkop dan Penyangga Pangan	265.825.000,00	0,00	265.825.000,00
JUMLAH		1.797.835.956,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(2) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah

Investasi Non Permanen pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp594.558.725,00 terdiri dari Dana Bergulir Penanggulangan masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan Dana Bergulir Pembinaan Industri Kecil. Dana bergulir berasal dari pengeluaran pemerintah TA. 2001. Khusus untuk Dana Bergulir Pembinaan Industri Kecil telah digulirkan kembali pada tahun 2002, 2003, dan 2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Dana Bergulir pada Bagian Administrasi Perekonomian

No	Uraian	31-12-2020 (Rp)	Pengembalian	31-12-2021 (Rp)
1	Dana bergulir penanggungan masalah GAKY	188.016.125,00	0,00	188.016.125,00
2	Dana bergulir pembinaan industri kecil (dana segar)	406.542.600,00	0,00	406.542.600,00
JUMLAH		594.558.725,00	0,00	0,00

Dalam usaha melakukan perbaikan penatausahaan dana bergulir, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah telah melakukan pendataan domisili para peminjam dana bergulir termasuk mengidentifikasi para penerima dana bergulir yang tinggal di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat.

(3) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Investasi Non Permanen pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp813.617.168,00 dan Rp813.617.168,00, dana tersebut merupakan pinjaman modal agribisnis padi sawah yang disalurkan dari tahun 2001 s.d. 2008. Pinjaman modal tersebut bukan merupakan dana bergulir sehingga pengembalian pokok dan bunga disetorkan ke Kas Daerah. Rincian data penyaluran dan saldo pinjaman 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 71 Penguatan Modal Kerja pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Tahun Penyaluran	31-12-2022			31-12-2021		
	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
2001	20.409.374,00	11.898.563,00	32.307.937,00	20.409.374,00	11.898.563,00	32.307.937,00
2002	146.249.025,00	25.977.840,00	172.226.865,00	146.249.025,00	25.977.840,00	172.226.865,00
2003	78.249.955,00	25.953.273,00	104.203.228,00	78.249.955,00	25.953.273,00	104.203.228,00
2004	57.016.500,00	12.438.625,00	69.455.125,00	57.016.500,00	12.438.625,00	69.455.125,00
2005	94.179.910,00	21.397.988,00	115.577.898,00	94.179.910,00	21.397.988,00	115.577.898,00
2006	32.001.598,00	4.545.648,00	36.547.246,00	32.001.598,00	4.545.648,00	36.547.246,00
2007	23.420.250,00	5.336.538,00	28.756.788,00	23.420.250,00	5.336.538,00	28.756.788,00
2008	362.090.556,00	93.401.822,00	455.492.378,00	362.090.556,00	93.401.822,00	455.492.378,00
Jumlah	813.617.168,00	200.950.297,00	1.014.567.465,00	813.617.168,00	200.950.297,00	1.014.567.465,00

(4) Dinas Kelautan dan Perikanan

Investasi Non Permanen pada Dinas Kelautan dan Perikanan 31 Desember 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 72 Penguatan Modal Kerja pada Kelautan dan Perikanan

No	Jenis Kegiatan	Kelompok penerima	Kecamatan	Sisa per 31 Des. 2022			Sisa per 31 Des. 2021		
				Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah
1.	Peng. Budidaya Rumput Laut	1. Sbr. Laut	Satar Mese	59.000.000	7.560.000	66.560.000	59.000.000	7.560.000	66.560.000
		2. Br Muncul	Satar Mese	25.675.000	3.600.000	29.275.000	25.675.000	3.600.000	29.275.000
2.	Peng. Budidaya Ikan Air Tawar	1. K. Mekar	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		2. K. Lao	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		3. Raci Koe	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		4. W. Sosor	L. Rembong	4.671.600	620.592	5.292.192	4.671.600	620.592	5.292.192
		5. Ibunda I	L. Rembong	4.821.600	620.592	5.442.192	4.821.600	620.592	5.442.192
		6. Ibunda II	L. Rembong	4.821.600	620.592	5.442.192	4.821.600	620.592	5.442.192
JUMLAH				114.504.600	14.883.552	129.388.152	114.504.600	14.883.552	129.388.152

Investasi Non Permanen pada Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari kegiatan pengeluaran pembiayaan TA. 2005 berupa pinjaman modal untuk budi daya rumput laut dan ikan air tawar dengan total nilai Rp248.059.200,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp124.029.600,00 disalurkan kepada kelompok usaha di Kabupaten Manggarai dan sebesar Rp124.029.600,00 disalurkan kepada kelompok usaha di Kabupaten Manggarai Timur (pada tahun 2005 masih termasuk wilayah Kabupaten Manggarai). Saldo pinjaman modal yang dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 hanya mencakup sisa pinjaman kepada kelompok tani di wilayah Kabupaten Manggarai yaitu sebesar Rp114.504.600,00. Saldo tersebut tidak mengalami perubahan karena tidak ada mutase pengembalian pinjaman baik pada tahun 2014 maupun tahun 2015. Saldo pinjaman modal tersebut merupakan saldo pokok pinjaman kepada dua kelompok usaha budi daya rumput laut dan enam kelompok usaha budi daya ikan air tawar sedangkan sisa piutang bunga adalah Rp14.883.552,00 (disajikan dalam akun piutang lainnya). Menurut laporan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kegiatan usaha budi daya rumput laut dan budi daya ikan air tawar tidak berjalan lagi ntara lain karena bencana alam. Laporan tersebut didukung dengan pernyataan masing-masing kelompok mengenai kondisi usaha mereka.

Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Inpektorat Kabupaten telah melakukan inventarisasi atas Dana Bergulir dan Penguatan Modal Kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan Sekretariat Daerah dan Dinas Kelautan, Perikanan

dan Peternakan namun hasilnya belum digunakan untuk membuat analisis umur piutang (*aging schedule*) serta menetapkan status atas dana bergulir yang macet (tidak tertagih).

Jumlah Penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp3.320.516.449,00) dan (Rp3.320.516.449,00).

Investasi Non Permanen dari total Investasi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.320.516.449,00) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

b) Penyisihan Investasi	2022	2021
	(Rp3.320.516.449,00)	(Rp3.320.516.449,00)

Jumlah Penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp3.320.516.449,00) dan (Rp3.320.516.449,00).



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Investasi Non Permanen dari total Investasi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.320.516.449,00) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

c) Investasi Permanen	2022	2021
	Rp150.244.258.428,57	Rp129.356.568.884,66

Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.244.258.428,57 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp129.356.568.884,66 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 73 Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai

No	Uraian	31/12/2021	Investasi 2022	Surplus/	31/12/2022
		(Rp)		(Defisit)	(Rp)
1.	Penyertaan Pada PDAM Tirta Komodo	69.370.245.571,00	9.297.000.000,00	1.569.797.307,00	80.237.042.878,00
2.	Penyertaan Pada PT. Bank NTT	49.408.118.953,00	10.000.000.000,00	0,00	59.408.118.953,00
3.	Penyertaan Pada PT. MMI	10.578.204.360,66	0,00	20.892.236,91	10.599.096.597,57
	JUMLAH	129.356.568.884,66	19.297.000.000,00	1.590.689.543,91	150.244.258.428,57

Jumlah investasi permanen sebesar Rp150.244.258.428,57 per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Komodo sebesar Rp80.237.042.878,00 merupakan kekayaan PEMDA yang tercatat dalam Neraca Komparatif PDAM Tirta Komodo dan nilai Penyertaan Modal disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi dengan kepemilikan 100% menggunakan metode ekuitas (*equity*). **Laporan keuangan PDAM Tirta Komodo yang telah diaudit terlampir.**
- Pada PT. Manggarai Multi Investasi, nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp10.599.096.597,57 dengan kepemilikan modal lebih dari 97,99% menggunakan metode ekuitas (*equity*). **Laporan keuangan PT. Manggarai Multi Investasi yang telah diaudit terlampir.**

Tabel 74 Penyesuaian Nilai Ekuitas PT. MMI

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2022	2021	2020	2019	2018
1.	Saldo Akhir Tahun Sebelumnya	10.578.204.360,66	10.499.445.904,07	10.527.535.827,12	10.411.871.716,02	7.499.559.597,03
Pengurangan:						
2.	Deviden Tahun Berjalan	(163.020.503,00)	(117.653.600,00)	(169.770.181,00)	(88.775.594,90)	(188.559.756,00)
Penambah:						
3.	Modal Disetor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2022	2021	2020	2019	2018
4.	Persentase Laba Ta. 2021 Sebesar 97,99%	183.912.739,91	196.311.887,23	141.680.257,46	204.439.706,00	100.871.875,00
JUMLAH		10.599.096.597,57	10.578.104.191,30	10.499.445.903,58	10.527.535.827,12	10.411.871.716,03

- Pada PT Bank NTT penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai sebesar Rp49.408.118.953,00,00 dan nilai penyertaan modal pada PT Bank NTT dengan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost*).

Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank NTT per 31 Desember 2022 merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sejak tahun 2001 s.d. Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Daftar Sertifikat Saham Pemerintah Kabupaten Manggarai pada PT Bank NTT

NO.	TAHUN	NILAI (Rp)	NO. SERTIFIKAT	TANGGAL
1.	2001	136.750.000,00	A/II/11/13675	31/03/2004
2.	2002	365.740.000,00	A/II/11/36574	31/03/2004
3.	2003	863.250.000,00	A/II/11/86325	31/03/2004
4.	2004	200.000.000,00	A/II/11/20000	10/01/2005
5.	2005	250.000.000,00	A/II/11/25000	01/05/2006
6.	2006	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	15/05/2006
7.	2007	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	05/07/2007
8.	2008	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	26/03/2008
9.	2009	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	07/04/2009
10.	2010	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	13/12/2010
11.	2011	3.000.000.000,00	A/II/11/300000	29/12/2011
12.	2012	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	24/10/2012
13.	2013	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	08/07/2013
14.	2014	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	15/07/2014
15.	2015	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	31/08/2015
16.	2016	0,00	-	-
17.	2017	0,00	-	-
18.	2018	10.000.000.000,00	A/II/11/100000	
19.	2019	0,00	-	-
20.	2020	2.957.438.953,00	-	-
21.	2020	2.634.940.000,00	-	-
22.	2021	5.000.000.000,00	-	-
		49.408.118.953,00		



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3) Aset Tetap

2022

2021

Rp2.049.123.136.543,76

Rp2.010.297.172.507,93

Sehubungan dengan penerapan basis akrual sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang harus diterapkan paling lambat mulai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA.2022, maka Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah mengambil beberapa kebijakan berkaitan dengan penyajian Aset Tetap dalam LKPD Kabupaten Manggarai TA.2022, sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dilaksanakan Sensus Barang Milik Daerah pada TA. 2016, dimana yang menjadi data dasar dalam Sensus BMD adalah Buku Inventaris (BI) Audited Tahun 2014;
2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Manggarai No 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, Aset Tetap yang dapat disusutkan adalah Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan Jaringan dan Irigasi. Sedangkan Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi Rusak Berat dan/atau usung yang telah diusulkan kepada pengelola Barang untuk dilakukan Penghapusan.
3. Sesuai dengan kebijakan batas minimal kapitalisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai No 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang diterapkan mulai TA.2015, maka semua BMD yang harga perolehannya tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi tersebut dikeluarkan dari Buku Inventaris 2020 dan dianggap sebagai biaya saja.

Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional. Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 76 Rincian Aset Tetap

No.	Jenis	2022	2021
1	Tanah	285.563.277.967,67	284.037.308.826,67
2	Peralatan dan Mesin	418.099.673.430,98	379.670.834.859,00
3	Gedung dan Bangunan	898.442.208.508,10	831.413.633.566,40
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.887.299.041.422,22	1.817.691.651.030,14
5	Aset Tetap Lainnya	78.357.517.723,00	74.911.395.164,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.341.021.074,82	16.147.067.299,65
7	Akumulasi Penyusutan	(1.531.979.603.583,03)	(1.393.574.718.237,93)
Total		2.049.123.136.543,76	2.010.297.172.507,93

Secara umum, mutasi aset selama tahun 2022 dijelaskan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 77 Rincian Mutasi Aset Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No.	Tambah		No.	Kurang	
	Uraian	Nilai (Rp)		Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan (BM) 2022	169.206.541.293,98	1	Hibah Keluar	286.113.859,00
2	Kapitalisasi Non BM	5.591.403,00	2	BM diserahkan ke masy./pihak ketiga	0,00
3	Penambahan AT dari sumber lainnya	5.800.504.118,00	3	Mutasi Keluar Antar Perangkat Daerah	10.032.813.424,00
4	Hutang AT	7.391.879.021,00	4	Reklas ke Aset Lainnya	7.388.806.070,05
5	Mutasi Masuk Antar Perangkat Daerah	10.032.813.424,00	5	Reklas Aset Keluar	8.362.198.282,05
6	Hibah Masuk	6.354.423.313,00	6	Penghapusan AT	282.196.188,00
7	Pindah dari KDP	3.848.904.336,01	7	Koreksi Keluar ke KDP	4.891.762.447,02
8	Reklas Aset Masuk	8.714.512.393,05	8	Pelunasan Hutang AT	0,00
9	Koreksi Penilaian AT	0,00	9	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00
10	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00	10	Barang Extrakomptible	1.495.999.997,00
11	Koreksi Masuk Lainnya	0,00	11	Koreksi Keluar Lainnya	1.384.429.654,00
Jumlah		211.355.169.302,04	Jumlah		34.124.319.921,11

Tabel 78 Aset Tetap per Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	527.056.579.766,81
2	Dinas Kesehatan	373.397.827.146,19
3	BLUD RSUD dr. Ben Mboy	231.849.445.244,19
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1.947.420.430.437,71
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3.877.493.005,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.335.725.190,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.556.833.605,00
8	Dinas Sosial	2.593.001.406,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah dan Tenaga Kerja	8.647.526.717,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.246.920,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	37.965.708.130,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.892.159.205,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.249.109.838,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	10.454.161.343,00
15	Dinas Perhubungan	49.241.145.564,98
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.035.376.957,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	564.838.149,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.971.130.630,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.654.014.474,00
20	Dinas Perikanan	23.948.340.837,28
21	Dinas Peternakan	20.388.255.399,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.363.305.211,45



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	69.196.399.323,73
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	224.710.000,00
25	Bagian Organisasi	288.682.570,00
26	Bagian Pemerintahan	7.772.614.380,00
27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.261.652.353,00
28	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	492.299.903,00
29	Bagian Administrasi Pembangunan	457.944.910,00
30	Bagian Umum	67.245.422.937,00
31	Bagian Hukum	478.595.000,00
32	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	819.624.619,00
33	Bagian Kerjasama	11.508.088,00
34	Sekretariat DPRD	12.241.162.240,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.648.933.869,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.554.851.104,51
37	Badan Pendapatan Daerah	53.798.993.751,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.090.014.855,00
39	Inspektorat Daerah	2.837.579.154,00
40	Kecamatan Langke Rembong	8.258.974.137,58
41	Kecamatan Ruteng	3.853.164.653,00
42	Kecamatan Satar Mese	2.707.242.682,00
43	Kecamatan Reok	5.603.619.935,05
44	Kecamatan Cibal	5.676.371.380,00
45	Kecamatan Wae Rii	2.772.622.337,00
46	Kecamatan Satar Mese Barat	3.725.594.380,00
47	Kecamatan Rahong Utara	3.412.614.279,00
48	Kecamatan Lelak	3.577.662.683,00
49	Kecamatan Reok Barat	3.989.421.119,00
50	Kecamatan Cibal Barat	2.960.081.330,00
51	Kecamatan Satar Mese Utara	3.068.013.394,00
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	1.568.713.583,00
	Total	3.581.102.740.126,48

Adapun penjelasan mutasi masing-masing Aset Tetap tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a) Tanah

	2022	2021
Nilai perolehan Aset Tetap	<u>Rp285.563.277.967,67</u>	<u>Rp284.037.308.826,67</u>

berupa Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp285.563.277.967,67 dan Rp284.037.308.826,67.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi nilai Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	284.037.308.826,67
Mutasi TA 2022:		
Mutasi Masuk	Rp	3.589.983.001,00
Mutasi Keluar	Rp	2.064.013.860,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	285.563.277.967,67
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	285.563.277.967,67

Tabel 79 Rincian Mutasi Aset Tanah Tahun 2022

No.	Tambah		No.	Kurang	
	Uraian	Nilai (Rp)		Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan (BM) 2022	1.962.083.000,00	1	Hibah Keluar	286.113.859,00
2	Kapitalisasi Non BM	0,00	2	BM diserahkan ke masy./pihak ketiga	0,00
3	Penambahan AT dari sumber lainnya	0,00	3	Mutasi Keluar Antar Perangkat Daerah	1.627.900.001,00
4	Hutang AT	0,00	4	Reklas ke Aset Lainnya	150.000.000,00
5	Mutasi Masuk Antar Perangkat Daerah	1.627.900.001,00	5	Reklas Aset Keluar	0,00
6	Hibah Masuk	0,00	6	Penghapusan AT	0,00
7	Pindah dari KDP	0,00	7	Koreksi Keluar ke KDP	0,00
8	Reklas Aset Masuk	0,00	8	Pelunasan Hutang AT	0,00
9	Koreksi Penilaian AT	0,00	9	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00
10	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00	10	Barang Extrakomptible	0,00
11	Koreksi Masuk Lainnya	0,00	11	Koreksi Keluar Lainnya	0,00
Jumlah		3.589.983.001,00	Jumlah		2.064.013.860,00

Tabel 80 Aset Tetap Tanah per Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	80.114.890.548,00
2	Dinas Kesehatan	4.143.429.580,00
3	BLUD RSUD dr. Ben Mboy	6.711.250.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	112.409.651.951,67
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	248.310.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.750.000,00
8	Dinas Sosial	753.290.001,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah dan Tenaga Kerja	1.341.786.142,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.729.618.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	497.710.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	18.676.000,00
15	Dinas Perhubungan	4.790.451.552,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	589.320.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	199.320.718,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	409.250.000,00
20	Dinas Perikanan	183.220.001,00
21	Dinas Peternakan	2.313.350.000,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.169.788.783,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.073.279.900,00
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00
25	Bagian Organisasi	0,00
26	Bagian Pemerintahan	0,00
27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00
28	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	500.001,00
29	Bagian Administrasi Pembangunan	0,00
30	Bagian Umum	22.771.457.670,00
31	Bagian Hukum	0,00
32	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0,00
33	Bagian Kerjasama	0,00
34	Sekretariat DPRD	2.963.880.000,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	465.260.000,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	600.000.000,00
37	Badan Pendapatan Daerah	31.391.877.013,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
39	Inspektorat Daerah	101.250.000,00
40	Kecamatan Langke Rembong	244.066.003,00
41	Kecamatan Ruteng	1.006.650.001,00
42	Kecamatan Satar Mese	2.360.000,00
43	Kecamatan Reok	217.500.000,00
44	Kecamatan Cibal	718.040.000,00
45	Kecamatan Wae Rii	501.230.000,00
46	Kecamatan Satar Mese Barat	213.101.001,00
47	Kecamatan Rahong Utara	32.883.901,00
48	Kecamatan Lelak	96.113.501,00
49	Kecamatan Reok Barat	5.675.350,00
50	Kecamatan Cibal Barat	3.900.350,00
51	Kecamatan Satar Mese Utara	220.850.000,00
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	190.340.000,00
	Total	285.563.277.967,67



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	2022	2021
b) Peralatan dan Mesin	Rp418.099.673.430,98	Rp379.670.834.859,00

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp418.099.673.430,98 dan Rp379.670.834.859,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	379.670.834.859,00
Mutasi TA 2022:		
Mutasi Masuk	Rp	42.308.413.035,98
Mutasi Keluar	Rp	3.879.574.464,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	418.099.673.430,98
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	303.791.803.087,73
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	114.307.870.343,25

Tabel 81 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No.	Tambah		No.	Kurang	
	Uraian	Nilai (Rp)		Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan (BM) 2022	33.377.856.959,98	1	Hibah Keluar	0,00
2	Kapitalisasi Non BM	5.591.403,00	2	BM diserahkan ke masy./ pihak ketiga	0,00
3	Penambahan AT dari sumber lainnya	4.082.903.885,00	3	Mutasi Keluar Antar Perangkat Daerah	2.025.496.559,00
4	Hutang AT	314.010.039,00	4	Reklas ke Aset Lainnya	53.132.908,00
5	Mutasi Masuk Antar Perangkat Daerah	2.025.496.559,00	5	Reklas Aset Keluar	304.945.000,00
6	Hibah Masuk	499.444.190,00	6	Penghapusan AT	0,00
7	Pindah dari KDP	0,00	7	Koreksi Keluar ke KDP	0,00
8	Reklas Aset Masuk	2.003.110.000,00	8	Pelunasan Hutang AT	0,00
9	Koreksi Penilaian AT	0,00	9	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00
10	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00	10	Barang Extrakomptible	1.495.999.997,00
11	Koreksi Masuk Lainnya	0,00	11	Koreksi Keluar Lainnya	0,00
Jumlah		42.308.413.035,98	Jumlah		3.879.574.464,00

Tabel 82 Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	78.272.781.997,00
2	Dinas Kesehatan	127.568.979.006,00
3	BLUD RSUD dr. Ben Mboy	93.248.209.569,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	18.681.463.573,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.028.595.435,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.821.955.190,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.845.550.828,00
8	Dinas Sosial	995.206.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah dan Tenaga Kerja	926.323.711,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.246.920,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	9.649.625.410,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.551.740.175,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.079.795.338,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	5.184.119.275,00
15	Dinas Perhubungan	9.346.655.709,98
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.173.813.190,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	561.556.149,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.253.851.742,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.619.491.267,00
20	Dinas Perikanan	2.626.049.867,00
21	Dinas Peternakan	1.880.400.426,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.639.746.404,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.543.244.893,00
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	220.355.000,00
25	Bagian Organisasi	288.682.570,00
26	Bagian Pemerintahan	3.388.904.380,00
27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.261.652.353,00
28	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	264.036.902,00
29	Bagian Administrasi Pembangunan	457.944.910,00
30	Bagian Umum	11.138.322.436,00
31	Bagian Hukum	424.545.000,00
32	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	819.624.619,00
33	Bagian Kerjasama	11.508.088,00
34	Sekretariat DPRD	3.534.554.782,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.971.455.869,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.086.926.195,00
37	Badan Pendapatan Daerah	1.086.677.067,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.774.381.020,00
39	Inspektorat Daerah	1.416.635.852,00
40	Kecamatan Langke Rembong	2.621.828.469,00
41	Kecamatan Ruteng	638.321.634,00
42	Kecamatan Satar Mese	456.940.682,00
43	Kecamatan Reok	933.767.308,00
44	Kecamatan Cibal	678.341.788,00
45	Kecamatan Wae Rii	608.894.304,00
46	Kecamatan Satar Mese Barat	536.298.879,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
47	Kecamatan Rahong Utara	485.881.878,00
48	Kecamatan Lelak	613.145.182,00
49	Kecamatan Reok Barat	593.608.660,00
50	Kecamatan Cibai Barat	689.452.552,00
51	Kecamatan Satar Mese Utara	429.235.394,00
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	1.123.347.583,00
	Total	418.099.673.430,98

c) Gedung dan Bangunan	2022	2021
	<u>Rp898.442.208.508,10</u>	<u>Rp831.413.633.566,40</u>

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp898.442.208.508,10 dan Rp831.413.633.566,40.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	831.413.633.566,40
Mutasi TA 2022:		
Mutasi Masuk	Rp	86.565.600.333,75
Mutasi Keluar	Rp	19.537.025.392,05
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	898.442.208.508,10
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	157.689.468.020,10
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	740.752.740.488,00

Tabel 83 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022

No.	Tambah		No.	Kurang	
	Uraian	Nilai (Rp)		Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan (BM) 2022	71.649.025.218,00	1	Hibah Keluar	0,00
2	Kapitalisasi Non BM	0,00	2	BM diserahkan ke masy./ pihak ketiga	0,00
3	Penambahan AT dari sumber lainnya	0,00	3	Mutasi Keluar Antar Perangkat Daerah	6.356.916.876,00
4	Hutang AT	2.275.003.148,00	4	Reklas ke Aset Lainnya	7.185.673.162,05
5	Mutasi Masuk Antar Perangkat Daerah	6.356.916.876,00	5	Reklas Aset Keluar	5.712.239.166,03
6	Hibah Masuk	5.747.041.580,00	6	Penghapusan AT	282.196.188,00
7	Pindah dari KDP	310.718.511,75	7	Koreksi Keluar ke KDP	0,00
8	Reklas Aset Masuk	226.895.000,00	8	Pelunasan Hutang AT	0,00
9	Koreksi Penilaian AT	0,00	9	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00
10	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00	10	Barang Extrakomptible	0,00
11	Koreksi Masuk Lainnya	0,00	11	Koreksi Keluar Lainnya	0,00
	Jumlah	86.565.600.333,75		Jumlah	19.537.025.392,05



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 84 Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	331.648.709.985,81
2	Dinas Kesehatan	224.166.912.147,19
3	BLUD RSUD dr. Ben Mboy	116.081.543.201,19
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	2.269.606.339,25
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	415.587.570,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	513.770.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	591.532.777,00
8	Dinas Sosial	715.760.954,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah dan Tenaga Kerja	6.356.916.876,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.736.894.700,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.340.419.030,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	671.604.500,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	5.173.871.460,00
15	Dinas Perhubungan	17.349.232.535,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.259.263.261,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.883.119.323,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.896.014.114,00
20	Dinas Perikanan	10.765.772.379,28
21	Dinas Peternakan	11.764.903.570,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.686.295.995,45
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	54.305.138.505,73
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00
25	Bagian Organisasi	0,00
26	Bagian Pemerintahan	4.172.080.000,00
27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00
28	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	194.763.000,00
29	Bagian Administrasi Pembangunan	0,00
30	Bagian Umum	30.985.480.231,00
31	Bagian Hukum	0,00
32	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0,00
33	Bagian Kerjasama	0,00
34	Sekretariat DPRD	5.742.727.458,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.212.218.000,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	867.924.909,51
37	Badan Pendapatan Daerah	20.895.577.053,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.311.105.035,00
39	Inspektorat Daerah	1.282.072.602,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
40	Kecamatan Langke Rembong	2.475.303.945,69
41	Kecamatan Ruteng	483.230.000,00
42	Kecamatan Satar Mese	1.080.830.000,00
43	Kecamatan Reok	1.175.628.800,00
44	Kecamatan Cibal	2.209.812.840,00
45	Kecamatan Wae Rii	605.270.000,00
46	Kecamatan Satar Mese Barat	1.753.651.553,00
47	Kecamatan Rahong Utara	1.652.507.500,00
48	Kecamatan Lelak	1.626.741.000,00
49	Kecamatan Reok Barat	2.214.753.509,00
50	Kecamatan Cibal Barat	2.248.707.848,00
51	Kecamatan Satar Mese Utara	2.403.928.000,00
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	255.026.000,00
	Total	898.442.208.508,10

d) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp1.887.299.041.422,22	Rp1.817.691.651.030,14

Nilai perolehan Aset Tetap

berupa Jalan Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp1.887.299.041.422,22 dan Rp1.817.691.651.030,14

Mutasi nilai Jalan Jaringan dan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	1.817.691.651.030,14
Mutasi TA 2022:		
Mutasi Masuk	Rp	74.402.192.261,10
Mutasi Keluar	Rp	4.794.801.869,02
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.887.299.041.422,22
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	1.070.498.332.475,20
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	816.800.708.947,02

Tabel 85 Rincian Mutasi Aset Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2022

No.	Tambah		No.	Kurang	
	Uraian	Nilai (Rp)		Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan (BM) 2022	62.217.576.116,00	1	Hibah Keluar	0,00
2	Kapitalisasi Non BM	0,00	2	BM diserahkan ke masy./ pihak ketiga	0,00
3	Penambahan AT dari sumber lainnya	18.328.333,00	3	Mutasi Keluar Antar Perangkat Daerah	22.499.988,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Tambah		No.	Kurang	
	Uraian	Nilai (Rp)		Uraian	Nilai (Rp)
4	Hutang AT	4.802.865.834,00	4	Reklas ke Aset Lainnya	0,00
5	Mutasi Masuk Antar Perangkat Daerah	22.499.988,00	5	Reklas Aset Keluar	2.335.539.116,02
6	Hibah Masuk	0,00	6	Penghapusan AT	0,00
7	Pindah dari KDP	3.538.185.824,07	7	Koreksi Keluar ke KDP	1.042.858.111,01
8	Reklas Aset Masuk	3.802.736.166,03	8	Pelunasan Hutang AT	0,00
9	Koreksi Penilaian AT	0,00	9	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00
10	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00	10	Barang Extrakomptible	0,00
11	Koreksi Masuk Lainnya	0,00	11	Koreksi Keluar Lainnya	1.393.904.654,00
Jumlah		74.402.192.261,10	Jumlah		4.794.801.869,02

Tabel 86 Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi per Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	15.676.525.001,10
2	Dinas Kesehatan	17.518.506.413,00
3	BLUD RSUD dr. Ben Mboy	5.045.217.864,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1.757.405.781.828,97
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.185.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
8	Dinas Sosial	128.744.451,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah dan Tenaga Kerja	22.499.988,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	18.771.670.020,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	77.494.608,00
15	Dinas Perhubungan	17.703.585.768,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.980.506,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.966.882.347,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00
20	Dinas Perikanan	10.359.876.675,00
21	Dinas Peternakan	4.135.951.403,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.867.474.029,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.272.736.025,00
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00
25	Bagian Organisasi	0,00
26	Bagian Pemerintahan	211.630.000,00
27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
28	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0,00
29	Bagian Administrasi Pembangunan	0,00
30	Bagian Umum	2.350.162.600,00
31	Bagian Hukum	0,00
32	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0,00
33	Bagian Kerjasama	0,00
34	Sekretariat DPRD	0,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
37	Badan Pendapatan Daerah	424.862.618,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.528.800,00
39	Inspektorat Daerah	30.000.000,00
40	Kecamatan Langke Rembong	2.917.775.720,00
41	Kecamatan Ruteng	1.724.963.018,00
42	Kecamatan Satar Mese	1.167.112.000,00
43	Kecamatan Reok	3.276.723.827,15
44	Kecamatan Cibal	2.070.176.752,00
45	Kecamatan Wae Rii	1.057.228.033,00
46	Kecamatan Satar Mese Barat	1.222.542.947,00
47	Kecamatan Rahong Utara	1.241.341.000,00
48	Kecamatan Lelak	1.241.663.000,00
49	Kecamatan Reok Barat	1.175.383.600,00
50	Kecamatan Cibal Barat	18.020.580,00
51	Kecamatan Satar Mese Utara	14.000.000,00
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	0,00
	Total	1.887.299.041.422,22

e) Aset Tetap Lainnya	2022	2021
	<u>Rp78.357.517.723,00</u>	<u>Rp74.911.395.164,00</u>

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp78.357.517.723,00 dan Rp74.911.395.164,00

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	74.911.395.164,00
Mutasi TA 2022:		
Mutasi Masuk	Rp	3.446.122.559,00
Mutasi Keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	78.357.517.723,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	-



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nilai Buku per 31 Desember 2022

Rp 78.357.517.723,00

Tabel 87 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

No.	Tambah		No.	Kurang	
	Uraian	Nilai (Rp)		Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan (BM) 2022	0,00	1	Hibah Keluar	0,00
2	Kapitalisasi NonBM	0,00	2	BM diserahkan ke masy. / pihak ketiga	0,00
3	Penambahan AT dari sumber lainnya	1.699.271.900,00	3	Mutasi Keluar Antar Perangkat Daerah	0,00
4	Hutang AT	0,00	4	Reklas ke Aset Lainnya	0,00
5	Mutasi Masuk Antar Perangkat Daerah	0,00	5	Reklas Aset Keluar	0,00
6	Hibah Masuk	107.937.543,00	6	Penghapusan AT	0,00
7	Pindah dari KDP	0,00	7	Koreksi Keluar ke KDP	0,00
8	Reklas Aset Masuk	1.638.913.116,00	8	Pelunasan Hutang AT	0,00
9	Koreksi Penilaian AT	0,00	9	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00
10	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00	10	Barang Ekstrakomptible	0,00
11	Koreksi Masuk Lainnya	0,00	11	Koreksi Keluar Lainnya	0,00
Jumlah		3.446.122.559,00	Jumlah		0,00

Tabel 88 Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	21.343.672.235,00
2	Dinas Kesehatan	0,00
3	BLUD RSUD dr. Ben Mboy	296.110.188,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	53.927.040.092,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
8	Dinas Sosial	0,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah dan Tenaga Kerja	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	77.900.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	0,00
15	Dinas Perhubungan	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.282.000,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	572.156.500,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.729.259.093,00
20	Dinas Perikanan	13.421.915,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
21	Dinas Peternakan	293.650.000,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.000.000,00
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.355.000,00
25	Bagian Organisasi	0,00
26	Bagian Pemerintahan	0,00
27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00
28	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	33.000.000,00
29	Bagian Administrasi Pembangunan	0,00
30	Bagian Umum	0,00
31	Bagian Hukum	54.050.000,00
32	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0,00
33	Bagian Kerjasama	0,00
34	Sekretariat DPRD	0,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
37	Badan Pendapatan Daerah	0,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
39	Inspektorat Daerah	7.620.700,00
40	Kecamatan Langke Rembong	0,00
41	Kecamatan Ruteng	0,00
42	Kecamatan Satar Mese	0,00
43	Kecamatan Reok	0,00
44	Kecamatan Cibal	0,00
45	Kecamatan Wae Rii	0,00
46	Kecamatan Satar Mese Barat	0,00
47	Kecamatan Rahong Utara	0,00
48	Kecamatan Lelak	0,00
49	Kecamatan Reok Barat	0,00
50	Kecamatan Cibal Barat	0,00
51	Kecamatan Satar Mese Utara	0,00
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	0,00
	Total	78.357.517.723,00

- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan 2022 2021
- Rp13.341.021.074,82 Rp16.147.067.299,65
- Nilai perolehan Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp13.341.021.074,82 dan Rp16.147.067.299,65
- Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	16.147.067.299,65
Mutasi TA 2022:		
Mutasi Masuk	Rp	1.042.858.111,18
Mutasi Keluar	Rp	3.848.904.336,01
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	13.341.021.074,82
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	13.341.021.074,82

Tabel 89 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022

No.	Tambah		No.	Kurang	
	Uraian	Nilai (Rp)		Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan (BM) 2022	0,00	1	Hibah Keluar	0,00
2	Kapitalisasi Non BM	0,00	2	BM diserahkan ke masy./ pihak ketiga	0,00
3	Penambahan AT dari sumber lainnya	0,00	3	Mutasi Keluar Antar Perangkat Daerah	0,00
4	Hutang AT	0,00	4	Reklas ke Aset Lainnya	0,00
5	Mutasi Masuk Antar Perangkat Daerah	0,00	5	Reklas Aset Keluar	0,00
6	Hibah Masuk	0,00	6	Penghapusan AT	0,00
7	Pindah dari KDP	0,00	7	Koreksi Keluar ke KDP	3.848.904.336,01
8	Reklas Aset Masuk	1.042.858.111,18	8	Pelunasan Hutang AT	0,00
9	Koreksi Penilaian AT	0,00	9	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00
10	Koreksi Kesalahan Pencatatan	0,00	10	Barang Extrakomptible	0,00
11	Koreksi Masuk Lainnya	0,00	11	Koreksi Keluar Lainnya	0,00
Jumlah		1.042.858.111,18	Jumlah		3.848.904.336,01

Tabel 90 Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	BLUD RSUD dr. Ben Mboy	10.467.114.422,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	2.726.886.652,82
3	Dinas Perhubungan	51.220.000,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	95.800.000,00
	Total	13.341.021.074,82

4) Akumulasi Penyusutan	2022	2021
	<u>(Rp1.531.979.603.583,03)</u>	<u>(Rp1.393.574.718.237,93)</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah, Aset Tetap Lain dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sedangkan untuk penyusutan selama tahun berjalan diperlakukan sebagai beban di Tahun 2022.

Tabel 91 Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Koreksi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022
1	Tanah	285.563.277.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	418.099.673.430,98	263.906.838.627,73	(53.132.908,00)	39.938.097.368,00	303.791.803.087,73
3	Gedung dan Bangunan	898.442.208.508,10	132.254.540.895,00	(696.778.085,00)	26.131.705.210,10	157.689.468.020,10
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.887.299.041.422,22	997.413.338.715,20	0,00	73.084.993.760,00	1.070.498.332.475,20
5	Aset Tetap Lainnya	78.357.517.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.341.021.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.581.102.740.126,79	1.393.574.718.237,93	(749.910.993,00)	139.154.796.338,10	1.531.979.603.583,03

Tabel 92 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per OPD

NO	NAMA OPD	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2022
1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	135.473.327.335,84
2	Dinas Kesehatan	120.397.296.425,58
3	Blud Rsud Dr. Ben Mboy	71.662.852.122,24
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	1.035.872.244.655,30
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	2.023.762.746,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.107.504.918,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.484.886.778,00
8	Dinas Sosial	1.205.238.136,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Dan Tenaga Kerja	2.334.314.798,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	38.172.014,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	20.353.761.539,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.929.760.580,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.305.948.556,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	6.440.765.600,00
15	Dinas Perhubungan	12.388.494.211,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.133.384.748,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	NAMA OPD	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2022
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.670.588.658,00
18	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.030.401.174,00
19	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1.998.693.790,00
20	Dinas Perikanan	7.202.655.963,00
21	Dinas Peternakan	7.525.331.501,00
22	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	10.981.986.836,00
23	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	10.450.523.624,13
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	218.605.000,00
25	Bagian Organisasi	288.682.570,00
26	Bagian Pemerintahan	4.669.242.509,00
27	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	1.220.636.785,00
28	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	360.106.105,00
29	Bagian Administrasi Pembangunan	456.932.844,00
30	Bagian Umum	17.578.792.487,00
31	Bagian Hukum	424.545.000,00
32	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	701.623.422,00
33	Bagian Kerjasama	11.508.088,00
34	Sekretariat Dprd	4.960.072.381,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.233.770.277,00
36	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	2.596.280.626,94
37	Badan Pendapatan Daerah	2.059.938.158,00
38	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.788.902.605,00
39	Inspektorat Daerah	1.843.043.387,00
40	Kecamatan Langke Rembong	5.930.729.573,00
41	Kecamatan Ruteng	1.669.130.440,00
42	Kecamatan Satar Mese	1.887.034.898,00
43	Kecamatan Reok	2.509.161.800,00
44	Kecamatan Cibal	2.531.273.344,00
45	Kecamatan Wae Rii	1.766.258.367,00
46	Kecamatan Satar Mese Barat	1.855.088.043,00
47	Kecamatan Rahong Utara	1.584.628.134,00
48	Kecamatan Lelak	1.911.259.733,00
49	Kecamatan Reok Barat	1.918.529.884,00
50	Kecamatan Cibal Barat	1.066.925.145,00
51	Kecamatan Satar Mese Utara	715.778.044,00
52	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	1.209.227.224,00
TOTAL		1.531.979.603.583,03



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5) Aset Lainnya

	2022	2021
	<u>Rp13.880.680.126,03</u>	<u>Rp5.860.746.432,98</u>

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.880.680.126,03 dan Rp5.860.746.432,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 93 Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2022
1	Tagihan Jangka Panjang	204.648.150,00	0,00	24.691.368,00	179.956.782,00
2	Akumulasi Penyisihan	(105.875.500,00)	0,00	0,00	(105.875.500,00)
3	Aset Tidak Berwujud	3.132.757.200,00	696.946.000,00	0,00	3.829.703.200,00
4	Akumulasi Amortisasi	(2.460.699.892,00)	(163.176.485,00)	0,00	(2.623.876.377,00)
5	Aset Lain-lain	27.154.649.171,50	8.706.990.687,05	0,00	35.861.639.858,55
6	Akumulasi Penyusutan	(22.064.732.696,52)	(1.196.135.141,00)	0,00	(23.260.867.837,52)
	Jumlah	5.860.746.432,98	8.044.625.061,05	24.691.368,00	13.880.680.126,03

	2022	2021
a) Tagihan Jangka Panjang	<u>Rp179.956.782,00</u>	<u>Rp204.648.150,00</u>

Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp179.956.782,00 yaitu Tagihan atas sisa Kas pada Bendahara SDI Subu dan SDI Longko sebesar Rp158.572.650,00 belum ditetapkan dengan SKTJM dan yang sudah dikembalikan ke rekening BOS sebesar Rp59.800,00,00 pada tahun 2021 dan sebesar Rp24.691.368,00 pada tahun 2022 serta Piutang TPTGR yang sudah ditetapkan dengan SKTJM sebesar Rp105.875.500,00. Jumlah tersebut merupakan Reklasifikasi dari Piutang Lainnya.

	2022	2021
b) Akumulasi Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	<u>(Rp105.875.500,00)</u>	<u>(Rp105.875.500,00)</u>

Jumlah Akumulasi Penyisihan Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp105.875.500,00) merupakan kategori macet.

	2022	2021
c) Aset Tidak Berwujud	<u>Rp3.829.703.200,00</u>	<u>Rp3.132.757.200,00</u>

Jumlah sebesar Rp3.829.703.200,00 merupakan nilai perolehan Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2021 sebesar Rp3.132.757.200,00 dengan penambahan sebesar Rp696.946.000,00 pada tahun 2022 terdiri dari Dinas PUPR sebesar Rp687.471.000,00 dan Dinas PPO sebesar Rp9.475.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

d) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2022	2021
	(Rp2.623.876.377,00)	(Rp2.460.699.892,00)

Jumlah sebesar (Rp2.623.876.377,00) merupakan nilai perolehan Aset Tidak Berwujud pada beberapa Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar (Rp2.460.699.892,00)

Tabel 94 Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Nama OPD	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi per 1 Januari 2022	Beban Amortisasi	Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022	Nilai Sisa
1	Badan Pendapatan	LAN	356.305.000	320.674.500	0,00	320.674.500	35.630.500
		LAN	245.191.000	196.152.800	24.519.100	220.671.900	24.519.100
		LAN	169.400.000	118.580.000	16.940.000	135.520.000	33.880.000
		Jumlah	770.896.000	635.407.300	41.459.100	676.866.400	94.029.600
2	Badan Keuangan	LAN	49.995.000	24.997.500	4.999.500	29.997.000	19.998.000
		Jumlah	49.995.000	24.997.500	4.999.500	29.997.000	19.998.000
3	BP4	Buku Umum lain-lain	15.000.000	15.000.000		15.000.000	0,00
		Buku Umum lain-lain	643.431.600	643.431.600		643.431.600	0,00
		Buku laporan Penelitian	114.700.000	80.290.000	11.470.000	91.760.000	22.940.000
		Peta	79.750.000	79.750.000		79.750.000	0,00
		Jumlah	852.881.600	818.471.600	11.470.000	829.941.600	22.940.000
4	Dinas PU	Buku Umum lain-lain	526.469.000	421.175.200	52.646.900	473.822.100	52.646.900
		Buku Laporan Penelitian	69.690.000	6.969.000	6.969.000	13.938.000	55.752.000
		Kajian Lainnya	487.576.000	0,00	4.063.133	4.063.133	483.512.867
		Kajian Lainnya	99.900.000	0,00	832.500	832.500	99.067.500
		Kajian Lainnya	99.995.000	0,00	833.292	833.292	99.161.708
		Jumlah	1.283.630.000	428.144.200	65.344.825	493.489.025	790.140.975
5	Dinas Perdagangan	Buku Laporan Penelitian	119.949.000,00	119.949.000		119.949.000	0,00
		Buku Laporan Penelitian	147.510.000,00	147.510.000		147.510.000	0,00
		Buku Laporan Penelitian	75.966.000,00	75.966.000		75.966.000	0,00
		Buku Laporan Penelitian	103.900.000,00	103.900.000		103.900.000	0,00
		Buku Laporan Penelitian	25.000.000,00	25.000.000		25.000.000	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi per 1 Januari 2022	Beban Amortisasi	Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022	Nilai Sisa
		Jumlah	472.325.000,00	472.325.000,00	0,00	472.325.000,00	0,00
6	Dinas Pariwisata	Buku Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kab. Manggarai	390.500.600,00	81.354.292	39.050.060	120.404.352	270.096.248
		Jumlah	390.500.600,00	81.354.292,00	39.050.060,00	120.404.352,00	270.096.248,00
7	Dinas PPO	Software	9.475.000,00	0,00	853.000	853.000	8.622.000
		Jumlah	9.475.000,00	0,00	853.000,00	853.000,00	8.622.000,00
	TOTAL		3.829.703.200,00	2.460.842.060,00	163.176.485,00	2.623.876.377,00	1.205.826.823,00

	2022	2021
e) Aset Lain-lain	<u>Rp35.861.639.858,55</u>	<u>Rp27.154.649.171,50</u>

Jumlah sebesar Rp35.861.639.858,55 merupakan nilai perolehan Aset Lain-Lain pada beberapa Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp27.154.649.171,50. Terdapat penambahan aset lain-lain sebesar Rp7.083.299.254,00 pada Dinas PPO berupa aset sekolah SMA serta sekolah swasta yang sebelumnya dicatat pada Daftar Inventaris Dinas PPO dan belum dibuat Berita Acara Serah Terima ke Dinas PPO Provinsi NTT serta ke sekolah-sekolah swasta. Terdapat pula penambahan dari Tuntutan Ganti Rugi atas kekurangan pekerjaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp31.138.722,27, RSUD sebesar Rp5.987.727,81, Dinas Kesehatan sebesar Rp47.740.930,81, Dinas PPO sebesar Rp70.639.435,16. Selain itu terdapat pencatatan TDF yang belum diakui padasebesar Rp1.468.184.617,00.

	2022	2021
f) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	<u>(Rp23.260.867.837,52)</u>	<u>(Rp22.064.732.696,52)</u>

Jumlah sebesar (Rp23.260.867.837,52) merupakan nilai perolehan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada beberapa Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar (Rp22.064.732.696,52)

2. Kewajiban	2022	2021
	<u>Rp21.116.053.872,23</u>	<u>Rp14.150.529.425,25</u>

Kewajiban Per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.116.053.872,23 dan jumlah kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.150.529.425,25, terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp14.846.247.812,45 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp6.250.717.554,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	2022	2021
1) Kewajiban Jangka Pendek	Rp14.865.336.318,23	Rp14.150.529.425,25

Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.865.336.318,23 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
		2022			2022
1	Utang PFK	94.403.800,00	139.633.425,00	92.919.593,00	141.117.632,00
2	Utang Bunga	0,00	22.227.551,78	0,00	22.227.551,78
3	Utang Belanja	14.056.125.625,25	7.135.392.981,20	13.887.808.493,00	7.303.710.113,45
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	7.398.281.021,00	0,00	7.398.281.021,00
TOTAL		14.150.529.425,25	14.695.534.978,98	13.980.728.086,00	14.865.336.318,23

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2022	2021
	Rp141.117.632,00	Rp94.403.800,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp141.117.632,00 terdiri dari Utang PFK untuk beberapa sekolah yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp140.117.632,00 (*lampiran 7b dan lampiran 7c*) dan utang BUD PPN atas SP2D No.6162/LS/2019 tanggal 31 Desember 2019 Rp46.540.755,00 namun pada SP2D Non Anggaran sebesar Rp45.540.755,00 tanggal 31 Desember 2019, sehingga BUD kurang menyetor atas PPN tersebut sebesar Rp1.000.000,00

b) Utang Bunga	2022	2021
	Rp22.227.551,78	Rp0,00

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.227.551,78 merupakan utang atas bunga pinjaman pada Bank NTT dengan pokok pinjaman sebesar Rp6.250.717.554,00. Atas pokok pinjaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai kurang membayarkan bunga kepada Bank NTT sebesar Rp22.227.551,78.

c) Utang Belanja	2022	2021
	Rp7.303.710.113,45	Rp14.056.125.625,25

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.303.710.113,45 merupakan utang BLUD RSUD sebesar Rp6.713.524.515,20, Utang Belanja barang habis pakai dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp379.784.547,00, Utang Belanja Hibah Sekolah Swasta pada Dinas PPO sebesar Rp42.083.919,00, utang belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp96.207.910,00, Utang belanja tahun 2021 pada Dinas PUPR sebesar Rp4.750.000,00, Kecamatan Ruteng sebesar Rp11.566.051,00, dan sisa utang PD Komodo Jaya yang sudah likuidasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rp55.793.171,25. Pengakuan saldo awal tahun 2015 sebesar Rp164.300.144,25 dan yang sudah terbayar tahun 2016 sebesar Rp108.506.973,00.

d) Utang Jangka Pendek Lainnya	2022	2021
	<u>Rp7.398.281.021,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Utang jangka pendek lainnya tahun 2022 merupakan utang pengadaan aset tetap sebesar Rp7.398.281.021,00 terdiri dari utang pengadaan bangunan dan gedung pada Dinas PPO sebesar Rp23.114.098,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp2.572.301.089,00 serta utang pengadaan jalan jaringan dan irigasi pada Dinas PUPR sebesar Rp4.802.865.834,00.

2) Kewajiban Jangka Panjang	2022	2021
	<u>Rp6.250.717.554,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2022 merupakan pencairan pinjaman pada Bank NTT tahun 2022 sebesar Rp6.250.717.554,00 yang merupakan bagian dari pinjaman jangka panjang Pemda dalam bentuk Standby Loan senilai Rp110.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,50%/ Tahun dengan jatuh tempo pada 31 Desember 2024 berdasarkan addendum ke 2 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 2298/DIR-DKrkM/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022.

3. Ekuitas	2022	2021
	<u>Rp2.275.649.890.638,16</u>	<u>Rp2.248.941.972.935,86</u>

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.275.649.890.637,74 dan Tahun 2021 sebesar Rp2.248.941.972.935,86

D. Laporan Operasional / LO

1. Pendapatan - LO	2022	2021
	<u>Rp970.913.780.722,67</u>	<u>Rp1.011.032.707.225,45</u>

Pendapatan - LO TA 2022 sebesar Rp970.913.780.722,67 dan TA. 2021 sebesar Rp1.011.032.707.225,45, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 96 Pendapatan Daerah - LO

NO.	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Pendapatan Asli Daerah	97.519.184.833,67	111.243.572.415,45	(13.724.387.581,78)	(12,34)
2.	Pendapatan Transfer	808.198.279.359,00	836.736.579.603,00	(28.538.300.244,00)	(3,41)
3.	Lain-Lain Pendapatan	66.664.857.226,00	63.052.555.207,00	3.612.302.019,00	5,73
	Jumlah	972.382.321.418,67	1.011.032.707.225,45	(38.650.385.806,78)	(3,82)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1) Pendapatan Asli Daerah – LO

	2022	2021
	Rp97.519.540.913,09	Rp111.243.572.415,45
Pendapatan Asli Daerah – LO		
TA 2022 sebesar Rp97.519.540.913,09, dan TA. 2021 sebesar Rp111.243.572.415,45, dengan rincian sebagai berikut:		

Tabel 97 Pendapatan Asli Daerah - LO

NO.	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	18.497.011.714,66	16.000.782.028,02	2.496.229.686,64	15,60
2.	Pendapatan Retribusi Daerah- LO	6.839.385.979,00	6.195.980.906,00	643.405.073,00	10,38
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.371.631.127,65	6.344.367.457,00	(2.972.736.329,35)	(46,86)
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	68.811.512.091,78	82.702.442.024,43	(13.890.929.932,65)	(16,80)
JUMLAH		97.519.540.913,09	111.243.572.415,45	(13.724.031.502,36)	(12,34)

	2022	2021
a) Pendapatan Pajak Daerah – LO	Rp18.497.011.714,66	Rp16.000.782.028,02

Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2022 sebesar Rp18.497.011.714,66 terdiri dari:

Tabel 98 Pendapatan Pajak Daerah – LO

NO.	URAIAN	SALDO	SALDO	KENAIKKAN / PENURUNAN	%
		2022	2021		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Pajak Hotel	418.532.853,00	325.923.270,00	92.609.583,00	28,41
2.	Pajak Restoran	2.428.676.106,00	1.755.388.475,00	673.287.631,00	38,36
3.	Pajak Hiburan	2.040.000,00	21.870.000,00	(19.830.000,00)	(90,67)
4.	Pajak Reklame	144.854.500,00	137.807.000,00	7.047.500,00	5,11
5.	Pajak Penerangan Jalan	5.306.738.449,00	4.708.798.829,00	597.939.620,00	12,70
6.	Pajak Pengambilan Bahan	3.729.724.899,02	3.352.043.832,02	377.681.067,00	11,27
7.	Pajak Air Tanah	105.518.265,00	88.971.800,00	16.546.465,00	18,60
8.	PBBP2	5.131.266.131,64	4.717.625.465,00	413.640.666,64	8,77
9.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.229.660.511,00	892.353.357,00	337.307.154,00	37,80
JUMLAH		18.497.011.714,66	16.000.782.028,02	2.496.229.686,64	15,60

	2022	2021
b) Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp6.839.385.979,00	Rp6.195.980.906,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2022 sebesar Rp6.839.385.979,00 terdiri dari:

Tabel 99 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

NO.	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Dinas Kesehatan				
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	344.009.200,00	281.310.000,00	62.699.200,00	22,29
	2. Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis	22.375.000,00	0,00	22.375.000,00	0,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	358.045.144,00	(358.045.144,00)	(100,00)
	2. Retribusi IMB	18.603.894,00	19.548.207,00	(944.313,00)	(4,83)
	3. Retribusi Pemakaian Alat	227.538.880,00	-	227.538.880,00	-
3.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman				
	1. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	300.000,00	450.000,00	(150.000,00)	(33,33)
4.	Dinas Perhubungan				
	1. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	222.999.000,00	162.692.400,00	60.306.600,00	37,07
	2. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya Di Lingkungan Terminal	91.871.000,00	113.401.000,00	(21.530.000,00)	(18,99)
	3. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal	9.026.545,00	8.698.145,00	328.400,00	3,78
	4. Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.310.000,00	1.535.000,00	2.775.000,00	180,78
5.	Dinas Komunikasi Dan Informatika				
	1. Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	279.776.600,00	217.395.788,00	62.380.812,00	28,69
6.	Dinas Lingkungan Hidup				
	1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	434.514.000,00	328.973.000,00	105.541.000,00	32,08
7.	Badan Pendapatan				
	1. Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	1.083.581.960,00	(1.083.581.960,00)	(100,00)
	2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	424.619.800,00	(424.619.800,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.	Retribusi Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang Yang Dikontrakkan	1.183.484.500,00	1.504.028.232,00	(320.543.732,00)	(21,31)
4.	Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan Yang Dikontrakkan	1.654.346.060,00	0,00	1.654.346.060,00	0,00
5.	Retribusi Penyewaan Tanah Dan Bangunan	569.641.500,00	0,00	569.641.500,00	0,00
8.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan				
1.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	135.500.000,00	411.228.730,00	(275.728.730,00)	(67,05)
2.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00
9.	Dinas Peternakan				
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	162.145.000,00	(162.145.000,00)	(100,00)
2.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit Ternak	498.304.800,00	516.703.500,00	(18.398.700,00)	(3,56)
3.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Untuk Tujuan Komersial	0,00	318.325.000,00	(318.325.000,00)	(100,00)
4.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	162.530.000,00	0,00	162.530.000,00	0,00
6.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis	263.620.000,00	0,00	263.620.000,00	0,00
10.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan				
1.	Retribusi Pelayanan Tempat Tempat Rekreasi Dan Olahraga	87.089.000,00	25.675.000,00	61.414.000,00	239,20
11.	Dinas Kelautan Dan Perikanan				
1.	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	26.190.000,00	30.000.000,00	(3.810.000,00)	(12,70)
2.	Retribusi Produksi Usaha Daerah Selain Bibit Atau Benih Tanaman, Ternak Dan Ikan	564.700.000,00	150.350.000,00	414.350.000,00	275,59
3.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	25.680.000,00	24.600.000,00	1.080.000,00	4,39
12.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian				
1.	Retribusi Izin Usaha Dagang	-	52.675.000,00	(52.675.000,00)	(100,00)
2.	Retribusi Pelayanan, Pengujian Alat-Alat Ukur Takar	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00
Jumlah		6.839.385.979,00	6.195.980.906,00	870.943.953,00	14,06

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	2022	2021
	<u>Rp3.371.631.127,65</u>	<u>Rp6.344.367.457,00</u>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO TA 2022 sebesar Rp3.371.631.127,65 yaitu Pendapatan Deviden dari Bank NTT sebesar Rp3,208,610.625,00 dan dari PT. Manggarai Multi Investasi sebesar Rp163.020.502,65.

d) Lain-Lain PAD yang Sah - LO	2022	2021
	<u>Rp68.811.512.091,78</u>	<u>Rp82.702.442.024,43</u>

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2022 sebesar Rp68.811.512.091,78 terdiri dari:

Tabel 100 Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikkan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Dinas Kesehatan				
1.	Penerima Dana Kapitasi JKN	8.823.377.970,00	10.002.420.875,00	(1.179.042.905,00)	(11,79)
2.	Penerima Dana Non Kapitasi JKN	1.772.926.900,00	1.933.475.300,00	(160.548.400,00)	(8,30)
2.	BLUD				
1.	Pendapatan Jasa BLUD	53.756.792.476,31	63.392.150.458,09	(9.635.357.981,78)	(15,20)
3.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
1.	Pendapatan Denda Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil	0,00	271.475.000,00	(271.475.000,00)	(100,00)
4.	Badan Pendapatan				
1.	Jasa Giro Kas Daerah	1.404.200.337,08	1.285.193.938,66	119.006.398,42	9,26
2.	Bunga Deposito	376.090.663,66	975.876.908,44	(599.786.244,78)	(61,46)
3.	Penerima Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TPTGR)	1.805.723.473,83	1.553.685.316,38	252.038.157,45	16,22
4.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	24.109.335,00	289.276.556,86	(265.167.221,86)	(91,67)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian		Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikkan / Penurunan	%
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
		Pelaksanaan Pekerjaan				
5.		Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa	(3.000.000,00)	2.804.251.351,00	(2.807.251.351,00)	(100,11)
6.		Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota	819.860.422,40	0,00	819.860.422,40	0,00
7.		Pendapatan Denda PBB2-LO	0,00	62.368.669,00	(62.368.669,00)	(100,00)
8.		Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	6.356.731,00	(6.356.731,00)	(100,00)
5.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan					
1.		Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya (Bagi Hasil Penangkaran Padi Sawah)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dinas Komunikasi Dan Informatika					
1.		Hasil Sewa BMD	-	3.410.000,00	(3.410.000,00)	(100,00)
2.		Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	19.105.000,00	0,00	19.105.000,00	0,00
7.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga					
1.		Jasa Giro Pada Rekening Dana BOS	10.114.363,00	114.897.000,00	(104.782.637,00)	(91,20)
8.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaan Ruang					
1.		Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	7.603.920,00	(7.603.920,00)	(100,00)
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah					
1.		Jasa Giro Pada Kas Di Bendahara	370,00	0,00	370,00	0,00
10.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
1.		Jasa Giro Pada Kas Di Bendahara	84.134,74	0,00	84.134,74	0,00
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
1.		Jasa Giro Pada Kas Di Bendahara	3.041,60	0,00	3.041,60	0,00
12.	Bagian Kerja Sama					
1.		Jasa Giro Pada Kas Di Bendahara	124,74	0,00	124,74	0,00
13.	Kecamatan Reok Barat					
1.		Jasa Giro Pada Kas Di Bendahara	117.400,00	0,00	117.400,00	0,00
14.	Dinas Kelautan Dan Perikanan					
1.		Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikkan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
	1	Remunerasi TDF	356.079,42		
Jumlah		68.811.512.091,78	82.702.442.024,43	(13.891.286.012,07)	(16,80)

2) Pendapatan Transfer – LO

	2022	2021
	<u>Rp808.198.279.359,00</u>	<u>Rp836.736.579.603,00</u>

Pendapatan Transfer - LO TA 2022 sebesar Rp808.198.279.359,00 dan TA. 2021 sebesar Rp836.736.579.603,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 101 Rincian Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikkan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	769.174.349.255,00	794.750.719.052,00	(25.576.369.797,00)	(3,22)
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	15.136.480.000,00	(15.136.480.000,00)	(100,00)
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	39.023.930.104,00	26.849.380.551,00	12.174.549.553,00	45,34
Jumlah		808.198.279.359,00	836.736.579.603,00	(28.538.300.244,00)	(57,87)

a) **Transfer Pemerintah Pusat - LO**

	2022	2021
	<u>Rp769.174.349.255,00</u>	<u>Rp794.750.719.052,00</u>

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat TA 2022 dan TA. 2021.

Tabel 102 Transfer Pemerintah Pusat – LO

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikkan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Bagi Hasil Pajak	12.174.883.629,00	13.288.255.536,00	(1.113.371.907,00)	109,14
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	3.572.136.974,00	3.371.184.256,00	200.952.718,00	94,37
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	548.841.188.585,00	552.025.297.000,00	(3.184.108.415,00)	100,58
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	204.586.140.067,00	226.065.982.260,00	(21.479.842.193,00)	110,50
Jumlah		769.174.349.255,00	794.750.719.052,00	(25.576.369.797,00)	103,33

(1) **Dana Bagi Hasil Pajak- LO**

	2022	2021
	<u>Rp12.174.883.629,00</u>	<u>Rp13.288.255.536,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah sebesar Rp12.174.883.629,00 merupakan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103 Dana Bagi Hasil Pajak – LO

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikkan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Bagi Hasil Pajak PBB Sektor Pertambangan	12.244.135.309,00	7.841.544.661,00	4.402.590.648,00	56,14
2.	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi	4.201.161.994,00	3.401.366.612,00	799.795.382,00	23,51
3.	Bagi Hasil Dari Pph Pasal 25, Pasal 29	(294.419.626,00)	505.375.756,00	(799.795.382,00)	(158,26)
4.	Bagi Hasil Cukai Tembakau	426.596.600,00	426.596.600,00	0,00	0,00
Jumlah		16.577.474.277,00	12.174.883.629,00	4.402.590.648,00	36,16

(1) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	2022	2021
	<u>Rp3.572.136.974,00</u>	<u>Rp3.371.184.256,00</u>

Jumlah sebesar Rp3.572.136.974,00 atau 122,70%, merupakan realisasi penerimaan dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp2.911.181.040,00 sedangkan Realisasi TA. 2021 adalah sebesar Rp3.371.184.256,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 104 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Panas Bumi	1.057.193.745,00	1.201.720.000,00	113,67	1.567.877.858,00
2.	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara	69.149.219,00	200.290.708,00	289,65	124.398.623,00
3.	Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.784.838.076,00	2.170.064.211,00	121,58	1.674.500.150,00
4.	Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	62.055,00	0,00	4.407.625,00
Jumlah		2.911.181.040,00	3.572.136.974,00	122,70	3.371.184.256,00

(2) Dana Alokasi Umum-LO	2022	2021
	<u>Rp548.841.188.585,00</u>	<u>Rp552.025.297.000,00</u>

Jumlah sebesar Rp548.841.188.585,00 merupakan realisasi Dana Alokasi Umum - LO TA 2022.

2022	2021
<u>Rp204.586.140.067,00</u>	<u>Rp226.065.982.260,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(3) Dana Alokasi Khusus-LO

Jumlah sebesar Rp204.586.140.067,00 merupakan realisasi Dana Alokasi Khusus - LO TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105 Dana Alokasi Khusus – LO

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikkan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A. DAK Fisik					
1.	DAK Reguler	54.667.591.392,00	79.352.747.545,00	(24.685.156.153,00)	(31,11)
2.	DAK Penugasan	57.823.465.856,00	43.837.707.917,00	13.985.757.939,00	31,90
3.	DAK Afirmasi	6.161.332.069,00	1.564.582.000,00	4.596.750.069,00	293,80
Jumlah DAK Fisik		118.652.389.317,00	124.755.037.462,00	(6.102.648.145,00)	294,60
B. DAK Non Fisik					
1.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	279.490.000,00	4.032.300.000,00	(3.752.810.000,00)	(93,07)
2.	Bantuan Operasional Kesehatan	14.282.912.820,00	24.513.770.205,00	(10.230.857.385,00)	(41,74)
3.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.218.254.000,00	1.867.907.000,00	2.350.347.000,00	125,83
4.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	56.781.042.830,00	62.852.850.000,00	(6.071.807.170,00)	(9,66)
5.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.161.349.500,00	618.750.000,00	1.542.599.500,00	249,31
6.	Tunjangan Khusus Guru	4.778.533.900,00	1.493.143.210,00	3.285.390.690,00	220,03
7.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	1.950.503.933,00	(1.950.503.933,00)	(100,00)
8.	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	1.067.359.600,00	573.994.450,00	493.365.150,00	85,95
9.	Operasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	54.000.000,00	1.525.450.000,00	(1.471.450.000,00)	(96,46)
10.	Dana Pelayanan Kepariwisata	936.148.600,00	431.289.000,00	504.859.600,00	117,06
11.	Fasilitas Penanaman Modal	345.238.500,00	196.112.000,00	149.126.500,00	76,04
12.	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	325.200.000,00	1.254.875.000,00	(929.675.000,00)	(74,09)
13.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	704.221.000,00	0,00	704.221.000,00	0,00
Jumlah DAK Non Fisik		85.933.750.750,00	101.310.944.798,00	(15.377.194.048,00)	(15,18)
Total DAK		204.586.140.067,00	226.065.982.260,00	(21.479.842.193,00)	(9,50)

a) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	2022	2021
	Rp0,00	Rp15.136.480.000,00

Tidak ada realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO pada TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(1) Dana Insentif Daerah-LO	2022	2021
	Rp0,00	Rp15.136.480.000

Penerimaan Dana Insentif Daerah TA 2022 yang bersumber dari APBN sebesar Rp0,00

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	2022	2021
	Rp39.023.930.104,00	Rp26.849.380.551,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp36.811.158.880,00 yang terdiri dari:

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO	2022	2021
	Rp39.023.930.104,00	Rp19.849.380.551,00

Jumlah sebesar Rp39.023.930.104,00 merupakan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 106 Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi – LO

No.	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikkan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.076.265.526,00	1.654.739.127,00	4.421.526.399,00	267,20
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.398.291.747,00	1.119.217.054,00	2.279.074.693,00	203,63
3.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.937.851.082,00	2.073.519.101,00	10.864.331.981,00	523,96
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	114.023.050,00	909.091,00	113.113.959,00	12.442,53
5.	Bagi Hasil Pajak Dari Pajak Rokok	16.497.498.699,00	15.000.996.178,00	1.496.502.521,00	9,98
Jumlah		39.023.930.104,00	19.849.380.551,00	19.174.549.553,00	96,60

(2) Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi-LO	2022	2021
	Rp0,00	Rp7.000.000.000,00

Pendapatan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Lainnya – LO pada TA 2022 tidak dianggarkan.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	2022	2021
	Rp66.664.501.147,00	Rp63.052.555.207,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

a) Pendapatan Hibah-LO

2022	2021
<u>Rp15.651.423.313,00</u>	<u>10.330.225.207,00</u>

Jumlah sebesar Rp15.651.423.313,00 merupakan realisasi Pendapatan Hibah -LO TA 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah Untuk Air Minum dengan realisasi sebesar Rp9.297.000.000,00;
- Hibah dari Pusat untuk Dinas Perindag sebesar Rp5.747.041.580,00;
- Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:
 - Peralatan Mesin Rp396.058.000,00
 - Alat Kantor an Rumah Tangga Rp100.186.190,00
 - Alat Studio dan Komunikasi Rp3.200.000,00
 - Buku Rp107.937.543,00

b) Lain-lain Pendapatan
sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan-LO

2022	2021
<u>Rp51.013.077.834,00</u>	<u>Rp52.722.330.000,00</u>

Jumlah sebesar Rp51.013.077.834,00 merupakan realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO TA 2022 berupa pendapatan Hibah BOS.

2. Beban Daerah - LO

2022	2021
<u>Rp941.288.551.594,66</u>	<u>Rp910.094.625.418,33</u>

Jumlah sebesar Rp941.288.551.594,66 merupakan Beban Daerah - LO TA 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 107 Rincian Beban Daerah

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikkan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Operasi	741.958.064.421,56	729.394.665.326,33	12.563.399.095,23	1,72
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	139.394.340.865,10	120.650.579.817,00	18.743.761.048,10	15,54
3	Beban Transfer	59.936.146.308,00	60.004.380.275,00	(68.233.967,00)	(0,11)
	Jumlah	941.288.551.594,66	910.049.625.418,33	31.238.926.176,33	3,43

a) Beban Operasi - LO

2022	2021
<u>Rp741.958.064.421,56</u>	<u>Rp729.394.665.328,33</u>

(1) Beban Pegawai

2022	2021
<u>Rp434.884.018.430,00</u>	<u>Rp411.304.855.360,92</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah sebesar Rp434.884.018.430,00 merupakan Beban Pegawai - LO TA 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 108 Beban Pegawai Per Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	235.232.436.513,00
2	Dinas Kesehatan	53.305.668.670,00
3	RSUD. Ben Mboi	27.287.143.280,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.247.832.351,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.021.401.832,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.496.186.211,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.680.333.507,00
8	Dinas Sosial	2.248.672.540,00
9	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	1.460.680.472,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.179.095.847,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.087.277.150,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.914.040.140,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.918.524.166,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.700.713.033,00
15	Dinas Perhubungan	2.824.866.288,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.904.834.708,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.082.080.558,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.466.003.154,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.313.114.853,00
20	Dinas Perikanan	2.444.953.769,00
21	Dinas Peternakan	2.748.519.692,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.295.651.795,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.713.623.803,00
24	Bagian Pemerintahan	8.400.000,00
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.400.000,00
26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13.700.000,00
27	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	15.600.000,00
28	Bagian Administrasi Pembangunan	13.350.000,00
29	Bagian Organisasi	15.600.000,00
30	Bagian Umum	8.234.357.733,00
31	Bagian Hukum	12.600.000,00
32	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	245.975.000,00
33	Bagian Kerjasama	9.100.000,00
34	Sekretariat Dewan	18.412.988.855,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.838.268.631,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.343.439.109,00
37	Badan Pendapatan Daerah	2.822.708.141,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.341.302.899,00
39	Inspektorat	2.495.956.707,00
40	Kecamatan Langke Rembong	7.521.840.564,00
41	Kecamatan Ruteng	1.494.078.903,00
42	Kecamatan Satar Mese	1.708.173.212,00
43	Kecamatan Reok	2.404.719.267,00
44	Kecamatan Cibal	1.923.691.738,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)
45	Kecamatan Wae Ri'i	1.687.662.734,00
46	Kecamatan Satar Mese Barat	1.027.306.112,00
47	Kecamatan Rahong Utara	863.652.628,00
48	Kecamatan Lelak	880.502.596,00
49	Kecamatan Reok Barat	1.096.096.280,00
50	Kecamatan Cibal Barat	1.147.942.223,00
51	Kecamatan Satar Mese Utara	1.175.362.957,00
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.544.587.809,00
Total		434.884.018.430,00

(2) Beban Persediaan

2022	2021
<u>Rp73.323.969.518,66</u>	<u>Rp83.792.643.023,85</u>

Beban Persediaan TA 2022 dapat dilihat dengan jumlah sebesar Rp73.323.969.518,66 dan TA. 2021 sebesar Rp83.792.643.023,85, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 109 Rincian Beban Persediaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	16.822.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.076.144.782,00
3	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.362.535.725,00
4	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	132.220.000,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	702.405.750,00
6	Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.415.902.622,00
7	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.186.875.200,00
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	13.850.000,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.022.994.849,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.131.372.465,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.049.930.946,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	196.150.500,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	63.593.041,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	814.848.665,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	234.203.500,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	314.475.000,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	216.900.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-9.079.902.003,00
19	Beban Obat-Obatan-Obat	2.030.987.290,66
20	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	81.260.560,00
21	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	25.695.090.187,00
22	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	326.940.000,00
23	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	2.727.193.834,00
24	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	177.280.040,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
25	Beban Natura dan Pakan-Pakan	689.854.424,00
26	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.696.389.600,00
27	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.547.460.000,00
28	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.280.000,00
29	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.093.060.941,00
30	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	15.000.000,00
31	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.500.000,00
32	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	34.880.000,00
33	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	10.482.000,00
34	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	142.540.000,00
35	Beban Pakaian Adat Daerah	7.500.000,00
36	Beban Pakaian Olahraga	126.047.700,00
37	Beban Pakaian Paskibraka	34.799.900,00
38	Beban Komponen-Komponen Peralatan	6.100.000,00
Total		73.323.969.518,66

	2022	2021
(3) Beban Jasa	<u>Rp157.848.404.006,20</u>	<u>Rp108.492.998.860,00</u>

Jumlah sebesar Rp157.848.404.006,20 merupakan Beban Jasa TA 2022 dan TA. 2021 sebesar Rp108.429.998.860,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110 Rincian Beban Jasa

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	5.500.000,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	855.550.000,00
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.101.347.500,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	418.184.000,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	5.600.000,00
6	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	3.000.000,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	130.725.000,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	454.150.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	22.842.807.842,00
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	27.159.996.566,00
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	9.510.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	983.403.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.342.559.250,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	57.041.500,00
15	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.377.559.450,00
16	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	89.935.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	713.025.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Administrasi	4.645.874.150,00
19	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	990.604.750,00
20	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.303.070.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)
21	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.620.259.500,00
22	Beban Jasa Tenaga Keamanan	136.521.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Supir	253.989.500,00
24	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	48.935.000,00
25	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	48.000.000,00
26	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	58.328.284,00
27	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	519.100,00
28	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	550.900.150,00
29	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	51.500.000,00
30	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000,00
31	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	80.000.000,00
32	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00
33	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	130.100.000,00
34	Beban Tagihan Telepon	15.029.890,00
35	Beban Tagihan Air	364.039.425,00
36	Beban Tagihan Listrik	530.125.956,00
37	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	67.610.000,00
38	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.224.784.001,00
39	Beban Paket/Pengiriman	52.127.951,00
40	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	318.863.129,00
41	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	320.187.500,00
42	Beban Medical Check Up	151.240.355,00
43	Beban Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.802.198.400,00
44	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	366.589.630,00
45	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.575.079,00
46	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.509.842,00
47	Beban Sewa Excavator	198.245.382,00
48	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	83.200.000,00
49	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	96.650.000,00
50	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	3.000.000,00
51	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	6.000.000,00
52	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	65.032.000,00
53	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	162.000.000,00
54	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	367.500.000,00
55	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	33.328.000,00
56	Beban Sewa Alat Musik	32.000.000,00
57	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	24.500.000,00
58	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	250.000.000,00
59	Beban Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	736.656.000,00
60	Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	130.000.000,00
61	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	7.681.000,00
62	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	20.000.000,00
63	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	360.000.000,00
64	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.002.488.000,00
65	Beban Bimbingan Teknis	573.159.500,00
66	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	74.500.000,00
67	Beban Beasiswa	125.000.000,00
68	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.916.004.610,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)
69	Beban Barang dan Jasa BLUD	62.865.882.064,20
JUMLAH		157.848.404.006,20

(4) Beban Pemeliharaan	2022	2021
	<u>Rp3.733.501.137,00</u>	<u>Rp6.033.190.735,00</u>

Jumlah sebesar Rp3.733.501.137,00 merupakan Beban Pemeliharaan TA 2022 dan TA. 2021 sebesar Rp6.033.190.735,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111 Rincian Beban Pemeliharaan

NO.	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	67.500.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	97.668.575,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.100.414.524,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	34.700.000,00
5	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	322.363.013,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	496.936.900,00
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	24.205.575,00
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	355.746.450,00
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	233.966.100,00
JUMLAH		3.733.501.137,00

(5) Beban Perjalanan Dinas	2022	2021
	<u>Rp58.792.169.613,00</u>	<u>Rp49.990.887.779,00</u>

Jumlah sebesar Rp58.792.169.613,00 merupakan Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan TA. 2021 sebesar Rp49.990.887.779,00.

Tabel 112 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.962.950.044,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	1.220.960.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.925.821.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.112.900.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	569.538.569,00
Total		58.792.169.613,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(6) Beban Bunga	2022	2021
	Rp749.758.475,50	Rp0,00

Jumlah sebesar Rp749.758.475,50 merupakan Beban Bunga TA 2022 ATAS Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (Bank NTT).

(7) Beban Hibah	2022	2021
	Rp8.939.671.357,00	Rp55.409.327.951,00

Jumlah sebesar Rp8.939.671.357,00 merupakan Beban Hibah TA 2022 kepada Kelompok Organisasi Masyarakat sebesar Rp8.089.278.178,00 dan Hibah ke Partai Politik sebesar Rp564.279.320,00

(8) Beban Bantuan Sosial	2022	2021
	Rp1.912.172.145,00	Rp12.930.797.180,00

Jumlah sebesar Rp1.912.172.145,00 merupakan Beban Bantuan Sosial TA 2022 berupa Uang kepada Individu sebesar Rp723.485.000,00, Kelompok Masyarakat Rp624.100.000,00 dan berupa Barang kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp764.580.870,00 dan Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar (199.993.725,00).

(9) Beban Penyusutan dan Amortisasi	2022	2021
	Rp139.394.340.865,10	Rp121.000.074.287,00

Jumlah sebesar Rp139.394.340.865,10 terdiri dari Beban Penyusutan sebesar Rp139.231.164.380,10 dan Amortisasi TA 2022 sebesar Rp163.176.485,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 113 Beban Penyusutan

NO.	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN	
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan Kantor	39.938.097.368,00	40.629.096.988,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.208.073.252,10	15.738.634.424,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	73.084.993.760,00	64.440.117.815,00
TOTAL		139.231.164.380,10	120.807.849.227,00

Tabel 114 Beban Amortisasi

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.344.825,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.050.060,00
3	Badan Pendapatan	41.459.100,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	11.470.000,00
5	Badan Keuangan	4.999.500,00
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	853.000.000,00
	Jumlah	163.176.485,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(1) Beban Penyisihan Piutang	2022	2021
	Rp278.399.741,96	Rp1.090.469.966,56

Jumlah sebesar Rp278.399.741,96 merupakan Beban Penyisihan Piutang TA 2022.

Tabel 115 Beban Penyisihan Piutang

NO	URAIAN	Nilai (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2.315.290,00
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2.606.538,00
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	330.750,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	5.361.715,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	32.109.898,00
6	Beban Penyisihan Piutang Pemakaian kekayaan Daerah	12.963.000,00
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	195.480.810,00
8	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.780,40
9	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	27.229.960,56
JUMLAH		278.399.741,96

(2) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2022	2021
	Rp3.847.557.908,00	Rp3.557.946.475,00

Jumlah sebesar Rp3.847.557.908,00 merupakan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022.

(3) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2022	2021
	Rp56.088.588.400,00	56.446.433.800,00

Jumlah sebesar Rp56.088.588.400,00 merupakan Beban Bantuan Keuangan TA 2022.

(4) Beban Lain-lain	2022	2021
	Rp1.495.999.997,00	Rp0,00

Realisasi beban lain-lain TA 2022 sebesar Rp1.495.999.997,00 merupakan beban extracomptable atas belanja modal yang nilainya dibawah kapitalisasi minimum sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai.

c) Kegiatan Non Operasional

	2022	2021
(1) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp1.398.400.575,91	Rp1.077.724.791,58



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp1.398.400.575,91 yaitu Surplus penyertaan Modal pada PDAM Tirta Komodo sebesar Rp1.569.797.307,00 dan Surplus Penyertaan pada PT. MMI sebesar Rp20.892.236,91. serta adanya koreksi kurang Aset Tetap - Gedung dan Bangunan yang telah dilakukan penghapusan pada tahun berjalan dan sebelumnya dicatat pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp192.288.968,00

(2) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2022	2021
	Rp0,00	Rp0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

3. Pos Luar Biasa - LO

(1) Beban Luar Biasa/Tak Terduga	2022	2021
	Rp5.329.997.314,00	Rp7.818.361.915,00

Jumlah sebesar Rp5.329.997.314,00 terdiri dari Beban untuk penanganan bencana.

4. Surplus/Defisit - LO

	2022	2021
	Rp27.162.173.086,34	Rp94.242.444.683,70

Jumlah sebesar Rp27.162.173.086,34 merupakan Pendapatan LO sebesar Rp972.382.321.419,09 dikurangi Beban-beban sebesar Rp941.288.551.594,66 dan kegiatan non operasional sebesar Rp1.398.400.575,91 serta dikurangi Pos Luar Biasa sebesar Rp5.329.997.314,00.

E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

1) Arus Masuk Kas	2022	2021
	Rp1.090.365.130.064,65	Rp880.106.278.897,34

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus masuk kas ke Bendahara Umum Daerah dari seluruh aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi

NO.	URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	17.591.100.545,64	14.249.331.177,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	6.636.049.044,00	6.008.336.669,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.371.631.127,65	6.344.367.457,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	83.124.157.028,36	9.116.644.371,34



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO.	URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	15.426.423.534,00	13.288.255.536,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.277.954.900,00	3.371.184.256,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	549.171.449.585,00	552.025.297.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	204.255.879.067,00	226.065.982.260,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	123.185.581.000,00	15.136.480.000,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.014.826.399,00	22.259.400.171,00
11	Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	7.000.000.000,00
12	Penerimaan Hibah	9.297.000.000,00	5.241.000.000,00
13	Penerimaan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	51.013.077.834,00	0,00
JUMLAH ARUS KAS MASUK		1.090.365.130.064,65	880.106.278.897,34

2) Arus Keluar Kas

2022

2021

Rp936.051.176.990,96

Rp696.612.930.989,92

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh operasi Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2021 dan TA 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 117 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi

NO.	URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Pembayaran Pegawai	416.863.482.286,24	406.189.315.405,92
2	Pembayaran Barang dan Jasa	267.835.774.738,00	182.435.857.503,00
3	Pembayaran Bunga	727.530.923,72	0,00
4	Pembayaran Hibah	60.060.498.551,00	10.780.693.571,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	2.112.165.870,00	12.930.797.180,00
6	Pembayaran Tak Terduga	5.329.997.314,00	24.271.887.055,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	3.847.557.908,00	3.557.946.475,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	179.274.169.400,00	56.446.433.800,00
Jumlah Arus Keluar kas		936.051.176.990,96	696.612.930.989,92

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

2022

2021

Rp154.313.953.073,69

Rp183.493.347.907,42

Jumlah tersebut merupakan selisih arus masuk kas sebesar Rp1.090.365.130.064,65 dan arus keluar kas sebesar Rp936.051.176.990,96 dari aktivitas operasi TA 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

1) Arus Masuk Kas	2022	2021
	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan arus kas masuk dari pengembalian pokok dana bergulir.	2022	2021
	Rp188.503.541.293,98	Rp179.576.733.421,00

2) Arus Keluar Kas

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum Daerah TA 2022 dan 2021 dari seluruh aktivitas investasi non keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk memperoleh aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

NO.	URAIAN	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	Perolehan Tanah	1.962.083.000,00	5.947.920,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	33.377.856.959,98	13.430.060.243,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	71.649.025.218,00	53.649.909.637,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.217.576.116,00	102.249.815.621,00
5	Pengeluaran Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	19.297.000.000,00	10.241.000.000,00
Jumlah Arus Keluar kas		188.503.541.293,98	179.576.733.421,00

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	2022	2021
	(Rp188.503.541.293,98)	(Rp179.576.733.421,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan TA 2022 dan TA. 2021.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

1) Arus Masuk Kas	2022	2021
	Rp6.250.717.554,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan penerimaan pinjaman daerah dari Bank NTT pada tahun 2022 sebesar Rp6.250.717.554,00

2) Arus Keluar Kas	2022	2021
	Rp0,00	Rp0,00

Tidak ada arus masuk keluar dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2022 dan 2021.

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	2022	2021
	Rp6.250.717.554,00	Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan TA 2022 dan TA. 2021.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

1) Arus Masuk Kas	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp62.818.787.785,99	Rp61.241.754.906,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas masuk dari aktivitas transitoris TA 2022 sebesar Rp62.818.787.785,99 terdiri dari penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp62.679.154.360,99 dan penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) dari Dana BOS sebesar Rp139.633.425,00.

2) Arus Keluar Kas	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp62.772.073.953,99	Rp61.241.754.906,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas masuk dari aktivitas transitoris TA 2022 sebesar Rp62.772.073.953,99 terdiri dari pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp62.679.154.360,99 dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) dari Dana BOS sebesar Rp92.919.593,00.

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp46.713.832,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas transitori TA 2022 dan TA. 2021.

5. Kenaikan / (penurunan) Kas	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	(Rp27.892.156.834,29)	Rp3.916.614.486,42

Jumlah tersebut merupakan Kenaikan dan penurunan Kas TA 2022 dan TA. 2021.

6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Kas Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP dan Kas Lainnya	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp68.653.403.849,09	Rp42.171.803.870,01

Jumlah tersebut merupakan jumlah Saldo Awal Kas di Kas Daerah sebesar Rp46.071.808.206,43, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp16.610.150,00, Kas di BLUD sebesar Rp17.549.199.725,66, Kas Dana BOS sebesar Rp850.324.887,00, dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp4.165.460.880,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

7. Kas di Kas Daerah	2022	2021
	Rp25.925.927.971,75	Rp46.071.808.206,43
Jumlah tersebut merupakan jumlah Saldo Akhir Kas di BUD.		
8. Kas di Bendahara Penerimaan	2022	2021
	Rp8.784.000,00	Rp0,00
Jumlah tersebut merupakan Kas di Bendahara Penerimaan.		
9. Kas di Bendahara Pengeluaran	2022	2021
	Rp116.332.162,00	Rp16.610.150,00
Jumlah tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran.		
10. Kas di BLUD	2022	2021
	Rp12.960.776.557,97	Rp17.549.199.725,66
Jumlah tersebut merupakan Kas di BLUD RSUD Ruteng		
11. Kas di FKTP	2022	2021
	Rp1.214.202.935,00	Rp4.165.460.880,00
Jumlah tersebut merupakan sisa Kas pada 21 (dua puluh satu) Puskesmas (<i>Lampiran 8</i>).		
12. Kas Dana BOS	2022	2021
	Rp384.904.092,00	Rp850.324.887,00
Jumlah tersebut merupakan sisa Kas pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (<i>Lampiran 7</i>).		
13. Kas Lainnya	2022	2021
	Rp150.319.296,08	Rp0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya sebesar Rp150.319.296,08 yang terdiri dari Jasa Giro BOS yang belum disetor sebesar Rp10.114.363,00, Jasa Giro pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp87.301,08 serta utang PFK BOS yang belum disetor sebesar Rp140.117.632,00.		
14. Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana	2022	2021
	Rp40.761.247.014,80	Rp68.653.403.849,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kapitasi pada FKTP dan Kas Lainnya

Jumlah tersebut terdiri dari jumlah Saldo Akhir Kas di Kas Daerah sebesar Rp25.925.927.971,75, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp8.784.000,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp116.332.162,00, Kas di BLUD sebesar Rp12.960.776.557,97, Kas Dana BOS sebesar Rp384.904.092,00, Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp1.214.202.935,00, dan Kas Lainnya sebesar Rp150.319.296,08.

F. Laporan Perubahan Ekuitas / LPE

1. Ekuitas Awal	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp2.248.941.972.935,56	Rp 2.160.987.887.957,43

Jumlah sebesar Rp2.248.941.972.935,56 merupakan jumlah Ekuitas Dana Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp 2.160.987.887.957,43, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

2. Surplus/Defisit	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp27.162.173.086,34	Rp94.242.444.683,70

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan LO sebesar Rp972.382.321.419,09 dikurangi Beban-beban sebesar Rp941.288.551.594,66 dan kegiatan non operasional sebesar Rp1.398.400.575,91 serta dikurangi Pos Luar Biasa sebesar Rp5.329.997.314,00.

3. Koreksi Ekuitas	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	(Rp454.255.384,04)	(Rp6.288.359.705,27)

Jumlah Koreksi Ekuitas sebesar (Rp454.255.384,04) diuraikan sebagai:

Tabel 119 Koreksi Ekuitas

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Mutasi
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang				
1	31/12/2022	01.a/JP-BLUD/XII/2022	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	98.437.767,00
2	31/12/2022	01/JP-PENDAPATAN/XII/2022	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2.640.000,01
3	31/12/2022	02/JP-PENDAPATAN/XII/2022	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2.306.000,00
4	31/12/2022	03/JP-PENDAPATAN/XII/2022	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	3.720.000,00
5	31/12/2022	05/JP-PENDAPATAN/XII/2022	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	32.090.022,50
6	31/12/2022	12A/JP-PENDAPATAN/XII/2022	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	328.200,00
7	31/12/2022	28/JP-PENDAPATAN/XII/2022	Penyisihan Piutang Retribusi	5.106.875,00
8	31/12/2022	29/JP-PENDAPATAN/XII/2022	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.095.565,92



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Mutasi
9	31/12/2022	50/JP-PENDAPATAN/XII/2022	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2.667.698,79
10	31/12/2022	51/JP-PENDAPATAN/XII/2022	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	1.947.852,50
11	31/12/2022	53/JP-PENDAPATAN/XII/2022	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	145.175,00
12	31/12/2022	54/JP-PENDAPATAN/XII/2022	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.022.785,24
Jumlah Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang				155.507.941,96
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap				
1	31/12/2022	10/Jukor/PPO/2022	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(150.000.000,00)
Jumlah Koreksi Ekuitas - Aset Tetap				(150.000.000,00)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
1	31/12/2022	19/Jukor/PERDAG/2022	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Pemerintah	(459.763.326,00)
Jumlah Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				(459.763.326,00)
Jumlah Koreksi Ekuitas				(454.255.384,04)

	2022	2021
4. Ekuitas Akhir	Rp2.275.649.890.638,16	Rp2.248.941.972.935,86

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Akhir yaitu penjumlahan Ekuitas Awal ditambah Surplus pada Laporan Operasional ditambah Koreksi Ekuitas Lainnya.

G. Informasi Tambahan

1. Dana PROLANIS

Terdapat sisa kas sebesar Rp105.083.399,47 pada rekening Puskesmas yang merupakan dana Program Prolanis BPJS. Dana tersebut ditransfer langsung oleh BPJS ke rekening Puskesmas tanpa melalui Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat saldo kas pada rekening Puskesmas dan tidak dicatat di dalam LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2022. Pembentukan rekening Bank atas nama Puskesmas untuk Program Prolanis ini tanpa adanya Surat Keputusan Bupati Manggarai. Berikut rincian sisa kas rekening Prolanis Puskesmas:

Tabel 120 52 Rincian Dana Prolanis

No	Nomor rekening	Bank	Nama Pemilik	Saldo
				31 Desember 2022 (Rp)
1	709900359	BNI	PROLANIS Puskesmas Kota	15.432.404,00
2	847585214	BNI	PROLANIS Puskesmas La'o	14.666.344,00
3	882859183	BNI	PROLANIS Puskesmas Wangko	65.602.745,00
4	886918178	BNI	PROLANIS Puskesmas Watu Alo	1.620.000,00
5	705852547	BNI	PROLANIS Puskesmas Timung	280.122,00
6	4729-01-019684-53-4	BRI	PROLANIS Puskesmas Cancar	3.223.038,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nomor rekening	Bank	Nama Pemilik	Saldo
				31 Desember 2022 (Rp)
7	4729-01-019359-53-7	BRI	PROLANIS Puskesmas Wae Mbeleng	2.302.461,00
8	2501251437	Bank NTT	PROLANIS Puskesmas Pagal	108.957,66
9	03702-01-001209-9	Bank NTT	PROLANIS Puskesmas Reo	1.847.327,81
Jumlah				105.083.399,47

2. Pinjaman Daerah pada PT BANK NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mempercepat pelayanan dan pembangunan infrastruktur daerah, Pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan pinjaman dengan para pihak yaitu PT Bank NTT dengan jumlah pinjaman, bunga dan jangka waktu pengembalian sesuai kesepakatan para pihak.

Berdasarkan addendum ke 2 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 2298/DIR-DKrKM/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menerima pencairan pinjaman dari Bank NTT sebesar Rp6.250.717.554,00 yang merupakan bagian dari pinjaman jangka panjang Pemda dalam bentuk Standby Loan senilai Rp110.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,50%/tahun dan jatuh tempo pada 31 Desember 2024. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan pembayaran atas bunga pada tahun 2022 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121 Rincian Realisasi dan Sisa Dana Pinjaman

No	Bulan	Penarikan (Rp)	Bunga (Rp)	Tanggal Pembayaran	No SP2D	Total Angsuran (Rp)
1	November 2022	3.079.290.521,00	2.530.923,72	13/12/2022	4931/LS/2022	2.530.923,72
2	Desember 2022	3.171.427.033,00	22.227.551,78	30/01/2023	0218/LS/2023	22.227.551,78
Jumlah		6.250.717.554,00	24.758.475,50			24.758.475,50

Berdasarkan pencairan di tahun 2022 senilai Rp6.250.717.554,00, sampai dengan 31 Desember 2022 telah dibayarkan kepada pihak ketiga senilai Rp5.252.194.946,00. Sisa dana pinjaman senilai Rp998.522.608,00 masih terdapat di Kas Daerah dan terbawa ke tahun 2023. Penjelasan terkait realisasi pada tahun 2022 dan sisa dana yang terbawa ke tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 122 Rincian Realisasi dan Sisa Dana Pinjaman

No	SKPD	Pagu Paket	Realisasi	Sisa	Keterangan Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1	Dinas PPO	711.965.554,00	709.973.200,00	1.992.354,00	Sisa tender
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.638.752.000,00	2.677.876.525,00	960.875.475,00	Sisa tender
3	Dinas PUPR	1.900.000.000,00	1.864.345.221,00	35.654.779,00	Sisa tender
Jumlah		6.250.717.554,00	5.252.194.946,00	998.522.608,00	

Selanjutnya, penjelasan terkait rincian pembayaran kepada pihak ketiga pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 123 Daftar Rincian Pembayaran kepada Pihak Ketiga pada tahun 2022

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	Uraian	Nilai	Sisa Kontrak
1	521.1.050/AlsinP3B/666/VII/2022	99.988.800,00	Bayar Kepada Putra Mitra Kembar, Pemb.100% Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan Pertanian Brigade sesuai SPK. No.521.1.050/AlsinP3B/666/VII/2022 tgl.29 Juli 2022 dana APBD II (Pinjaman Daerah) Keg.Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota	99.988.800,00	0,00
2	521.1.050/AlsinP3B/788/VIII/2022	49.600.000,00	Bayar kepada CV. Javatech Agro Persada, Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Mesin	49.600.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	Uraian	Nilai	Sisa Kontrak
			Rontok Padi sesuai Surat Pesanan No.521.1.050/AlsinP3B/788/VIII/2022 tgl. 15 Agust. 2022 dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.		
3	521.1.050/AlsinP3B/797/VIII/2022	38.584.000,00	Bayar kepada CV. Karya Hidup Sentosa, Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Kultivator sesuai Surat Pesanaan No. 521.1.050/AlsinP3B/797/VIII/2022 tgl. 15 Agust. 2022 dari dana APBD II (Pinjaman Daerah) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.	38.584.000,00	0,00
4	20/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/VIII/2022	199.999.000,00	Blj LS Pengadaan Bahan Kursus Babershop,Kursus Menjahit,Kursus Tata Rias Rambut, Lursus Tata Rias Pengantin SKB Randoong (Dana Pinjaman Daerah Ta 2022) Sesuai SPK 20/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/VIII/2022 Tgl 15 Agt 2022	199.999.000,00	0,00
5	521.1.050/TU/694/VIII/2022	50.724.000,00	Bayar kepada PT. Cahaya Mas Makmur, Pembayaran 100% Pengadaan Plastik Mulsa untuk Petani Milenial Tahun 2022 sesuai S. Pesanan No.521.1.050/TU/694/VIII/2022 tgl. 03 Agust 2022 Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Keg.Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	50.724.000,00	0,00
6	521.1.050/TU/696/VIII/2022	101.448.000,00	Bayar kepada PT. Cahaya Mas Makmur, Pembayaran 100% Pengadaan Plastik Mulsa sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.1.050/TU/696/VIII/2022 tgl. 03 Agustus 2022 dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	101.448.000,00	0,00
7	PUPR.600.762/1380/PE MB.JBT/BM/IX/2022	750.000.000,00	Termin Ke - 1 Fisik 65% Atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wae Pangajaran, Kecamatan Satar Mese (Lanjutan) Sumber Dana Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 Kontrak No. Pupr.600.762/1380/Pemb.Jbt/Bm/Ix/2022 Tanggal 26 September 2022	463.125.000,00	0,00
			Pembayaran 100% Paket Pembangunan Jembatan Wae Pangajaran, Kecamatan Satar Mese (Lanjutan) Sumber Dana Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022	249.375.000,00	
			Retensi 5% Atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wae Pangajaran, Kecamatan Satar Mese (Lanjutan) Sumber Dana Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022	37.500.000,00	
8	PUPR.600.762/1378/PE MB.JBT/BM/IX/2022	609.910.000,00	Termin 1 Fisik 62% Atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wae Kebong (Lait - Tongke), Kecamatan Ruteng/Rahong Utara (Lanjutan) Sumber Dana Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 Kontrak No. PUPR.600.762/1378/PEMB.JBT/BM/IX/2022 Tanggal 29 September 2022	359.200.000,00	0,00
			Pembayaran 95% Atas Fisik 100% Pembangunan Jembatan Wae Kebong (Lait - Tongke), Kecamatan Ruteng/Rahong Utara (Lanjutan) Sumber Dana Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022	220.210.000,00	
			Retensi 5% Atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wae Kebong (Lait-Tongke), Kecamatan Ruteng/Rahong Utara (Lanjutan) Sumber Dana Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022	30.500.000,00	
9	PUPR.600.762/732/PER CN.JBT-BM/VII/2022tgl21/7/2022 BAProdukPerencanaann	99.994.350,00	Pelunasan 100% Perencanaan pembanguna jembatan dana pinjaman daerah sumber danapinjandaerah(PD)TA2022KontrakNo: PUPR.600.762/732/PERCN.JBT-	99.994.350,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	Uraian	Nilai	Sisa Kontrak
	o:PUPR.600.762/877.b/VIII/2022		BM/VII/2022tgl21/7/2022baprodukperencanaaanno:PUPR.600.762/877.B/VIII/2022tgl19/8/2022		
10	PUPR.600.762/657/PERCN.JLN.DPBM/VII/2022tggI08/7/2022BASerahTerimaPerenno:47/CV.SA-RTG/VIII/2022	99.795.771,00	Pelunasan100%Perencanaan Pembangunan Jalan, Sumber Dana Pinjaman Daerah, Paket 2 TA 2022 Kontrak No:PUPR.600.762/657/PERCN.JLN.DPBM/VII/2022tggI08/7/2022 BA Serah Terima Perenno:47/CV.SA-RTG/VIII/2022 Tgl 05/8/2022	99.795.771,00	0,00
11	:02/PU22PPK13/VII/2022tgl22/7/2022	74.900.000,00	Pelunasan100%Perencanaan Jalan Rehab/Pemeliharaan, Sumber Dana Pinjaman Daerahta2022kontrakno:02/PU22PPK13/VII/2022tgl22/7/2022baserahterimaprodukperenno: 07/PPK/VIII/2022tgl10/10/2022	74.900.000,00	0,00
12	PUPR.600.762/648/PERCN.JLN.DP-BM/VII/2022	99.750.100,00	Pelunasan100%Perencanaan Pembangunan Jalan, Sumber Dana Pinjaman Daerah,Paket1TA2022KontrakNo:PUPR.600.762/648/PERCN.JLN.DP-BM/VII/2022tgl08/7/2022BASerahTerimaProdukPerencanaaanno:PUPR.600.762/765.b/PERCN.JLN.DP-BM/VIII/2022tgl05/8/2022	99.750.100,00	0,00
13	521.1.050/AlsinP3B/597/VII/2022	559.260.000,00	Bayar Kepada PT. Hasjrat Abadi Kupang, Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Traktor Roda Dua sesuai Surat Pesanan No.521.1.050/AlsinP3B/597/VII/2022 tgl. 11 Juli 2022 Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Keg. Pengawasan Penggunaan Pertanian	559.260.000,00	0,00
14	521.1.050/TU/VIII/775/2022	174.750.000,00	Pembayaran 100% Pengadaan Benih Bawang Merah untuk Kel. Pengem. Hortikultura dan Kel. Petani Milenial Tahun 2021 sesuai SPK No:521.1.050/TU/VIII/775/2022 tgl. 11 Agust.2022 Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	174.750.000,00	0,00
15	521.1.050/TU/VIII/778/2022	157.162.500,00	Pembayaran 100% Pengadaan Benih Bawang Merah untuk Petani Milenial Tahun 2022 sesuai Surat Perintah Kerja No:521.1.050/TU/VIII/778/2022 tgl. 11 Agust. 2022 yang bersumber dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Keg. Penggunaan Sarana Pertanian	157.162.500,00	0,00
16	521.1.050/TP/V/361.a/2022	39.375.000	Belanja Bahan- Bahan/Bibit Tanaman Benih Padi untuk Penangkaran Padi Sawah	39.375.000	0,00
17	40/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/XI/2022	99.999.000,00	Belanja LS Pembayaran 100% Dana Pinjaman Atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Untuk Peserta Kursus Tata Rias Kecantikan/Pengantin Skb Randong Oleh Cv Lima Saudara Sesuai Spk 40/Ppk.Ppo.Dpd.Brg.Skb/Xi/2022 Tgl 07 Nov. 2022	99.999.000,00	0,00
18	42/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/XI/2022	99.995.000,00	Belanja LS Pembayaran 100% Dana Pinjaman Atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Untuk Peserta Kursus Perlengk. Barbershop Rambut Pria-Skb Randong Oleh CV Lima Saudara Sesuai SPK 42/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/XI/2022 Tgl 07 Nov. 2022	99.995.000,00	0,00
19	36/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/XI/2022	99.999.000,00	Bli LS Pembayaran 100% Dana Pinjaman Atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Untuk Peserta Tata Kecantikan Rambut SKB Randong Oleh CV Raama Sesuai SPK	99.999.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	Uraian	Nilai	Sisa Kontrak
			36/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/XI/2022 Tgl 07 Nov. 2022		
20	38/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/XI/2022	99.992.000,00	Belanja LS Pembayaran 100% Dana Pinjaman Atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Bantuan Sosial Barang Untuk Peserta Kursus Menjahit Skb Randong Oleh CV Raama Sesuai SPK 38/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/XI/2022 Tgl 07 Nov. 2022	99.992.000,00	0,00
21	34/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/XI/2022	102.560.000,00	Belanja LS Pembayaran 100% Dana Pinjaman Atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Alat Peraga Lab Bahasa Inggris SKB Randong Oleh CV Sumber Hidup Abadi Sesuai SPK 34/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/XI/2022 Tgl 07 Nov. 2022	102.560.000,00	0,00
22	44/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/XI/2022	7.429.200,00	Belanja LS Pembayaran 100% Dana Pinjaman Atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan Pendukung Kursus Bahasa Inggris oleh CV Sumber Hidup Abadi Sesuai SPK 44/PPK.PPO.DPD.BRG.SKB/XI/2022 Tgl 07 Nov. 2022	7.429.200,00	0,00
23	521.1.050/PertanKP/PPK/X/1133/X/2022	295.200.000,00	Pembayaran Uang (100%) Pengadaan Anakan Kopi sesuai Surat Perjanjian Nomor : 521.1.050/PertanKP/PPK/X/1133/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Yang Bersumber dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	295.200.000,00	0,00
24			Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk biaya Pembukaan Lahan Tidur sumber Dana Pinjaman Daerah (APBD II) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2022	200.000.000,00	0,00
25			Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk biaya Pengadaan Benih sumber Dana Pinjaman Daerah (APBD II) Tahun Anggaran 2022	99.972.725,00	0,00
26	521.1.050/PPSPP/XII/1569/2022	55.950.000,00	Pembayaran 100% Pengadaan Anakan Mangga sesuai Surat Pesanan No : 521.1.050/PPSPP/XII/1569/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang bersumber dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	55.950.000,00	0,00
27	521.1.050/PPSPP/XII/1566/2022	134.000.000,00	Pembayaran 100% Pengadaan Anakan Durian sesuai Surat Pesanan No : 521.1.050/PPSPP/XII/1566/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang bersumber dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	134.000.000,00	0,00
28	PUPR.762/1312.A/SWA.PEM.JBT.PD/IX/2022	30.000.000,00	Pelunasan 100% Pengawasan Pembangunan Jembatan Sumber Dana Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022	30.000.000,00	0,00
29	521.1.050/PPK-PPSPP/XII/29/2022	129.350.000,00	Bayar Kepada CV. Pratama Putra Pembayaran 100% Pengadaan Anakan Kopi Robusta sesuai SPK No : 521.1.050/PPK-PPSPP/XII/29/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang bersumber dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana	129.350.000,00	0,00
30	521.1.050/PPSPP/XII/1491/2022	140.792.000,00	Pembayaran 100% Pengadaan Benih Jahe sesuai Surat Perintah Kerja No : 521.1.050/PPSPP/XII/1491/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang bersumber dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	140.792.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	Uraian	Nilai	Sisa Kontrak
31	521.1.050/PPSPP/XI/1273/2022	39.000.000,00	Pembayaran 100% Pengadaan Plastik Sungkup, Kotak Semai Benih dan Gunting Pangkas Biasa sesuai Surat Pesanan No : 521.1.050/PPSPP/XI/1273/2022 tanggal 24 November 2022 yang bersumber dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah) Kegiatan Pengawasan Pen	39.000.000,00	0,00
32	521.1.050/BPPSPP/1334.a/XII/2022	33.300.000,00	Bayar Kepada CV. Welamas Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan Pupuk Organik Curah (Bokashi) untuk Pengembangan Pala dari sesuai Surat Pesanan No. 521.1.050/BPPSPP/1334.a/XII/2022 tgl. 1 Desember 2022 Dana APBD II (Pinjaman Daerah).	33.300.000,00	0,00
33	521.1.050/BPPSPP/1334.b/XII/20222	32.500.000,00	Pembayaran 100% Pengadaan Pengadaan Pupuk Organik Curah (Bokashi) untuk Pengembangan Kopi Robusta Biasa sesuai Surat Pesanan 521.1.050/BPPSPP/1334.b/XII/20222 tanggal 1 Desember 2022 yang bersumber dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah)	32.500.000,00	0,00
34	521.1.050/PPK.PPSPP/X/18/2022	223.110.000,00	Bayar kepada CV. Lingko Purang Pembayaran 100% Belanja Pengadaan Anakan Pala sesuai Surat Pesanan No :521.1.050/PPK.PPSPP/X/18/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang bersumber dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah)	223.110.000,00	0,00
35	521.1.050/PPSPP/XI/1272/2022	23.809.500,00	Pembayaran 100% Pengadaan Drom Plastik untuk Kegiatan Petani Milenial Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Perintah Kerja No : 521.1.050/PPSPP/XI/1272/2022 tanggal 24 November 2022 yang bersumber dari Dana APBD II (Pinjaman Daerah)	23.809.500,00	0,00
36	PUPR.600.762/1817/PR CN.LINGPERKOTAAN/XI/2022	99.995.000,00	Pembayaran Pelunasan 100% Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pertokoan Kecamatan Langke Rembong TA. 2022 Kontrak No.PUPR.600.762/1817/PRCN.LINGPERK OTAAN/XI/2022 BA Serah Terima Produk Perencanaan No. 18/CV.SK/XII/2022 tanggal 21-12-2022	99.995.000,00	0,00
Jumlah				5.252.194.946,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB V
PENUTUP

Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yuridiksi Tempat Entitas Tersebut Berada

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Manggarai merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Luas wilayah yaitu 1.669.42 km² atau 166.942 Ha. Secara administrative Kabupaten Manggarai dibagi menjadi 12 Kecamatan, 145 Desa dan 26 Kelurahan dengan pusat pemerintahan di Kota Ruteng Kecamatan Langke Rembong dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Manggarai Barat;
- Sebelah Utara : Laut Flores;
- Sebelah Timur : Kabupaten Manggarai Timur;
- Sebelah Selatan : LautSawu.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Manggarai terletak diantara 8°14'27.32" LS - 8°54'57.17" 0 LS dan 120°.13'41.34" BT-120°32'47.22" BT (data peta rupa bumi Indonesia).

2. Penjelasan Mengenai Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Pemerintah Kabupaten Manggarai merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah ebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Manggarai juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Kegiatan Operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Manggarai. sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2022.

Ruteng, 21 Juni 2023
Bupati Manggarai,

Herybertus G. L. Nabit, SE.MA.

